



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS TAHUN 2013-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, berkaitan dengan program percepatan pencapaian Target *Millenium Development Goals* Kabupaten Pamekasan 2013-2015, perlu merumuskan arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* Tahun 2013-2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET *MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS* 2013-2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
3. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD MDGs adalah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2015.

**BAB II
RAD MDGs**

Pasal 2

RAD MDGs merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

Dokumen RAD MDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Kebijakan / Prioritas / Program;
- b. Indikator / Output;
- c. Capaian 2010;
- d. Target Capaian 2011- 2015;
- e. Anggaran 2011- 2015;
- f. Sumber Pendanaan;
- g. Pelaksana; dan
- h. Keterangan.

Pasal 4

RAD MDGs menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals*.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Maret 2014

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI

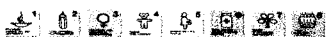
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 5A

KATA PENGANTAR

Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium merupakan komitmen nasional dan global dalam upaya menyejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Hasil dari resolusi dari Majelis Umum PBB yang dideklarasikan oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konfrensi Tingkat Tinggi tahun 2000. Dalam resolusi tersebut tertuang tujuan pembangunan millienium yang merupakan paradigma pembangunan global.

Bagi Indonesia dan negara negara berkembang, Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan. Pemerintah Indonesia telah mengarus utamakan MDGs dalam pembangunan sejak tahap perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaannya. Hal ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 dan 2010-2014, dan Rencana Kerja Tahunan berikut dalam dokumen anggarannya. Berlandaskan strategi *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro invironment*, alokasi dana dalam anggaran pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran MDGs terus meningkat setiap tahunnya. Di samping itu, kemitraan produktif Pemerintah dengan organisasi masyarakat madani dan sektor swasta mempunyai kontribusi penting terhadap percepatan pencapaian MDGs.

Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan. Pemerintah memandang bahwa pencapaian tujuan MDGs sampai tahun 2010 belum optimal. Beberapa capaian target MDGs stagnan, bahkan menunjukkan kinerja menurun. Percepatan pencapaian MDGs di tingkat nasional tertuang dalam "Peta Jalan Percepatan Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia", sementara itu di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) perlu dituangkan dalam "Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.



Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan pencapaian target Pembangunan Milenium (MDGs) ini akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang disepakati secara global dalam target-target MDGs. Oleh karena itu RAD MDGs ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD maupun dalam Rencana Jangka Pendek (Tahunan) yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kerja SKPD.

Bersamaan dengan itu, Kabupaten Pamekasan terus membangun suasana yang memungkinkan segenap komponen masyarakat, dan sektor swasta untuk dapat berpartisipasi secara produktif dalam suatu gerakan, salah satunya Bupati Ngajak Bangun Desa (Bunga Bangsa) demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Keberhasilan dalam pencapaian MDGs sangat tergantung pada tata kelola yang baik, kemitraan produktif dari segenap komponen masyarakat, dan penerapan pendekatan menyeluruh untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan peningkatan layanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RAD MDGs ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan

Pamekasan, 27 Maret 2014

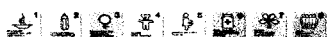
BUPATI PAMEKASAN,



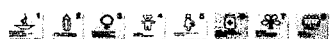
ACHMAD SYAFII

DAFTAR ISI

COVER	i
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 7 TAHUN 2014	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1 Kondisi Umum Pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium	3
1.1 Pengintegrasian MDGs Kedalam Kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan	3
1.2 Kondisi Pencapaian 7 (Tujuh) Tujuan Pembangunan Milenium di Kabupaten Pamekasan (MDGs)	7
2 Permasalahan dan Tantangan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Kabupaten Pamekasan	17
2.1 Permasalahan Umum	17
2.2 Permasalahan Setiap Tujuan MDGs	18
2.3 Tantangan Umum	29
2.4 Tantangan Setiap Tujuan MDGs	30
BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs	38
1 Arah Kebijakan Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)	38
2 Strategi Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)	41
3 Target Kinerja Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Kabupaten Pamekasan	47



BAB III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI	56
LAMPIRAN		75
	Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs Kabupaten Pamekasan	
BAB IV	PENUTUP	126



DAFTAR LAMPIRAN

Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs (RAD MDGs) Kabupaten Pamekasan	75
--	-----------



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 MARET 2014

**RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN MILLENIUM (MDGs)
DI KABUPATEN PAMEKASAN
2013-2015**

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui delapan butir *Millenium Development Goals (MDGs)* atau Tujuan Pembangunan Millenium, yaitu komitmen untuk mencapai kemajuan yang nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan manusia lainnya (pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan) pada tahun 2015. MDGs adalah pernyataan terkuat dari komitmen dunia internasional untuk memberantas kemiskinan global.

Pokok pikiran dalam MDGs menempatkan pembangunan manusia menjadi fokus utama pembangunan dengan target waktu dan kemajuan yang terukur, serta agenda pokok adalah penghapusan kemiskinan pada tahun 2015. Negara berkembang berupaya memenuhi konsensus dalam deklarasi tersebut, sementara negara-negara maju berkewajiban mendukungnya, dalam bentuk kemitraan global.

Ringkasan arah pembangunan global tersebut meliputi delapan agenda, yaitu :

- 1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan ekstrem;
- 2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang;
- 3) mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 4) menurunkan angka kematian anak;
- 5) meningkatkan kesehatan ibu hamil;

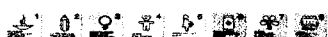
- 6) melawan penyebarab HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya;
- 7) menjamin keberlangsungan lingkungan; dan
- 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Komitmen MDGs di Indonesia, memang tidak secara spesifik tertuang dalam lembaran negara, namun secara umum, kedelapan tujuan dalam MDGs berikut upaya pemenuhan target, menjadi latar belakang dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan, khususnya Kabinet-Kabinet sejak Indonesia ikut mendeklarasikan komitmen MDGs. Salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, maupun dokumen-dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Telaah kemajuan pencapaian yang diperoleh, termasuk mengenali permasalahan dan agenda pokok kebijakan kabupaten/kota. Tidak terkecuali RPJMD 2013-2018 Kabupaten Pamekasan, yang mengakomodasi pokok-pokok dalam RPJMN 2009-2014. Dengan demikian secara tidak langsung, upaya pemenuhan komitmen dalam MDGs, juga menjadi komitmen daerah.

Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) merupakan amanah dari Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2010 dan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan berkeadilan. Pemerintah memandang bahwa pencapaian tujuan MDGs sampai tahun 2010 belum optimal. Beberapa capaian target MDGs masih stagnan, bahkan menunjukkan kinerja menurun. Percepatan pencapaian MDGs di tingkat nasional tertuang dalam Peta Jalan Percepatan Tujuan Millenium di Indonesia, sementara itu di tingkat daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium tertuang dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium (MDGs) termasuk Kabupaten Pamekasan. RAD MDGs ini disusun guna menseleraskan target-target nasional dengan pencapaian target-target daerah.

Penyusunan RAD Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Kabupaten Pamekasan disusun berdasarkan panduan yang diterbitkan oleh Bappenas, terdiri dari :

- I. Pendahuluan
- II. Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium
- III. Pemantauan dan Evaluasi
- IV. Penutup



1. KONDISI UMUM PEMBANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN BERKAITAN DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM

1.1.

Pengintegrasian MDGs kedalam kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) merupakan bagian utuh dari agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yaitu RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018.

Tabel 1.1.

Perbandingan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2013-2015 dengan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)	Agenda Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018
1. Menanggulangi Kemiskinan dan kelaparan	<ol style="list-style-type: none">1. Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial;2. Memperkuat iklim usaha UMKM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan;3. Meningkatnya infrastruktur penunjang kehidupan dan mobilitas masyarakat;4. Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja melalui perluasan lapangan kerja;5. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan;6. Meningkatnya investasi dan penanaman modal dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah;7. Memberdayakan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah;

<p>2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua</p>	<p>1. Terwujudnya masyarakat pamekasan yang cerdas, terampil dan terdidik berlandaskan iman dan taqwa</p> <p>2. Meningkatnya akses dan pemerataan, peningkatan kualitas hasil pelayanan pendidikan dengan strategi pencapaian yaitu Pemerataan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat, tidak diskriminatif dengan biaya murah (gratis), yang didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan dan perpustakaan yang memadai</p> <p>3. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang akan dicapai melalui strategi peningkatan kualitas hasil pendidikan yang didukung dengan kompetensi tenaga pendidik yang memadai</p>
<p>3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p>	<p>Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi peningkatan iklim kondusif bagi pengembangan keberdayaan perempuan dan anak melalui kemandirian berusaha dan ketahanan keluarga</p>
<p>4. Menurunkan Angka Kematian Anak</p>	<p>Terwujudnya masyarakat pamekasan yang sehat dengan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai.</p>
<p>5. Meningkatkan Kesehatan Ibu</p>	<p>Pemantapan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dicapai melalui strategi Pemantapan kapasitas pelayanan KB di klinik KB Pemerintah dan swasta melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB.</p>
<p>6. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya</p>	<p>1. Terwujudnya masyarakat pamekasan yang sehat dengan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai;</p> <p>2. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif).</p>
<p>7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup</p>	<p>Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap asri, sehat, kondusif dalam rangka kelangsungan pembangunan.</p>

Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

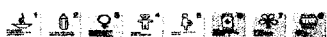
Apabila kita melihat persandingan antara Tujuan Pembangunan Milenium dengan RPJMD Kabupaten Pamekasan maka akan terlihat dengan jelas bahwa sebenarnya tujuan pembangunan milenium telah dilaksanakan oleh Kabupaten Pamekasan.

Kabupaten Pamekasan mempunyai strategi pembangunan yaitu (1) *Pro Poor*, (2) *Pro Growth*; (3) *Pro Job*; (4) *Pro Environment* yang kemudian melahirkan kebijakan yang diarahkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat yaitu:

1. Hak atas Layanan Pendidikan;
2. Hak atas Layanan Kesehatan;
3. Hak atas Pekerjaan dan Berusaha;
4. Hak atas Pangan;
5. Hak atas Perumahan;
6. Hak atas Air Bersih;
7. Hak atas Tanah;
8. Hak atas SDA dan Lingkungan Hidup;
9. Hak atas Rasa Aman;
10. Hak atas Berpartisipasi;
11. Hak atas Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Pemenuhan hak dasar tersebut akan dievaluasi setiap tahunnya melalui Indikator Kinerja Umum (IKU) yang terdiri dari: (1) Indeks pembangunan manusia (IPM); (2) Pertumbuhan Ekonomi; (3) Kemiskinan; (4) Pengangguran; (5) Kesenjangan Wilayah; (6) Indeks Gini.

Indikator kinerja tersebut merupakan rujukan atas kinerja pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengimplementasikan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pamekasan, Visi RPJMD Kabupaten Pamekasan adalah **“Terwujudnya Pamekasan yang bersih, sehat, cerdas, dan sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa didukung aparat yang profesional”**



Untuk mewujudkan visi maka ditetapkan misi, sebagai berikut :

- Misi 1** : Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan;
- Misi 2** : Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan;
- Misi 3** : Mempercepat pembangunan infrastruktur publik;
- Misi 4** : Meningkatkan Pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan;
- Misi 5** : Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola pemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel);
- Misi 6** : Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah.

1.2.

Kondisi Pencapaian 7 (Tujuh) Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Kabupaten Pamekasan



Tujuan 1:

MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Ringkasan status pencapaian target-target MDGs untuk Tujuan ke-1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Status Pencapaian Tujuan ke-1 MDGs di Kabupaten Pamekasan

Indikator	Acuan Dasar		Pamekasan		Status	Sumber Data
	Nasional	Provinsi	Saat ini	Target MDGs 2015		
TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN						
Target 1 A : menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari \$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015						
1,1	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari	5,90% (2008)	4,91% (2009)	11,88% (2012)	10,00%	▼ BPS Kab. Pamekasan, Susenas
	Pengeluaran perkapita riil perbulan disesuaikan (Rp)		653.370	636.060	655.400	▶ BPS Kab. Pamekasan
1,2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,21% (2010)	2,38% (2010)	2,24% (2012)	2,00%	▶ BPS Kab. Pamekasan, Susenas
	Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan nasional		13,10 (2012)	19,50 (2012)	17,50	▼ BPS Kab. Pamekasan, Susenas
Target 1 b : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda						
1,3	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	2,24% (2009)	17,02% (2010)	-1,98% (2012)	0,50%	▶ BPS Kab. Pamekasan, Sarken
1,4	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	62% (2009)	66,14% (2010)	76,40% (2013)	80 %	▶ BPS Kab. Pamekasan, Sarken

1,5	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga sendiri	64% (2009)	36,30% (2010)	49,81 (2012)	50%	▶	BPS Kab. Pamekasan, Sarkenas
Target 1 c : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015							
1,6	Prevalensi balita dengan berat badan rendah /kekurangan gizi						
	• Prevalensi balita gizi buruk	4,9% (2010)	2,5% (2010)	1,15%	3,6%	●	Dinkes Pamekasan
	• Prevalensi balita gizi kurang	13,0% (2010)	9,2% (2010)	11,44%	11,9%	▶	Dinkes Pamekasan
1,7	Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum						
	• 1.400 Kkal kapita/ hari	14,47% (2009)	15,33% (2009)	-	-		Tidak tersedia data
	• 2.000 Kkal/kapita/hari	61,86% (2009)	67,72% (2009)	-	-		Tidak tersedia data
Status ● Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus							



Tujuan 2: MENCAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

Ringkasan status pencapaian target-target MDGs untuk Tujuan ke-2 Mencapai Pendidikan untuk Semua, dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Tinjauan Status Pencapaian Tujuan ke-2 MDGs di Kabupaten Pamekasan

Indikator	Acuan Dasar		Pamekasan		Status	Sumber Data
	Nasional	Provinsi	Saat ini	Target MDGs 2015		
TUJUAN 2. MENCAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA						
<i>Target 2A : Menjamin pada tahun 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar</i>						
2,1	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	95,23% (2009)	97,81% (2010)	97% (2012)	108%	▶ Dikdik Pamekasan, Diknas Prov. Jatim
2,2	Proporsi murid kelas 1 yg berhasil menamatkan sekolah dasar	93,50% (2008)	96,03% (2010)	100%	100%	● Disdik Pamekasan, BPS, Susenas
2,3	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99,47% (2009)	99,54% (2010)	74% (2012)	80%	▶ Disdik Pamekasan, BPS, Susenas
Status ● Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus						



Tujuan 3:

MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Ringkasan status pencapaian target-target MDGs untuk Tujuan ke-3 mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Mencapai Pendidikan Untuk Semua, dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Status Pencapaian Tujuan ke-3 MDGs di Kabupaten Pamekasan

Indikator	Acuan Dasar		Pamekasan		Status	Sumber Data
	Nasional	Provinsi	Saat ini	Target MDGs 2015		
TUJUAN 3. MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
<i>Target3A : Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan disemua jenjang pendidikan tidak lebih pada tahun 2015</i>						
3,1	Rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar, menengah dan atas					
	➤ Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	99,73 % (2009)	92,16% (2010)	95% (2011)	100%	▶ Disdik, BPS, Susenas
	➤ Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	101,99% (2009)	93,50% (2010)	85% (2011)	95%	▶ Disdik, BPS, Susenas
	➤ Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	96,16% (2009)	82,02% (2010)	75% (2011)	85%	▶ Disdik, BPS, Susenas
	➤ Rasio APM perempuan/laki-laki di PT	102,95% (2009)	105,20% (2010)	-	-	
3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	99,85% (2009)	99,43% (2010)	62% (2012)	70%	▶ Disdik
3,2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pemerintahan	33,45% (2009)	41,38% (2010)	0,0002	0,0002	▶ Disdik
3,3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	17,90% (2009)	14,84% (2009)	4% (2011)	6,67%	▶ BPS
Status • Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus						



4

**Tujuan 4:
MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK**

Ringkasan status pencapaian target-target MDGs untuk Tujuan ke-4 Menurunkan Angka Kematian Anak, dapat dilihat pada Tabel 1.5.

**Tabel 1.5
Status Pencapaian Tujuan ke-4 MDGs di Kabupaten Pamekasan**

Indikator	Acuan Dasar		Pamekasan		Status	Sumber Data
	Nasional	Provinsi	Saat ini	Target MDGs 2015		
TUJUAN 4. MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK						
<i>Target 4A: Menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua pertiga dalam kurun waktu 1990-2015</i>						
4,1	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	44 (2007)	40 (2005)	0,52/1000	23	● LB 3 KIA (Dinkes Pamekasan)
4,2	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	34 (2007)	29 (2010)	0,52/1000	23	● LB 3 KIA (Dinkes Pamekasan)
4,3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	74,5% (2010)	91,40% (2010)	93,11%	Meningkat	▶ PWS Imunisasi (Dinkes Pamekasan)
Status ● Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus						



Tujuan 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Ringkasan status pencapaian target-target MDGs untuk Tujuan ke-5 Meningkatkan Kesehatan Ibu, dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6
Status Pencapaian Tujuan ke-5 MDGs di Kabupaten Pamekasan

Indikator	Acuan Dasar		Pamekasan		Status	Sumber Data
	Nasional	Provinsi	Saat ini	Target MDGs 2015		
TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU						
Target 5A: Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015						
5,1	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	228 (2007)	-	228	102	● LB 3 KIA (Dinkes Pamekasan), BPPKB Pamekasan, BPS
5,2	Proporsi kelahiran yang ditolong oleh petugas kesehatan	77,34 % (2009)	67,80% (2001) 88,77% (2010)	88,50%	95%	● LB 3 KIA (Dinkes Pamekasan)
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua tahun 2015						
5,3	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 semua cara	61,4% (2007)	64,16% (2010)	60,87%	65%	▶ PWS KB (Dinkes Pamekasan)
5,4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	35 (2007)	63 (2010)	5%	3%	▶ BPPKB Kab. Pamekasan
Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)						
5,5	• 1 kunjungan	93,3% (1991)	81,5% (2010)	96,33%	100%	▶ Dinkes Kab. Pamekasan, Kemkes
	• 4 kunjungan	81,5% (2007)	74,6% (2010)	87,92%	95%	▶ Dinkes, Kemenkes
5,6	Unmet need (kebutuhan keluarga berencana / KB yang tidak terpenuhi)	9,10% (2007)	8,2% (2007) 12,1% (2010)		Menu-run	Dinkes Kab. Pamekasan, BPS, Kemenkes,
Status ● Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus						



Tujuan 6:

MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA

Ringkasan status pencapaian target-target MDGs untuk Tujuan ke-6 Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7
Status Pencapaian Tujuan ke-6 MDGs di Kabupaten Pamekasan

Indikator	Acuan Dasar			Pamekasan	Status	Sumber Data
	Nasional	Provinsi	Saat ini	Target MDGs 2015		
TUJUAN 6. MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA						
<i>Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015</i>						
6.1	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,2% (2009)	0,01 (2010)	62	< 0,5	▼ Dinkes, Kasus HIV/AIDS
6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir					
	• Perempuan	10,3% (2007)	-		Meningkat	Belum ada instrumen untuk memantau situasi ini, Dinkes
	• Laki-laki	18,4% (2007)	-			
6.3	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS					
	• Perempuan menikah	11,9% (2010)	7,02% (2010)	-	-	Belum ada instrumen untuk memantau situasi ini
	• Laki-laki menikah	15,4% (2010)	5,65% (2010)	-	-	
	• Perempuan belum menikah	19,8% (2010)	9,77% (2010)	4.720	95%	▼ Dinkes Kab. Pamekasan, BPS Prov. Jatim, Survey MDGs 2010
	• Laki-laki belum menikah	20,3% (2010)	9,00% (2010)	7.105	95%	▼
<i>Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010</i>						
6.4	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	38,4% (2009)	49% (2010)		meningkat	Belum ada instrumen untuk memantau situasi ini, Dinkes

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015

6.6	Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria						
	• angka kejadian malaria (per 1.000 penduduk)	2,4% (2010)	0,17% (2010)	0	0	●	Dinkes
	• Tingkat kematian akibat malaria	0,16 % (2008)	-	0	0	●	
6.7	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	16,0% (2010)	0,4% (2007)				Belum ada instrumen untuk memantau situasi ini
6.8	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	21.90%					Belum ada instrumen untuk memantau situasi ini
6.9	Angka kejadian,prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberkolosa						
	• Angka kejadian tuberkolosa (per 100.000 penduduk/tahun)	228 (2009)	99 (2010)	115	Dihentikan, mulai berkurang		Dinkes Jumlah penderita TB dan BPS, jumlah penduduk
	• Tingkat prevalensi tuberkolosis (per 100.000 penduduk/tahun)	224 (2009)	1,107	139			Dinkes Jumlah penderita TB dan BPS, jumlah penduduk
	• Tingkat kematian karena tuberkolosa (per 100.000 penduduk/tahun)	39 (2009)	39 (2010)	12			
6.10	Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS						
	• Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	73,1 % (2009)	73 % (2010)	100%	70,00%		Dinkes Kab. Pamekasan
	• Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dalam program DOTS	91,0 % (2009)	85 % (2010)	100%	85,00%	●	Dinkes Kab. Pamekasan
Status ● Sudah Tercapai ► Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus							



Tujuan 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan status pencapaian target-target MDGs untuk Tujuan ke-7 Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dapat dilihat pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8
Status Pencapaian Tujuan ke-7 MDGs di Kabupaten Pamekasan

Indikator	Acuan Dasar		Pamekasan		Status	Sumber Data
	Nasional	Provinsi	Saat ini	Target MDGs 2015		
TUJUAN 7. MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP						
Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang						
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara thd luas daratan	52,43 % (2008)	52,52 % (2010)	10,68%	10,74%	► Dishutbun
7.2	Jumlah emisi karbon dioksida (CO ₂)	1,711,626 Gg (2008)	26,760,583.5 2 ton CO ₂ e/ tahun	-	-	Belum ada instrumen untuk Memantau situasi ini
	• Jumlah konsumsi energi primer (per kapita)	4,3 BOE (2008)	-	-	-	
	• Intensitas energi	2,1 SBM/1 USD (2008)	-	-	-	
	• Elastisitas energy	1,6 (2008)	-	-	-	
	• Besaran energi untuk energi terbarukan	3,45 % (2008)	-	-	-	
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metric ton	0 (2009)	-	-	-	Belum ada instrumen untuk memantau situasi ini
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	91.83 % (2008)	403,421 ton/tahun	-	-	
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian hayati thd total luas kawasan hutan	26.40% (2009)	27,54 (2010)	3,24%	3,11%	► Dishutbun

7.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	4,35 % (2000)	48.30%	-	-		
Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan thd air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015							
7.7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	47,71 % (2009)	54,60 % (2010)				Dinkes Kab.
	• Perkotaan	49,82 % (2009)	40,20 % (2010)	25,79%	75,29	▼	Pamekasan BPS, Susenas
	• Perdesaan	45,72 % (2009)	67,05 % (2010)	43,84	65,81	▼	
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	51,19 % (2009)	53,43 % (2010)				Dinkes Kab.
	• Perkotaan	69,51 % (2009)	70,34 % (2010)	76,84%	76,82%	►	Pamekasan BPS, Susenas
	• Perdesaan	33,96 % (2009)	38,81 % (2010)	48,68%	55,55	►	
Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020							
7.9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	33,96 % (2009)	3,02 % (2010)	-	-		
Status • Sudah Tercapai ► Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus							

2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DI KABUPATEN PAMEKASAN

2.1.

Permasalahan Umum

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Kabupaten Pamekasan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan.

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Kondisi serupa dalam upaya percepatan pembangunan pencapaian tujuan pembangunan millenium Kabupaten Pamekasan. Hingga saat ini permasalahan pencapaian tujuan MDGs yang dihadapi Kabupaten Pamekasan, antara lain:

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat;
2. Tingginya angka kemiskinan dan masih terbatasnya perluasan dan penyediaan lapangan kerja;
3. Pengaruh berkembangnya teknologi yang semakin maju;
4. Masih rendahnya kualitas pendidikan dan kurangnya sarana prasarana pelayanan medis;
5. Masih lemahnya instrumen perencanaan pembangunan dan belum mandirinya pemerintah daerah dalam pembangunan di daerah;
6. Kurang optimalnya pelayanan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

2.2.

Permasalahan Setiap Tujuan MDGs

Berdasarkan kondisi capaian target tujuan pembangunan millenium permasalahan yang dihadapi dalam rangka akselerasi pencapaian target tujuan pembangunan millenium di Kabupaten Pamekasan hingga 2015 adalah sebagai berikut:



Tujuan 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

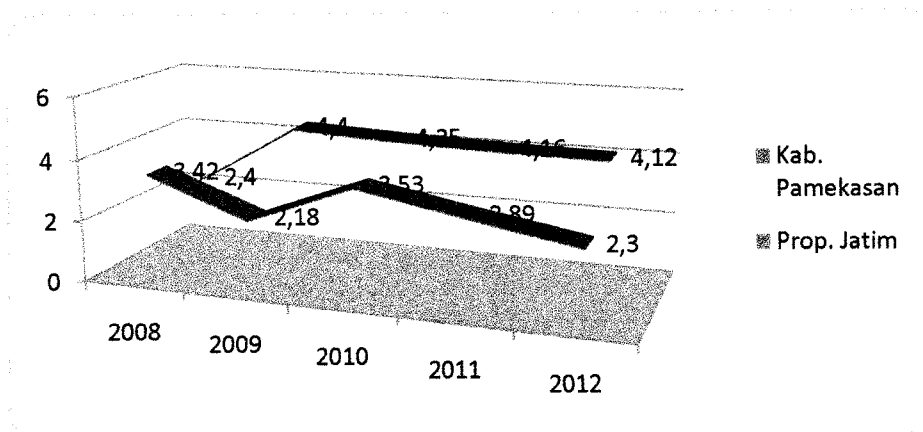
Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa kendala dan yang paling menonjol adalah angka penduduk miskin masih tinggi. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2011, jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan sebanyak 179.200 jiwa. Jumlah ini setara dengan 20,94 persen penduduk Pamekasan berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan yang cukup tinggi ini disebabkan beberapa hal antara lain:

- a. Masih tingginya jumlah keluarga/penduduk miskin yang membutuhkan penanganan serius dan berkesinambungan;
- b. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan keluarga miskin, yaitu rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Kurangnya permodalan yang dimiliki baik secara individu maupun kelompok masyarakat sehingga pengembangan usaha produktif berjalan lambat;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum optimal;
- e. Aksesibilitas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro masih rendah;
- f. Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin;

- g. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang dan pola konsumsi yang masih kurang;
- h. Belum tersusunnya payung hukum yang dapat mengkoordinasikan pengelolaan cadangan pangan di tingkat kabupaten;
- i. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur;
- j. Terbatasnya kemampuan/pagu anggaran setiap tahunnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa Kabupaten Pamekasan angka kemiskinan masih tergolong tinggi dikarenakan masih berada di atas angka kemiskinan Propinsi Jawa Timur maupun nasional. Pada tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Pamekasan tercatat sebesar 22,47 persen dan tahun 2011 terus berkurang seiring dengan intervensi program yang langsung menyentuh pada masyarakat miskin yaitu sebanyak 20,94.

Grafik 1.1
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber : BPS Kab. Pamekasan dan BPS Prop. Jatim

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan telah menunjukkan adanya kenaikan, khususnya pada tahun 2011 berkorelasi positif dengan terciptanya lapangan kerja serta menurunnya jumlah pengangguran terbuka. Pada tahun 2008 pengangguran terbuka sebesar 3,42 persen mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2009 yaitu 2,18 persen dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 3,53 persen. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka 2,89 persen dan menurun pada tahun 2012 menjadi

sebesar 2,30 prosen. Untuk lebih jelasnya, perkembangan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur tahun 2008 - 2012 terlihat sebagaimana Grafik 1.1.



Tujuan 2:

MENCAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

Permasalahan yang melingkupi upaya mencapai pendidikan untuk semua adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin;
2. Masih tinggi angka buta aksara;
3. Relevansi lembaga pendidikan kejuruan belum baik;
4. Masih adanya anak putus sekolah di semua jenjang pendidikan;
5. Kelangsungan pendidikan anak seringkali masih terkendala kewajiban anak untuk mencari nafkah membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan orang tuanya;
6. Belum optimalnya standarisasi pengelolaan pendidikan berbasis transparan, akuntabel dan partisipatif;
7. Belum optimalnya pemerataan guru dari semua jenjang sesuai bidang spesifikasi yang dimiliki;
8. Masih rendahnya mutu pendidikan utamanya pada wilayah pedesaan;
9. Belum optimalnya penataan kelembagaan pendidikan;
10. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dari semua jenjang pendidikan khususnya sarana dan prasarana infra struktur sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar khususnya pada lembaga pendidikan dasar yang ada di pelosok/pegunungan.

Angka melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Pamekasan cenderung menurun. Angka rata-rata lama sekolah terus membaik dari 4,73 (2006) menjadi 5,25 (2008), namun masih sangat rendah karena hanya

setingkat SD bukan setingkat pendidikan dasar. APK SD/MI dan SMA/SMK/MA masih fluktuatif.

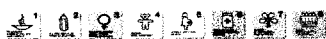
Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI pada tahun 2009 sebesar 111 persen, tahun 2010 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan sebesar 103,56 persen, pada tahun 2011 naik lagi menjadi 113,30 persen dan pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 106 persen. Pada jenjang SMP/MTs tahun 2009 sebesar 86,63 persen, pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 94 persen, pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 96,41 persen dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi sebesar 97 persen. Pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2009 sebesar 66 persen, pada tahun 2010 naik menjadi sebesar 80 persen, pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 86 persen dan pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 80,6 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.9.

Selanjutnya dilihat dari hasil Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI pada tahun 2009 sebesar 97,50 persen, pada tahun 2010 naik sebesar 98,23 persen, pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 111 persen, dan pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 97 persen. Pada jenjang SMP/MTs tahun 2009 sebesar 73,63 persen, tahun 2010 naik menjadi sebesar 84 persen, dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 86,03 persen, dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi sebesar 89 persen. Pada jenjang SMA/SMK/MA tahun 2009 sebesar 61 persen, tahun 2010 naik menjadi sebesar 75 persen, pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 80,06 persen, dan pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi sebesar 76,5 persen.

Tabel 1.9
Perkembangan Kinerja Bidang Pendidikan
Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 s.d 2012

Uraian	Satuan	Tahun		
		2010	2011	2012
I. DATA SD/MI				
1 Penduduk (7 - 12) Tahun	Orang	44.390	91.048	91.048
2 Jumlah Murid (7 - 12) Tahun	Orang	17.174	86.303	88.587
4 Angka Lulusan	Orang	12.323	17.711	17.414
5 Angka Putus Sekolah	Orang	230	118	98
6 Jumlah Gedung Sekolah	Lembaga	753	1.069	3.745
7 Guru	Orang	10.390	16.663	11.206
9 APK SD/MI	%	103,56	113,30	106
10 APM SD/MI	%	98,23	111	97
11 APS SD/MI	%	50	95	97
II. DATA SMP/MTs				
1 Penduduk (13 - 15) Tahun	Orang	44.390	50.335	50.335
2 Jumlah Murid (13 - 15) Tahun	Orang	17.174	42.690	37.589
4 Angka Lulusan	Orang	2.877	14.786	8.097
5 Angka Putus Sekolah	Orang	11	61	120
6 Jumlah Gedung Sekolah	Lembaga	275	486	1.285
7 Guru	Orang	5.145	10.342	6.744
9 APK SMP/MTs	%	94	96,41	97
10 APM SMP/MTs	%	84	86,03	89
11 APS SMP/MTs	%	50	85	89
III. DATA SMA/MA/SMK				
1 Penduduk (16 - 18) Tahun	Orang	42.672	46.960	46.960
2 Jumlah Murid (16 - 18) Tahun	Orang	28.709	30.891	37.852
4 Angka Lulusan	Orang	1.989	15.100	11.428
5 Angka Putus Sekolah	Orang	15	36	87
6 Jumlah Gedung Sekolah	Lembaga	133	260	1.269
7 Guru	Orang	3.370	6.120	2.642
9 APK SMA/MA/SMK	%	80	86	80,6
10 APM SMA/MA/SMK	%	75	80,06	76,5
11 APS SMA/MA/SMK	%	67	66	76,5
IV. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL				
1. Garapan Kejar Paket A	Orang	250	300	524
2. Garapan Kejar Paket B	Orang	675	825	1.038
3. Garapan Kejar Paket C	Orang	700	865	909

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pamekasan





Tujuan 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Di samping itu adanya permasalahan kekerasan terhadap perempuan, masih rendahnya kesadaran ber KB dari kaum laki – laki, kurangnya anggaran yang responsif gender serta adanya perbedaan perlakuan dan upah bagi tenaga kerja perempuan.

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi perempuan dan anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia, yang salah satunya tercermin dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta hak-hak anak yang tidak terabaikan.

Proporsi perempuan yang duduk di DPRD di wilayah Kabupaten Pamekasan masih timpang atau belum sesuai dengan harapan. Faktor penyebabnya adalah masih rendahnya kemampuan perempuan di bidang politik, khususnya sebagai pengurus partai relatif masih rendah. Pengurus partai politik masih didominasi laki-laki, rendahnya perempuan sebagai pengurus partai politik menyebabkan partai kesulitan mencari kader partai perempuan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif.

Partisipasi perempuan dalam pencarian kerja menurut pendidikan, dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.10
Pencarian Kerja yang Terdaftar Pada Kantor Tenaga Kerja
Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2012

PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Sekolah Dasar	-	-	-
SMP	-	1	1
SMA	201	49	250
Sarjana Muda/D3	25	42	67
Sarjana	186	-	186
JUMLAH	412	92	504

Sumber: Dinsosnakertran Kab. Pamekasan 2013



4

Tujuan 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya instansi kesehatan saja tetapi juga instansi/institusi/dinas terkait dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat bukan lagi menjadi obyek tetapi subyek yang harus bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri, keluarga dan lingkungan. Untuk itu perlu adanya dukungan berupa perilaku yang menunjang kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat. Sarana prasarana di Kabupaten Pamekasan pelayanan medis masih kurang yaitu ditandai dengan hanya tersedianya satu unit Rumah Sakit (RS) untuk melayani seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Secara spesifik permasalahan yang melingkupi upaya menurunkan kematian bayi diantaranya:

- a. Masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun bayi;
- b. Kurangnya kesadaran tentang manfaat ASI eksklusif;

- c. Kurangnya kesadaran pemeriksaan rutin pada saat hamil dan pasca melahirkan;
- d. Adanya penyakit penyerta/penyakit infeksi pada balita;
- e. Masalah tenaga kesehatan, biaya dan infrastruktur yang harus diperbaiki.

Jumlah angka kematian bayi mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2012. Tahun 2010 angka kematian bayi di Kabupaten Pamekasan 112, tahun 2011 turun menjadi 76 orang dan tahun 2012 sebanyak/sebesar 70 jiwa.

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Adapun perkembangan rasio jumlah posyandu terhadap balita di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel 1.11.

Tabel 1.11
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2008 s.d. 2012
Kabupaten Pamekasan

No	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Posyandu	761	824	838	838	865
2	Jumlah Balita	59.152	60.601	62.042	62.042	68.146
3	Rasio	128,65	135,97	135,07	135,07	126,93

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan



Tujuan 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui peningkatan kesehatan di masyarakat. Faktor kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Untuk itulah Kabupaten Pamekasan menetapkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas serta pelayanan bidang kesehatan masyarakat pada urutan ketiga prioritas pembangunan daerah.

Pembangunan kesehatan lebih diarahkan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat agar mampu secara mandiri memelihara kesehatan individu dan keluarganya serta meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kesehatan ibu.

Keselamatan ibu melahirkan, walaupun menjadi tanggung jawab suami atau keluarga tetapi perlu adanya dukungan, peran dan partisipasi masyarakat di sekitarnya, khususnya untuk mendampingi ibu mulai dari kehamilan sampai dengan melahirkan

Permasalahan utama untuk meningkatkan kesehatan ibu di Kabupaten Pamekasan:

- a. Usia remaja (15-19 tahun) merupakan usia yang sangat rentan untuk hamil dan melahirkan karena baik secara fisik maupun psikologis masih belum sempurna. Kehamilan pada usia remaja tidak saja membahayakan (yang dapat berujung pada kematian) ibunya tetapi juga membahayakan keselamatan bayinya. Di Pamekasan kejadian kehamilan pada usia remaja (baik yang sudah menikah maupun di luar nikah, kurang lebih usia sebelum 20 tahun) masih tergolong tinggi;
- b. Keterlambatan merujuk ke RS;
- c. Masih ada pertolongan dukun;
- d. Melanggar penapisan;
- e. Masih rendahnya angka pemakaian kontrasepsi dan tingginya *unmet need*;

- f. Adanya kesenjangan tingkat sosial ekonomi sehingga mengabaikan kesehatan Ibu, wanita hamil dan melahirkan;
- g. Dalam memberikan pelayanan KB di pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) dibutuhkan sarana prasarana yang berkualitas karena pelayanan KB sangat rentan terjadinya infeksi dan kegagalan, namun kenyataannya masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Pamekasan yang sarana prasarananya masih kurang bermutu.



**Tujuan 6:
MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT
MENULAR LAINNYA**

Permasalahan yang mejadi faktor pembatas untuk memerangi HIV/Aids, malaria dan penyakit menular lainnya diantaranya:

- a. Klinik VCT Di Kabupaten Pamekasan baru ada 1 (satu) yaitu di RSUD Pamekasan sehingga belum menjangkau kegiatan penjangangan bagi penderita yang dikonseling;
- b. Klinik VCT di RSUD sudah ada, akan tetapi belum didukung dengan pelayanan perawatan, dorongan dan pengobatan bagi penduduk yang dinyatakan reaktif HIV/AIDS.



Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Permasalahan yang menjadi kendala dalam upaya memastikan kelestarian lingkungan hidup yakni

- a. Belum Optimalnya Pengelolaan, Perlindungan Lingkungan Hidup dan pencegahan kerusakan serta pencemaran lingkungan;
- b. Kurangnya sarana/ prasarana dalam penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah;
- c. Kurangnya SDM yang berlatar pendidikan Lingkungan hidup dan belum adanya Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) di bidang lingkungan hidup;
- d. Belum adanya peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Sinergi kebijakan kurang berkelanjutan sehingga pembangunan untuk perlindungan dan pemulihan lingkungan tidak berjalan optimal;
- f. Belum adanya peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.4.

Tantangan Setiap Tujuan MDGs

Berdasarkan kondisi capaian target tujuan pembangunan millenium tantangan yang dihadapi dalam rangka akselerasi pencapaian target tujuan pembangunan millenium di Kabupaten Pamekasan hingga 2015 adalah sebagai berikut:



Tujuan 1:

MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Target 1A. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari \$ 1 (PPP) per hari per kapita

Tantangan utama adalah mengurangi jumlah rumah tangga miskin atau proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (tingkat kemiskinan) pada tahun 2015. Kabupaten Pamekasan adalah salah satu dari lima kabupaten yang termasuk kategori daerah tertinggal di Jawa Timur. Rilis bulan November 2012, lima kabupaten di Jawa Timur, yakni Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan masuk dalam kategori daerah tertinggal. Di samping itu Pamekasan juga menduduki peringkat tiga tertinggi persentase penduduk miskin di Jawa Timur di bawah Bangkalan dan Sampang (Data tahun 2011).

Kedua, membangun industri pengolahan hasil pertanian di lingkungan petani bekerja. Dengan kata lain, industri desa berbasis sumberdaya lokal (pertanian) harus hadir untuk meningkatkan nilai tambah produk. Penekanan industri desa sebagai jawaban bahwa 75,70 persen dari penduduk Pamekasan bekerja di sektor pertanian, sementara sektor pertanian tersebut menyumbangkan 48,99 persen PDRB untuk tahun 2012. Disinilah celah bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Pamekasan yang sebaiknya dimulai dengan fokus pada membangun industri pengolahan pertanian dari hulu

hingga hilir dan diproses di dekat petani. Sungguh pun begitu, tetap tidak menafikan membangun sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa.

Ketiga, peningkatan sarana infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan lainnya, sebagai tindak lanjut yang hingga saat ini penyediaan infrastruktur publik belum optimal.

Target 1B. Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda

Tantangan untuk mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda adalah meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka, sebab factor pembatasnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keduanya merupakan faktor kunci dalam penciptaan lapangan kerja secara mandiri dan dalam persaingan bursa kerja.

Target 1C. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015

Tantangan utama untuk menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 yaitu mewujudkan ketahanan pangan yang mantap. Secara umum masih cukup tersedia berbagai potensi sumberdaya (sumberdaya alam, SDM, budaya, teknologi, dan finansial) yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan yaitu mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilisasi harga pangan dan peningkatan cadangan pangan; dan mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan, bergizi seimbang, dan aman.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Pamekasan dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan

perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan bahan pangan. Potensi lahan pertanian tersebut, tersebar di seluruh Kabupaten Pamekasan dan masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan Daerah. Dukungan infrastruktur sumberdaya air dalam penguatan strategi ketahanan pangan, dapat ditempuh dengan langkah-langkah: pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, optimasi air tanah, peningkatan *water efficiency*.

Dengan potensi sumberdaya alam yang beragam dan didukung ketersediaan teknologi, memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk yang sangat besar tersebut memerlukan upaya-upaya yang tidak ringan. Namun demikian Kabupaten Pamekasan dengan kekayaan sumberdaya alam serta potensi dan peluang sangat besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang dan pola konsumsi. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan, penanganan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan pangan. Oleh karena itu strategi kedepan adalah adanya upaya yang dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Tantangan selanjutnya adalah adanya penyakit penyerta/penyakit infeksi pada balita yang menyebabkan balita kekurangan gizi. Contoh :Penyakit TB, Penyakit Kecacingan, BBLR, dll. Ini merupakan faktor penting dalam rangka perwujudan ketahanan pangan yakni upaya menekan gizi buruk pada balita.



Tujuan 2: MENCAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

Target 2A: Menjamin pada tahun 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Tantangan utama untuk menjamin pada tahun 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar yaitu, pendidikan harus secara konsisten berfungsi sebagai eskalator yang menjamin mobilitas vertikal warga masyarakat. Pembenahan kondisi dan kualitas pendidikan masyarakat umumnya masih sangat diperlukan, bukan saja dari segi ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang belum merata, tetapi juga akses dan kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan yang masih harus terus ditingkatkan.



Tujuan 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan disemua jenjang pendidikan tidak lebih pada tahun 2015

Tantangan utama adalah Wajar 12 tahun (Lulus SLTA), sementara tantangan yang lain adalah Kesempatan yang sama (laki + Perempuan) di jenjang pendidikan kelanjutan studi dan pekerjaan.



Tujuan 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

Target 4A: Menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua pertiga dalam kurun waktu 1990-2015

Tantangan utama adalah semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan pelaksanaan prosedur MTBS kepada setiap balita yang berobat ke Puskesmas. Sementara tantangan yang lain adalah cakupan ASI eksklusif dan LIL 100% tercapai dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera membawa anaknya berobat sebelum sakitnya parah.



Tujuan 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Target 5A: Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015

Tantangan utama untuk menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 adalah:

- a. Rujukan terencana harus dilaksanakan;
- b. Kemitraan Bidan dan dukun ditingkatkan;
- c. Bidan harus melaksanakan penapisan dengan baik;
- d. Meminimumkan mind set Masyarakat malu melahirkan ke Bidan;
- e. Mengoptimalkan dukungan TOGA dan TOMA;
- f. Meningkatkan kesadaran agar Ibu melahirkan dimasa reproduksi sehat 20 – 35 tahun;
- g. Tersedianya layanan kesehatan yang optimal untuk Ibu hamil, melahirkan dan pasca melahirkan.

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua tahun 2015

Tantangan utama untuk mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua tahun 2015 adalah kurangnya koordinasi antar lintas sektor dan KKB data peserta KB Aktif.



**Tujuan 6:
MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT
MENULAR LAINNYA**

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015

Tantangan utama yaitu pada dasarnya kegiatan pelayanan VCT di RSUD sudah berjalan dengan baik tetapi kendalanya RSUD belum diberikan wewenang untuk melakukan perawatan, dorongan dan pengobatan penduduk reaktif HIV/AIDS. Tantangan yang lain adalah sebagai berikut:

- a. Adanya klinik VCT di RSUD Pamekasan juga belum didukung adanya pemenuhan kebutuhan *Reagen* 1, 2, dan 3 serta belum disiapkannya obat – obatan ARV (Antiretroviral);
- b. Belum adanya anggaran APBD Kabupaten Pamekasan untuk pemenuhan Reagen 1, 2, 3 dan obat ARV.

Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010

Tantangan utama adalah Selain VCT di RSUD seharusnya semua Puskesmas juga diharapkan mampu mendirikan klinik VCT agar akses pelayanan HIV/AIDS dapat terlayani secara menyeluruh. Tantangan yang lain yaitu perlu adanya pelatihan petugas puskesmas dalam program HIV untuk

meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam rangka mendukung program HIV/AIDS

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015

Tantangan untuk mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015, yaitu Pamekasan tidak termasuk kasus endemis Malaria namun kegiatan pencarian dan penjarangan pada penduduk yang bekerja di daerah endemis Malaria selalu dilakukan melalui kegiatan *surveillance*.



Tujuan 7:

MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan

Tantangannya adalah kurangnya regulasi daerah untuk pelestarian lingkungan hidup. Peraturan-peraturan yang ada di pemerintahan daerah masih belum mencukupi untuk mengcover seluruh cakupan lingkungan hidup sehingga masih tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi seperti: Pergub, PP, UU sehingga aturan itu masih bersifat umum. Aturan yang masih belum ada diantaranya peraturan daerah mengenai limbah B3, Perda tentang rencana pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Sebagai ilustrasi belum adanya Perda dan Perbup yang mengatur BPO. Sebagian penjelasan, sebagian besar pengguna BPO di Kabupaten Pamekasan adalah skala rumah tangga sehingga sulit untuk diadakan penurunan penggunaannya, begitupula dengan pengganti BPO masih sedikit jumlahnya.

Tantangan lainnya yaitu, kepemilikan lahan untuk ditanami pepohonan, sebagian besar lahan milik masyarakat sehingga tidak serta merta dapat penghijauan karena masyarakat mempunyai peruntukan tersendiri.

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015

Tantangan utama :

- a. Kurangnya dukungan stakeholder dalam pelaksanaan program;
- b. Kurangnya dukungan dana dalam pemenuhan air minum dan sanitasi yang layak.

Tantangan yang lain :

- a. Kurang aktifnya kader kesehatan dalam melakukan promosi tentang air minum layak dan sanitasi layak;
- b. Kurangnya peran serta TOGA dan TOMA di tingkat desa.

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

Tantangan untuk Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 adalah rumah tidak layak huni masih banyak, program yang sedang diterapkan diarahkan pada penataan rumah layak huni dan sanitasi lingkungan perumahan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs

1. ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs)

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan kebijakan umum ditujukan untuk memperoleh gambaran keterkaitan antara bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran Millenium Development Goals (MDGs).

Arah kebijakan Kabupaten Pamekasan khusus terkait dengan MDGs adalah sebagai berikut:

- a. **Arah kebijakan Misi 1** (Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan) adalah sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan system pendidikan murah dalam rangka mewujudkan pemerataan dan mencerdaskan masyarakat;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan ;
 - Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan;
 - Meningkatkan kualitas SDM tenaga Pendidikan.

- b. **Arah kebijakan misi 2** (Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan):
 - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai;
 - Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;

- Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif);
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
 - Meningkatkan peran serta aktif masyarakat bidang kesehatan;
 - Mengembangkan RSUD melalui pola BLUD;
 - Memperkuat kelembagaan organisasi wanita;
 - Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak;
 - Memantapkan Program KB;
 - Meningkatkan Keluarga Sejahtera.
- c. Arah kebijakan misi 3 (Mempercepat pembangunan infrastruktur publik):
- Menyediakan system informasi/database infrastruktur;
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan konservasi sumber daya air;
 - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman perkotaan dan pedesaan;
 - Memenuhi fasilitas kelengkapan jalan;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum.
- d. Arah kebijakan misi 4 (Meningkatkan Pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan):
- Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pertanian;
 - Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - Mewujudkan dan mengembangkan agribisnis yang berdaya saing;
 - Menyediakan lumbung pangan menuju desa mandiri;
 - memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peningkatan dan peran serta masyarakat;
 - Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan menjaga kelestarian hutan rakyat;

- Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan;
- Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan dan pengusaha kecil dan mikro;
- Mengembangkan potensi pariwisata;
- Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kegiatan ekonomi dan meningkatkan keberpihakan;
- Mendorong profesionalitas kerja dan menciptakan hubungan industrial kerja yang harmonis;
- Menkuatkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM;
- Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;
- Meningkatkan fasilitasi manajemen dan pemasaran hasil produksi industri kecil, menengah dan kreatif;
- Mengembangkan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan;
- Mengadakan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang;
- Meningkatkan perlindungan konsumen;
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- Memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariannya;
- Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau;
- Meningkatkan kebersihan lingkungan;
- Mengurangi beban pencemaran lingkungan.

e. Arah kebijakan misi 5 (Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola pemerintahan yang baik [transparan dan akuntabel]):

- Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor;
- Meningkatkan koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Merumuskan kebijakan inovasi (*road map, grand design, dan action plan*) berskala Kabupaten;

- Melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan, perekayasa, dan pengoperasian dalam rangka penguatan SIDa (sistem inovasi daerah);
 - Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang professional dan kompeten;
 - meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana;
 - Meningkatkan sarana prasarna penanggulangan bencana;
 - Memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan.
- f. Arah kebijakan misi 6 (Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah):
- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yg efektif dan efisien.

2. STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs)

Kebijakan umum yang akan ditempuh melalui beberapa strategi sebagai berikut :

1. Strategi Pemerataan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat, tidak diskriminatif dengan biaya murah (gratis), yang didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain :

- 1) Menyelenggarakan sistem pendidikan murah dalam rangka mewujudkan pemerataan dan mencerdaskan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program:
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
 - c. Program pendidikan menengah.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
 Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain:

- a. Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun;
 - b. Program pendidikan menengah.
2. Strategi Peningkatan kualitas hasil pendidikan yang didukung dengan kompetensi tenaga pendidikan yang memadai. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan.
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM tenaga Pendidikan.
3. Strategi meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan peran serta masyarakat. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya.
 - 2) Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain:
 - a. Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan;
 - b. Pengembangan dan pengawasan obat dan makanan.
 - 3) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif). Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program:
 - a. Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya;
 - b. Peningkatan layanan kesehatan;
 - c. peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
 - 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program upaya kesehatan masyarakat.
4. Strategi optimalisasi sumber daya dalam rangka mewujudkan pola hidup bersih dan sehat. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni meningkatkan peran serta aktif masyarakat bidang

kesehatan, dengan programnya yakni program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Strategi Pengembangan RSUD, melalui dukungan kecukupan tenaga medis dan peramedis serta sarana dan prasarana rumah sakit secara memadai. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni pengembangan RSUD melalui pola BLUD. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pengadaan dan peningkatan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mata/rumah sakit paru-paru.
6. Strategi Peningkatan iklim kondusif bagi pengembangan keberdayaan perempuan dan anak melalui kemandirian berusaha dan ketahanan keluarga. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain :
 - 1) Penguatan kelembagaan organisasi wanita. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
 - 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Strategi Pemantapan kapasitas pelayanan KB di klinik KB Pemerintah dan swasta melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB
Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain :
 - 1) Pemantapan Program KB. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program Keluarga Berencana
 - 2) Meningkatkan Keluarga Sejahtera. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain:
 - a. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
 - b. Program Promosi kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat.
8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur irigasi dan penanggulangan banjir
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman
10. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

11. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman perkotaan dan pedesaan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program lingkungan sehat perumahan.
12. Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian
13. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pertanian. Dengan indikator keberhasilan yaitu, produksi tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan produksi pertanian /perkebunan
14. Optimalisasi Pembinaan Kelompok Tani
15. Optimalisasi promosi produk unggulan daerah baik di tingkat propinsi maupun nasional
16. Optimalisasi Sumber Daya ketahanan pangan daerah. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain :
 - 1) Penyediaan lumbung pangan menuju desa mandiri
Dengan indikator keberhasilan yaitu, lumbung pangan desa. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni peningkatan ketahanan pangan.
 - 2) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peningkatan dan peran serta masyarakat
17. Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Kehutanan dan Perkebunan. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan menjaga kelestarian hutan rakyat. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain:
 - a. Pemanfaatan Potensi sumber daya hutan;
 - b. Rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan dan kesejahteraan petani.
18. Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Perikanan
Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain :
 - 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan.

- 2) Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan dan pengusaha kecil dan mikro.
19. Promosi dan Eksplorasi sektor pariwisata
 20. Sinergitas antar wilayah untuk mendukung pengentasan kemiskinan
 Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni meningkatkan akses masyarakat miskin pada kegiatan ekonomi dan meningkatkan keberpihakan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain:
 - a. Pengembangan industri kecil dan menengah;
 - b. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
 - c. Peningkatan kesejahteraan petani;
 - d. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKAS lainnya. Layanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan anak terlantar, pembinaan lingkungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga.
 21. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja
 Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni mendorong profesionalitas kerja dan menciptakan hubungan industrial kerja yang harmonis. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga kerja.
 - b. Peningkatan kesempatan kerja, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan.
 22. Meningkatkan akses dan iklim usaha UMKM dan koperasi sejalan dengan pengembangan dunia usaha. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pengembangan kewirausahaan kompetitif usaha kecil dan menengah.
 23. Mengoptimalkan kapasitas industri yang ada dan mengembangkan potensi baru. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain :
 - 1) Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif

- 2) Meningkatkan fasilitasi manajemen dan pemasaran hasil produksi industri kecil, menengah dan kreatif.
24. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar daerah
25. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pelaku usaha ekonomi baru
26. Strategi Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kaidah-kaidah Lingkungan. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain :
 - 1) Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
Dengan indikator keberhasilan yaitu, pemenuhan baku mutu air. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
 - 2) Memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariannya
 - 3) Meningkatkan pengelolaan dan ketersediaan ruang terbuka hijau
 - 4) Meningkatkan Kebersihan Lingkungan
 - 5) Mengurangi Beban Pencemaran Lingkungan
27. Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu
28. Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
29. Pengelolaan layanan administrasi secara efektif dan efisien berbasis budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas
30. Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana
31. Peningkatan peran serta generasi muda
32. Peningkatan akses dan kapasitas masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah

3. TARGET KINERJA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGS) KABUPATEN PAMEKASAN



Tujuan 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Ringkasan Target Kinerja pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Target Kinerja Pencapaian Tujuan ke-1 MDGs di Pamekasan

Indikator	Capaian	Target					Sumber Data	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN								
Target 1 A : menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari \$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015								
1,1	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari	11,88% (2012)	52.947 orang	11,88%	67.945 orang	-	-	BPS
1,2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,24% (2012)	-	2,24%	-	-	-	BPS
Target 1 b : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua , termasuk perempuan dan kaum muda								
1,3	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	-1,98% (2012)	-	-1,98%	-	-	-	BPS
1,4	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	76,40% (2013)	-	76,40%	-	80,20	82 %	BPS
1,5	Proporsi tenaga kerja ydiriang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga sen	49,81 (2012)	-	49,81	-	50,11	52,20	BPS
Target 1 c : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015								
1,6	Prevalensi balita dengan berat badan rendah /kekurangan gizi							
	▪ Prevalensi balita gizi buruk	1,15%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	Dinkes
	▪ Prevalensi balita gizi kurang	11,14%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	Dinkes
1,7	Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum							
	• 1.400 Kkal/kapita/hari	-	-	-	-	-	-	
	• 2.000 Kkal/kapita/hari	-	-	-	-	-	-	



**Tujuan 2:
MENCAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA**

Ringkasan Target Kinerja pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-2 Mencapai Pendidikan Untuk Semua, dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2.
Target Kinerja Pencapaian Tujuan ke-1 MDGs di Pamekasan**

Indikator	Capaian	Target					Sumber Data	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 2. MENCAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA								
Target 2A : Menjamin pada tahun 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar								
2,1	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	97% (2012)	111%	97% (2012)	97%	108%	110%	Disdik
2,2	Proporsi murid kelas 1 yg berhasil menamatkan sekolah dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdik
2,3	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	74% (2012)		74% (2012)			80%	Disdik



**Tujuan 3:
MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Ringkasan Target Kinerja pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-3 Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Target Kinerja Pencapaian Tujuan ke-3 MDGs di Pamekasan

Indikator	Capaian	Target					Sumber Data	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 3. MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
<i>Target 3A : Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan disemua jenjang pendidikan tidak lebih pada tahun 2015</i>								
3,1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar , menengah dan atas							
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	97,5%	96%	98%	99%	100%	100%	BPPKB
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	86%	85%	89%	90%	92%	95%	BPPKB
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	80%	75%	85%	88%	90%	93%	BPPKB
	Rasio APM perempuan/laki-laki di PT							
3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	62% (2012)		62%	65%	67%	70%	BPPKB
3,2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pemerintahan	27,3%		27,3%	28,0%	28,8%	29,6%	BPPKB
3,3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	4,4 %	4%	5%	6%	7%	8%	BPPKB



4

**Tujuan 4:
MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK**

Ringkasan Target Kinerja pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-4 Menurunkan Angka Kematian Anak, dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Target Kinerja Pencapaian Tujuan ke-4 MDGs di Pamekasan

Indikator	Capaian	Target					Sumber Data	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 4. MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK								
Target 4A: Menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua pertiga dalam kurun waktu 1990-2015								
4,1	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	0,52/1000	0,56/1000	0,54/1000	0,52/1000	0,50/1000	0,48/1000	DINKES
4,2	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	5,2/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH	DINKES, BPPKB
		70	75	70	65	60	60	
4,3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	93,11%	90%	93%	97%	97%	98%	DINKES



Tujuan 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Ringkasan Target Kinerja pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-5 Meningkatkan Kesehatan Ibu, dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Target Kinerja Pencapaian Tujuan ke-5 MDGs di Pamekasan

Indikator	Capaian	Target					Sumber Data	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 5. MENINGKATKAN KESEHATAN IBU								
Target 5A: Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015								
5.1	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	98,14	102 per 100.000 KH	102 per 100.000 KH	102 per 100.000 KH	102 per 100.000 KH	102 per 100.000 KH	DINKES
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong oleh petugas kesehatan	88,50	86	88	89	90	95	DINKES
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan produksi bagi semua tahun 2015								
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 semua cara	60,87%	70%	70%	70%	65%	65%	DINKES, BPPKB
		122791	97432	105545	92640	121538	123367	
5.4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	39128	38243	38685	39128	38600	38000	DINKES
Cakupan pelayanan kitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan antenatal (sedi)								
5.5	• 1 kunjungan	96,33	96	96	100	100	100	DINKES
	• 4 kunjungan	87,92	91	92	93	94	95	
5.6	Unmet need (kebutuhan keluarga berencana / KB yang tidak terpenuhi)	28.276	21.341	23.211	23.675	24.150	28.317	BPPKB



**Tujuan 6:
MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT
MENULAR LAINNYA**

Ringkasan Target Kinerja pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-6 Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.

Target Kinerja Pencapaian Tujuan ke-6 MDGs di Pamekasan

Indikator	Capaian	Target					Sumber Data	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 6. MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA								
Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015								
6,1	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	62	18	17	27	-	-	Dinkes, RSUD
6,2	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir							
	• Perempuan	-	-	-	-	-	-	Dinkes
	• Laki-laki	-	-	-	-	-	-	Dinkes
6,3	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS							
	• Perempuan menikah	-	-	-	-	-	-	Dinkes
	• Laki-laki menikah	-	-	-	-	-	-	Dinkes
	• Perempuan belum menikah	4720	75%	80%	85%	90%	-	Dinkes
	• Laki-laki belum menikah	7105	75%	80%	85%	90%	-	Dinkes
Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010								
6,4	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	-	-	-	-	-	-	
Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015								
6,6	Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria							
	• penduduk) angka kejadian malaria (per 1.000	0	0	0	0	0	0	Dinkes

	• Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	Dinkes
6,7	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	-	-	-	-	-	-	
6,8	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	-	-	-	-	-	-	
6,9	Angka kejadian,prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberkolosa							
	• Angka kejadian tuberkolosa (per 100.000 penduduk/tahun)	107	124	115	115	115	115	Dinkes
	• Tingkat prevalensi tuberkolosis (per 100.000 penduduk/tahun)	139	137	127	139	139	139	Dinkes
	• Tingkat kematian karena tuberkolosa (per 100.000 penduduk/tahun)	< 5%	2%	4%	1%	1%	1%	Dinkes
6,10	Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS							
	• Proporsi jum tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
	• Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dalam program DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes



Tujuan 7:

MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan Target Kinerja pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-7 Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Target Kinerja Pencapaian Tujuan ke-7 MDGs di Pamekasan

Indikator	Capaian	Target					SKPD MENDUKUNG	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 7. MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP								
Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang								
7,1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara thd luas daratan	11,14%	11,27%	11,33%	11,39%	11,49%	11,61%	Dishutbun
7,2	Jumlah emisi karbon dioksida (CO ₂)							
	▪ Jumlah konsumsi energi primer (per kapita)	-	-	-	-	-	-	
	▪ Intensitas energi	-	-	-	-	-	-	
	▪ Elastisitas energi	-	-	-	-	-	-	
	▪ Besaran energi untuk energi terbarukan	-	-	-	-	-	-	
7,3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metric ton	-	-	-	-	-	-	
7,4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	-	-	-	-	-	-	
7,5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian hayati thd total luas kawasan hutan	3,24%	3,24%	3,20%	3,18%	3,14%	3,11%	Dishutbun
7,6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	-	-	-	-	-	-	

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan thd air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015								
7,7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan							
	•Perkotaan	25,79%	62,5%	63%	63,5%	67%		Dinkes
	•Perdesaan	43,84%						Dinkes
7,8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan							
	• Perkotaan	76,84%	67%	69%	72%	75%		Dinkes
	• Perdesaan	48,68%						Dinkes
Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020								
7,9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	-	-	-	-	-	-	

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah tidak terlepas dari tahapan atau proses pembangunan. Diawali dengan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan secara riil untuk kepentingan masyarakat luas. Namun proses dimaksud tidak terhenti sampai hal tersebut saja ada tahapan berikutnya yakni proses control, baik dari internal lembaga maupun lembaga-lembaga eksternal termasuk dari elemen masyarakat salah satunya antara lain dari kalangan lembaga swadaya masyarakat.

Ketika pelaksanaan kegiatan pembangunan telah berjalan, maka tahapan monitoring/pemantauan dan evaluasi harus dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan. Namun ketika kegiatan pembangunan itu usai dilaksanakan, maka pertanyaan yang muncul antara lain: apakah pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, memenuhi target rencana atau melebihinya atau tidak mencapai target. Bahkan pertanyaan-pertanyaan lainnya juga tambah meluas, seperti : tingkat kesesuaian antara rencana dan realisasi, tingkat kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat banyak, dan pertanyaan lainnya. Untuk itu maka pelaksanaan monitoring/pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan menjadi sesuatu yang wajar dan bahkan menjadi suatu keharusan untuk dilakukan, sebagai sarana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti di atas. Hal itu harus dimaknai sebagai sebuah konsekuensi dari proses pembangunan yang dijalankan.

Pelaksanaan monitoring /pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan. Pemantauan dari evaluasi bukan sesuatu kegiatan untuk mencari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari rencana/standard yang telah ditentukan sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana atau mencapai target.

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Internal

Tujuan monitoring dan evaluasi internal adalah :

1. Memberikan masukan terhadap pelaksana untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan;
2. Menyediakan sumber informasi tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs);
3. Sebagai salah satu dasar pembuatan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
4. Menjamin bahwa kesesuaian / kepatutan terhadap prosedur senantiasa dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi adalah mencakup kemajuan fisik, keuangan dan program yang tercantum dalam RAD MDGs.

Strategi Pemantauan dan evaluasi

Strategi pemantauan dan evaluasi internal adalah beberapa konsep dalam pedoman ini yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Dampak : perubahan jangka panjang yang dicapai dari program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui serangkaian efek-efek hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Hasil : setelah kegiatan berakhir terjadi perubahan-perubahan tertentu atau efek-efek tertentu yang diharapkan.
3. Indikator kinerja : entitas kualitas atau kuantitas atas program/kegiatan.
4. Kegiatan : sebuah intervensi yang dilakukan SKPD pelaksana yang secara langsung bertanggung jawab melaksanakan.
5. Komponen biaya : sumber daya yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan dan tugas tugas untuk menghasilkan capaian dari suatu kegiatan.
6. Proses : tahapan kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan.

Prinsip pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang mencakup seluruh objek yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi;
2. Pelaksanaan dilakukan secara obyektif;
3. Dilakukan oleh petugas dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya optimal;
4. Pelaksanaan dilakukan secara terbuka;
5. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
6. Pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
7. Mencakup seluruh obyek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi;
8. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;
9. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
10. Berbasis indikator kinerja yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan tujuan pembangunan millenium (MDGs);
11. Efektif dan efisien.

Sistematika pemantauan dan evaluasi

Pada tahap awal pemantauan dan evaluasi, tim pemantauan dan evaluasi perlu mencari data-data terkait dengan indikator kinerja MDG's. Hal ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pengamatan langsung, wawancara dan laporan tertulis. Setelah diperoleh data yang diinginkan, tim pemantauan dan evaluasi kemudian membandingkan hasil dengan standar yang telah ditentukan berikut menyusun laporan pemantauan.

Tim pelaksana

Tim pemantauan dan evaluasi ditunjuk oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati, artinya hanya terdapat satu tim pemantauan dan evaluasi terpadu yang mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi di Kabupaten Pamekasan. Secara prinsip tim pemantauan dan evaluasi harus bebas dari kepentingan dan memiliki sikap jujur, egaliter dan tidak mencari-cari kesalahan.

Jika keadaan mengharuskan tim pemantauan dan evaluasi dapat ditunjuk dari luar lingkungan pemerintahan atau gabungan baik dari dalam maupun luar lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Tim pemantauan dan evaluasi dipilih berdasarkan kemampuan, ketrampilan dan pengalaman mereka dalam kegiatan pemantauan sesuai dengan keahliannya, tim pemantauan dan evaluasi bertanggung jawab kepada Bupati.

Metode pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan rutin, dapat dilakukan secara berjenjang, terstruktur dan terjadwal yang dilakukan oleh tim khusus. Pemantauan dan evaluasi internal dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif berbasis program dan kegiatan untuk menilai prestasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Indikator utama yang diukur di sini adalah indikator yang berkenaan dengan MDGs.

Agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, maka setiap SKPD hendaknya menyiapkan beberapa kelengkapan yaitu evaluasi dari SKPD, rencana strategis (Renstra), rencana program, kegiatan dan anggaran penyelenggaraan, serta melaporkan hasil kegiatan selama periode tertentu. Setiap unit diwajibkan melaporkan kegiatannya setiap triwulan. Untuk kegiatan fisik dapat mengacu kepada "Pedoman Pengukuran Realisasi Fisik Kegiatan Untuk Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan". Data dan informasi tersebut di atas akan dijadikan pedoman SKPD terkait dalam menjalankan tugasnya.

Waktu pelaksanaan dan Hasil pemantauan dan Evaluasi

Waktu pemantauan dan evaluasi dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun dibagi dalam dua rentang waktu yakni di pertengahan dan akhir pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal kunjungan masing-masing SKPD.

1. Pemanatauan dan evaluasi awal pelaksanaan program.
 - a) Mengkonfirmasi kondisi yang tertulis didalam RAD MDGs dengan kondisi riil di lapangan;
 - b) Penentuan dan kesepakatan indikator kinerja pelaksanaan RAD MDGs;
 - c) Memberikan alternatif pemecahan masalah tentang:
 - Strategi pencapaian tujuan;
 - Kemungkinan keberhasilan yang dapat diraih,serta;
 - Kendala yang akan datang.
 - d) Memberikan penjelasan pada pihak terkait mengenai mekanisme kerja implementasi RAD MDGs.
2. Pemantauan dan evaluasi awal pertengahan pelaksanaan program.
 - a) melihat dampak dari pelaksanaan RAD MDGs pada pertengahan implementasi melalui :
 - SKPD terkait;
 - Stakeholders.
 - b) melihat arah pengembangan pelaksanaan RAD MDGs apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai;
 - c) menggali kemungkinan keberlangsungan hasil pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai;
3. Pemantauan dan evaluasi akhir pelaksanaan program
 - a) melihat dampak pelaksanaan RAD MDGs pada akhir implementasi melalui :
 - SKPD terkait;
 - Stakeholders.
 - b) melihat arah pengembangan selanjutnya di SKPD terkait;
 - c) menggali informasi pada:
 - indikator capaian;
 - kendala dan masalah serta solusinya.

- d) melihat usaha-usaha dalam rangka menjaga keberlangsungan hasil pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai oleh SKPD terkait.
4. Pemantauan dan evaluasi selama 3 tahun
- Setelah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap 6 bulan dan 1 tahun, maka pada tahun ke 3 yaitu tahun 2015, pemantauan dan evaluasi akhir akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan biaya dari Bappeda Kabupaten Pamekasan. Pemantauan dan evaluasi akhir ini merupakan laporan hasil secara keseluruhan dari kinerja semua SKPD yang terkait, dalam target-target pembangunan millenium.

Biaya pemantauan dan evaluasi

Biaya pemantauan dan evaluasi akan dialokasikan pada SKPD penanggungjawab masing-masing kelompok kerja MDGs (Pokja 1-4). Sedangkan untuk SKPD yang terkait secara langsung dengan MDGs, dapat mengalokasikan dana untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi MDGs secara internal.

Instrumen pemantauan dan evaluasi

Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik maka tim pemantauan dan evaluasi dilengkapi dengan alat-alat pemantauan dan evaluasi antara lain sebagai berikut :

- a. Matrik pemantauan dan evaluasi perkembangan / kemajuan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi perkembangan menunjukkan indikator yang dibuat. Indikator itu digunakan untuk mengukur perkembangan proses dan sistem yang direncanakan oleh SKPD. Pelaporan pada indikator ini membutuhkan analisis pengumpulan data dan informasi secara periodik. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi lebih ditekankan kepada kendala-kendala apa yang terjadi di setiap SKPD, dan apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut; juga apakah cara yang digunakan tepat untuk mengatasi hambatan tersebut baik ditinjau dari segi aturan yang berlaku maupun hal-hal lain yang mungkin di setiap SKPD akan bervariasi. Tim pemantauan dan evaluasi diwajibkan memberikan saran perbaikan agar pelaksanaan kegiatan di SKPD tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga

- terdapat kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dan pencapaian tujuan kegiatan tersebut.
- b. Selain matriks, tim pemantauan dan evaluasi juga dilengkapi dengan alat pemantauan lain berupa daftar pertanyaan yang wajib diisi oleh setiap SKPD yang dipantau
 - c. Tim pemantauan dan evaluasi dalam melaksanakan tugasnya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Mengidentifikasi kegiatan pengembangan kapasitas pada tahun berjalan;
 - (2) Mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan serta memberikan saran untuk perbaikannya;
 - (3) Mengidentifikasi perubahan prestasi SKPD yang dipantau;
 - (4) Mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan;
 - (5) Mengidentifikasi tindakan yang dibutuhkan oleh SKPD tersebut guna perbaikan dalam pelaksanaannya;
 - (6) Menilai dan melihat secara langsung dampak dari pelaksanaan kegiatan di SKPD tersebut;
 - (7) Melihat arah perkembangan SKPD tersebut selanjutnya;
 - (8) Melihat usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka menjaga keberlangsungan hasil kegiatan tersebut;
 - (9) Menilai capaian, kendala dan masalah yang dihadapi serta solusinya.
 - d. Mekanisme/prosedur pemantauan dan evaluasi kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan wawancara dengan responden kunci seperti pejabat, penanggung jawab program dan kegiatan, stakeholders dan responden kunci lainnya, mengevaluasi dokumen tertulis, meninjau lapangan dan bentuk lainnya jika diperlukan. Sebelum pelaksanaan pemantauan, tim pemantauan dan evaluasi membuat jadwal kegiatan yang disebarkan kepada seluruh SKPD yang akan dipantau, sehingga SKPD-SKPD tersebut siap dipantau. Setelah kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan maka tim pemantauan dan evaluasi wajib membuat hasil pemantauan, agar terdapat keselarasan setelah pemantauan dan evaluasi selesai tim pemantauan dan evaluasi membuat matrik tentang temuan-temuan di lapangan, saran perbaikan, kesanggupan SKPD untuk menindaklanjuti temuan dan saran

tersebut. Hasil pemantauan dan evaluasi ini kemudian didiskusikan dengan SKPD yang dipantau dan ditandatangani bersama.

Langkah berikutnya, tim pemantauan dan evaluasi membuat laporan hasil pemantauan tersebut dengan sistematika sebagai berikut :

1. Abstrak;
 2. Pendahuluan;
 3. Tujuan;
 4. Metode pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 5. Hasil dan pembahasan pemantauan dan evaluasi;
 6. Kesimpulan dan saran.
- e. Alat ukur lain (matriks, daftar pertanyaan dll) jika diperlukan dapat dibuat oleh tim pemantauan dan evaluasi

Tim pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat melakukan tugasnya secara cermat dalam mencapai tujuan pemantauan. Apabila dalam melaksanakan pemantauan ditemukan hal-hal penting dan relevan yang tidak termasuk dalam pedoman ini, para pelaksana pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat memberikan catatan tambahan pada laporan hasil pemantauan. Diharapkan pula agar dalam laporan hasil pemantauan. Diharapkan pula agar dalam laporan pemantauan disertakan saran-saran atau rekomendasi yang relevan yang diangkat dari hasil pemantauan dan evaluasi ini.

Adapun indikator kinerja upaya pencapaian target MDGs merupakan indikator proses dari setiap langkah program percepatan pencapaian target MDGs secara lintas sektor yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD di Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi dan sinergi untuk mencapai sasaran pokok.



Tujuan 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Ringkasan indikator Kinerja upaya percepatan pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Status Pencapaian Tujuan ke-1 MDGs di Kabupaten Pamekasan

Indikator	Capaian	Target					SKPD MENDUKUNG	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN								
Target 1 A : menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari \$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015								
1.1	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari	11,88% (2012)	52.947 orang	11,88%	67.945 orang	11 %	9,15 %	Bappeda, Disnak, Peternakan, Bapemas Pemdes, Disperta, Disnkanla, Dinsosnakertans, KKP, Dishutbun, Dishub, PU Pengairan, Disperindag, Diskop & UKM, PU Binamarga
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,24% (2012)	-	2,24%	-	2,0 %	1,80 %	Bappeda, Disnak, Peternakan, Bapemas Pemdes, Disperta, Disnkanla, Dinsosnakertans, KKP, Dishutbun, Dishub, Disperindag, Diskop & UKM, PU Binamarga
Target 1 b : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua , termasuk perempuan dan kaum muda								
1.3	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	-1,98% (2012)	-	-1,98%	-	-	-	Bappeda, BPS, Dinsosnakertans, KKP, Dishutbun, Disperindag, Diskop & UKM
1.4	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	76,40% (2013)	-	76,40%	79,0%	81,20 %	84,30 %	Bappeda, BPS, Dinsosnakertans
1.5	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga sen	49,81 (2012)	-	49,81	-	-	55,15 %	Bappeda, BPS, Dinsosnakertans
Target 1 c : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015								
1.6	Prevalensi balita dengan berat badan rendah /kekurangan gizi							
	▪ Prevalensi balita gizi buruk	1,15%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	Dinkes, Bapemas Pemdes, BPPKB, PKK, Bappeda

	▪ Prevalensi balita gizi kurang	11,14%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	Dinkes, Bapemas Pemdes, BPPKB, PKK, Bappeda
1,7	Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum							
	• 1.400 Kkal/kapita/hari	-	-	-	-	-	-	Dinkes, Bapemas Pemdes, BPPKB, PKK, Bappeda
	• 2.000 Kkal/kapita/hari	-	-	-	-	-	-	Dinkes, Bapemas Pemdes, BPPKB, PKK, Bappeda



Tujuan 2: MENCAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

Ringkasan indikator Kinerja upaya percepatan Ringkasan indikator Kinerja upaya percepatan pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-2 Mencapai Pendidikan Untuk Semua, dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Status Pencapaian Tujuan ke-1 MDGs di Pamekasan

Indikator	Capaian	Target					SKPD MENEDUKUNG	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 2. MENCAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA								
Target 2A : Menjamin pada tahun 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar								
2,1	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	97% (2012)	111%	97% (2012)	97%	108%	110%	Disdik, Bappeda
2,2	Proporsi murid kelas 1 yg berhasil menamatkan sekolah dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdik, Bappeda
2,3	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	74% (2012)		74% (2012)			80%	Disdik, Bappeda



**Tujuan 3:
MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Ringkasan indikator Kinerja upaya percepatan pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-3 Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dapat dilihat pada tabel 3.3.

**Tabel 3.3.
Status Pencapaian Tujuan ke-3 MDGs di Pamekasan**

Indikator	Capaian	Target					SKPD MENDUKUNG	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 3. MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
<i>Target3A : Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan disemua jenjang pendidikan tidak lebih pada tahun 2015</i>								
3,1	Rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar , menengah dan atas							
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	97,5%	96%	98%	99%	100%	100%	BPPKB, Disdik
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	86%	85%	89%	90%	92%	95%	BPPKB, Disdik
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	80%	75%	85%	88%	90%	93%	BPPKB, Disdik
	Rasio APM perempuan/laki-laki di PT							
3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	62% (2012)		62%	65%	67%	70%	BPPKB, Disdik
3,2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pemerintahan	27,3%		27,3%	28,0%	28,8%	29,6%	BPPKB, Dinsosnakertan, Bappeda
3,3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	4,4 %	4%	5%	6%	7%	8%	BPPKB, Bakesbangpoi



4

**Tujuan 4:
MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK**

Ringkasan indikator Kinerja upaya percepatan pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-4 Menurunkan Angka Kematian Anak, dapat dilihat pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4.
Status Pencapaian Tujuan ke-4 MDGs di Pamekasan**

Indikator	Capaian	Target					SKPD MENDUKUNG	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 4. MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK								
Target 4A: Menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua pertiga dalam kurun waktu 1990-2015								
4,1	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	0,52/1000	0,56/1000	0,54/1000	0,52/1000	0,50/1000	0,48/1000	DINKES, Bappeda RSUD
4,2	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	5,2/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH	DINKES, Bappeda RSUD, BPPKB
		70	75	70	65	60	60	
4,3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	93,11%	90%	93%	97%	97%	98%	DINKES, Bappeda



Tujuan 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Ringkasan indikator Kinerja upaya percepatan pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-5 Meningkatkan Kesehatan Ibu, dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Target Kinerja Pencapaian Tujuan ke-5 MDGs di Pamekasan

Indikator	Capaian	Target					SKPD MENDUKUNG	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 5. MENINGKATKAN KESEHATAN IBU								
Target 5A: Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015								
5,1	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	98,14	102 per 100.000 KH	102 per 100.000 KH	102 per 100.000 KH	102 per 100.000 KH	DINKES, RSUD, Bappeda BPPKB	
5,2	Proporsi kelahiran yang ditolong oleh petugas kesehatan	88,50	86	88	89	90	95	DINKES, Bappeda BLUD, BPPKB
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan produksi bagi semua tahun 2015								
5,3	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 semua cara	60,87%	70%	70%	70%	65%	65%	DINKES, BLUD, BPPKB, Bappeda
		122791	97432	105545	92640	121538	123367	
5,4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	39128	38243	38685	39128	38600	38000	DINKES, BLUD, Bappeda BPPKB
Cakupan pelayanan antenatal (sedi kitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan								
5,5	• 1 kunjungan	96,33	96	96	100	100	100	DINKES, BPPKB
	• 4 kunjungan	87,92	91	92	93	94	95	
5,6	Unmet need (kebutuhan keluarga berencana / KB yang tidak terpenuhi	28276	21341	23211	23675	24150	28317	DINKES, BPPKB



**Tujuan 6:
MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT
MENULAR LAINNYA**

Ringkasan indikator Kinerja upaya percepatan pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-6 Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, dapat dilihat pada tabel 3.6.

**Tabel 3.6.
Status Pencapaian Tujuan ke-6 MDGs di Pamekasan**

Indikator	Capaian	Target					SKPD MENDUKUNG	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 6. MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA								
Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015								
6,1	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	62	18	17	27	-	14	Dinkes, Bappeda, BLUD
6,2	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir							
	• Perempuan	-	-	-	-	-	-	
	• Laki-laki	-	-	-	-	-	-	
6,3	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS							Dinkes, BLUD, Disdik, BPS, Bappeda
	• Perempuan menikah	-	-	-	-	-	-	
	• Laki-laki menikah	-	-	-	-	-	-	
	• Perempuan belum menikah	4720	75%	80%	85%	90%	92 %	
	• Laki-laki belum menikah	7105	75%	80%	85%	90%	95 %	
Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010								
6,4	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	-	-	-	-	-	-	Dinkes, BLUD, Disdik, BPS, Bappeda
Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015								
6,6	Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria							Dinkes, BLUD, Disdik, BPS, Bappeda
	• penduduk) angka kejadian malaria (per 1.000	0	0	0	0	0	0	

	• Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	
6,7	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	-	-	-	-	-	-	
6,8	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	-	-	-	-	-	-	
6,9	Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberkolosa							Dinkes, BLUD, Disdik, BPS, Bappeda
	• Angka kejadian tuberkolosa (per 100.000 penduduk/tahun)	107	124	115	115	115	115	
	• Tingkat prevalensi tuberkolosis (per 100.000 penduduk/tahun)	139	137	127	139	139	139	
	• Tingkat kematian karena tuberkolosa (per 100.000 penduduk/tahun)	< 5%	2%	4%	1%	1%	1%	
6,10	Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS							Dinkes, BLUD, Disdik, BPS, Bappeda
	• Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	• Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dalam program DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

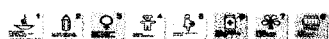


Tujuan 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan indikator Kinerja upaya percepatan pencapaian MDGs untuk Tujuan ke-7 Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Status Pencapaian Tujuan ke-7 MDGs di Pamekasan

Indikator	Capaian	Target					SKPD MENDUKUNG	
		2011	2012	2013	2014	2015		
TUJUAN 7. MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP								
Target 7A: Memadukan prinsip prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang								
7,1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara thd luas daratan	11,14%	11,27%	11,33%	11,39%	11,49%	11,61%	Dishutbun, BLH, Bappeda
7,2	Jumlah emisi karbon dioksida (CO ₂)							
	▪ Jumlah konsumsi energi primer (per kapita)	-	-	-	-	-	-	
	▪ Intensitas energi	-	-	-	-	-	-	
	▪ Elastisitas energi	-	-	-	-	-	-	
	▪ Besaran energi untuk energi terbarukan	-	-	-	-	-	-	
7,3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metric ton	-	-	-	-	-	-	
7,4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	-	-	-	-	-	-	
7,5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian hayati thd total luas kawasan hutan	3,24%	3,24%	3,20%	3,18%	3,14%	3,11%	Dishutbun, BLH, Bappeda
7,6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	-	-	-	-	-	-	Diskanla, Bappeda, BLH
Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan thd air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015								
7,7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan							PU Cipta Karya, BLH, Dinkes, Bappeda, PU Pengairan
	•Perkotaan	25,79%	62,5%	63%	63,5%	67%	70 %	
	•Perdesaan	43,84%						



7,8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan							PU Cipta Karya, BLH, Dinkes, Bappeda, PU Pengairan
	• Perkotaan	76,84%						
	• Perdesaan	48,68%	67%	69%	72%	75%	78 %	
Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020								
7,9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	-	-	-	-	-	-	

Indikator dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kemajuan, keseluruhan kinerja dan dampak program percepatan pencapaian target MDGs. Indikator merupakan kunci sistem pemantauan dan evaluasi sehingga indikator-indikator kinerja yang ada harus dapat diverifikasi secara obyektif. Indikator pencapaian hasil menentukan :

- a) Apakah kegiatan dan masukkan program percepatan pencapaian target MDGs menghasilkan keluaran/output yang diharapkan;
- b) Apakah keluaran atau hasil program percepatan pencapaian target MDGs mencapai maksud/manfaat program;
- c) Apakah maksud/manfaat program ini memberikan sumbangan kepada tujuan keseluruhan program percepatan pencapaian target MDGs

Langkah dan tindak lanjut

Hasil dari pemantauan dan evaluasi dimaksud akan dijadikan dasar untuk perencanaan pembangunan selanjutnya yang tertuang didalam RPJMD dan kemudian dijabarkan dalam perencanaan tahunan RKPd.

BAGAN PEMANTAUAN & EVALUASI

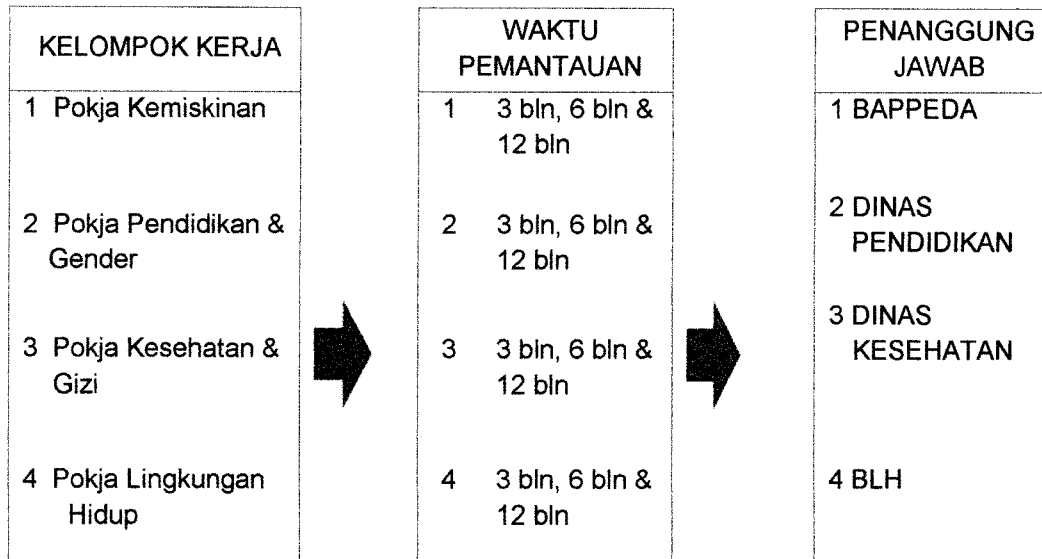
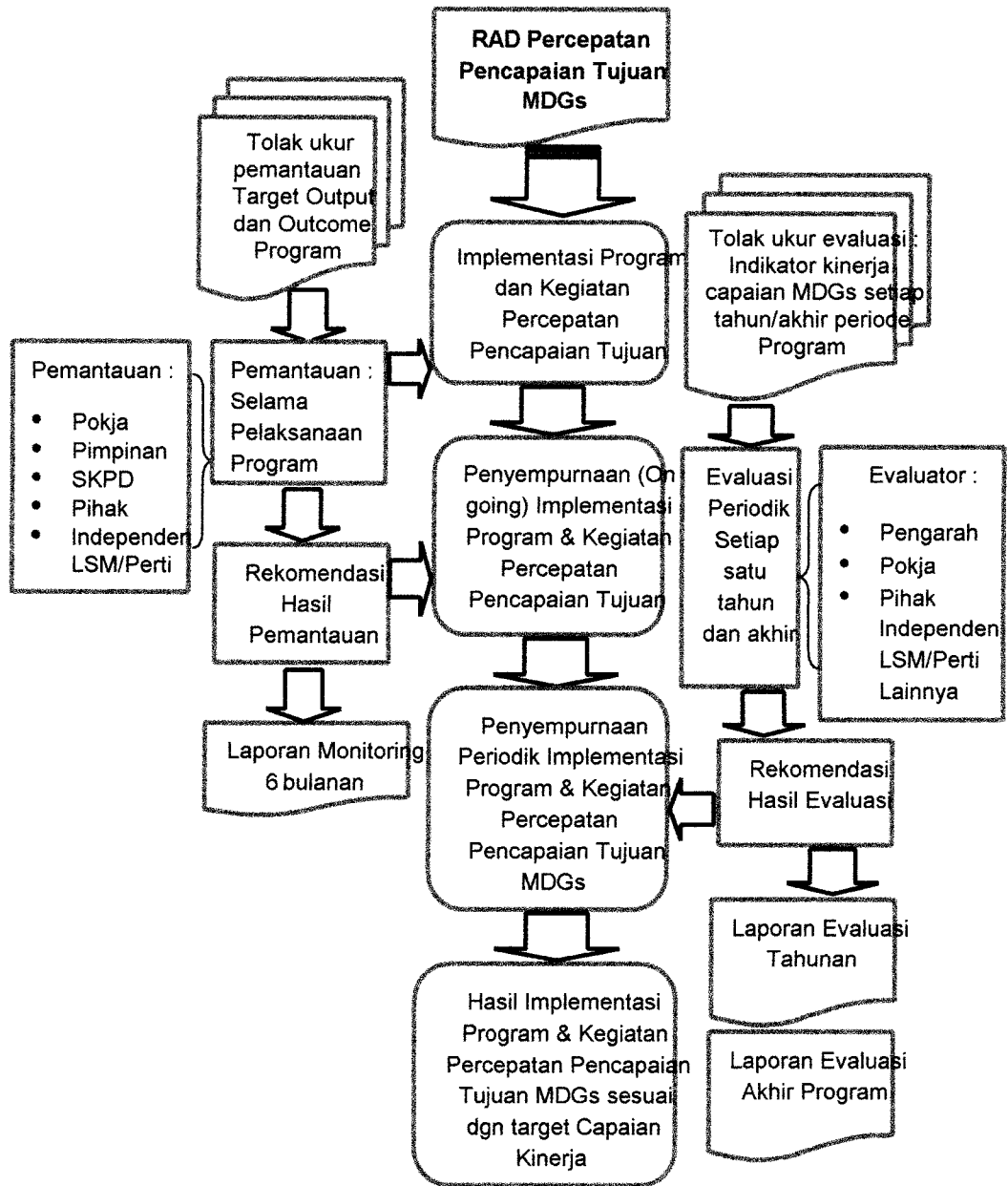
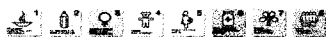


Diagram Mekanisme Pemantauan & Evaluasi Implementasi RAD Percepatan



LAMPIRAN

Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs (RAD MDGs) Kabupaten Pamekasan



**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PAMEKASAN**

Tujuan 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN (dalam jutaan)			SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	Ket
				2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari dalam kurun waktu 1990 - 2015												
Indikator MDGs :		1. Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari 2. Rasio kesenjangan kemiskinan 3. Proporsi kuintil termiskin dalam konsumsi nasional										
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani												
	1. Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Pengadaan Hand Traktor)	Tersedianya alat percontohan untuk pengolahan lahan	0 Unit	5	23	20	125	575	500	APBD	Dinas Pertanian	
	2. Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Pengadaan Hand Prayer dan Penggiling Padi)	Tersedianya alat Pengendali Hama dan Penyakit serta penggilingan Padi & Jagung	0 Unit	52	2	2	80	100	100	APBD	Dinas Pertanian	
	3. Penanganan Hasil Panen dan Pengolahan Hasil Panen (PAK)	Tertindakannya kegiatan penanganan Hasil panen dan Pengolahan Panen	0 Klp	26	0	0	81,48	0	0	APBD	Dinas Pertanian	
2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan												
	1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.	Tertindakannya promosi produksi pertanian unggulan	0 Kali Pameran	3	3	3	60	75	75	APBD	Dinas Pertanian	
3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan												
	1. Pengamanan Produksi Tanaman Pangan	Tersedianya pestisida untuk pengendalian hama dan penyakit Tanaman Pangan	0 Ha	30	50	50	54	59,4	60	APBD	Dinas Pertanian	
	2. Peningkatan Mutu Intensifikasi Padi	Tertanamnya tanaman padi varietas unggul baru	25 Ha	250	250	250	125	125	125	APBD	Dinas Pertanian	
	3. Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian (Pemb Jalan Usaha Tani) (DAK)	Lancarnya transportasi produksi hasil usaha tani	24 Desa	13	36	40	650	1.800	2.000	APBD	Dinas Pertanian	
	4. Pembinaan Rumah Hijau (PAK)	Optimalnya pemanfaatan pekarangan	0 KK	150	0	0	50	0	0	APBD	Dinas Pertanian	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5. Kaji terap: Industri desa Melalui pesantren	Muncul rintisan industri desa di kecamatan palengaan	0 pesantren			1			50	APBD	Balitbangda	
	6. Penelitian Terapan: Pembentukan "perusahaan mini" pengolahan produk pertanian	adanya perusahaan mini yang di kelola secara modern oleh kelompok tani di desa				1 klp			90	APBD	Balitbangda	
	7. Kaji terap industri desa melalui kelompok tani berbasis sumberdaya lokal	Aplikasi teknologi tepat guna dalam pengolahan produk brnding pemasangan (Agribisnis)			1 klp	1 klp		50	50	APBD	Balitbangda	
	8. Penelitian terapan desa percontohan pemanfaatan teknologi tepat guna didaerah pesisir	Terwujudnya peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daeah pesisir	1 desa	2 desa	2 Desa	3 desa	50	20		APBD	Balitbangda	
	9. Demoplot: adaptasi varietas (baru) produk pertanian	Teridentifikasi tingkat adaptasinya dengan spesifik wilayah			1 dusun	1 dusun		50	100	APBD	Balitbangda	
	10. Kaji terap: Desa perintis Produksi Pertanian Organik	Adanya percontohan desa organik	0	2 Klp		4 Klp	30		50	APBD	Balitbangda	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin											
	1. Pemberian tali asih dalam rangka hari Kemerdekaan RI	Santunan kepada Janda lansia	60 orng	60 orng	60 orng	60 orng	25,000	25,000	40,000	APBD	Dinsosnakertrans	
	2. Pemberian Tali Asih dalam rangka hari pahlawan	Santunan kepada pahlawan / Janda pahlawan	45 orng	45 orng	45 orng	45 orng	45,936	45,936	60,000	APBD	Dinsosnakertrans	
	3. Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	Meningkatnya berusaha keluarga miskin dengan bermacam - macam ketrampilan	20 KK	-	-	20 KK	-	-	60,000	APBD	Dinsosnakertrans	
	4. Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Lanjut Usia	Meningkatnya berusaha lansia dengan bermacam - macam ketrampilan	80 orng	-	-	80 orng	-	-	115,000	APBD	Dinsosnakertrans	
	5. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat Eks Trauma	Meningkatnya cacat eks trauma untuk berusaha dengan keahlian yang dimiliki	15 orng	-	-	15 orng	-	-	50,000	APBD	Dinsosnakertrans	
	6. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Meningkatnya jumlah fakir miskin yang diberdayakan yang berpotensi untuk meningkat kesejahteraannya	20 orng / KK	-	-	20 orng / KK	-	-	50,000	APBD	Dinsosnakertrans	
	7. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui peningkatan ketrampilan kerja	jumlah fakir miskin / janda yang mengikuti ketrampilan	20 orng / KK	-	-	20 orng / KK	-	-	10,000	APBD	Dinsosnakertrans	
	8. Pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan soisal ekonomi	meningkatnya jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mengikuti pelatihan untuk peningkatan kesejahteraan	30 janda/ wanita	-	-	30 janda/ wanita	-	-	50,000	APBD	Dinsosnakertrans	
	9. Pendataan PMKS dan RTLH	terdatanya akurasi PMKS dan RTLH se kabupaten	-	5780 dan 153			75,000	74,595	75,000	APBD	Dinsosnakertrans	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10. Pendampingan kegiatan program pembinaan lingkungan sosial daerah (PLSD)	Terbinanya lingkungan sosial di 13 kecamatan	-	-	13 kcmtn	13 kcmtn	-	105,400	105,400	APBD	Dinsosnakertrans	
	11. Bantuan Alat Peningkatan Produktifitas	Meningkatnya berusaha bagi keluarga miskin	-	10 paket	8 paket	10 paket	122,350	28,850	150,000	APBD	Dinsosnakertrans	
	12. Bantuan Alat Peningkatan Kesejahteraan	Meningkatnya berusaha bagi keluarga miskin	-	18 paket	11 paket	18 paket	183,900	120,895	200,000	APBD	Dinsosnakertrans	
5.	Program Promosi Pariwisata											
	1. Pengembangan Pariwisata Pamekasan	Peningkatan Jumlah Turis Domestik dan Manca Negara	Turis	54963	-	-	149	-	-	APBD	Disperindag	
	2. Penataan Kawasan Wisata Talang Siring	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Meningkat	Kawasan	5	-	-	1000	-	-	APBD	Disperindag	
	3. Penataan Kawasan Wisata Talang Siring (DPA-L)	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Meningkat	Kawasan	5	-	-	1039	-	-	APBD	Disperindag	
6.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah											
	1. Promosi produk unggulan daerah (BK-UEP Prop)DPAL	Pemasaran Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Paket	1	2	3	34	50	100	APBD	Disperindag	
	2. Pembangunan SHowroom Produk Unggulan Dearah (BK Prop) (DPAL)	Tersedianya Sarana Promosi Produk Unggulan	Paket	1	-	-	970	-	-	APBD	Disperindag	
	3. Pembinaan Desain Batik (BKK Prov IEP)	Desainer Batik Pamekasan meningkat	Orang	100	150	200	175	250	250	APBD	Disperindag	
	4. Fasilitasi Peningkatan Peralatan Produksi IKM olahan Pangan (BKK Prov IEP)	Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah	Paket	1	2	3	116	150	200	APBD	Disperindag	
	5. Pembinaan IKM Batik (BKK Prov IEP)	Mutu Produksi meningkat	Pengrajin	450	600	800	290	300	350	APBD	Disperindag	
	6. Pendamping Kegiatan Pengolahan Rumput laut di Desa Tertinggal (BKK Prov IEP)	Peningkatan Mutu dan Kualitas IKM Rumput Laut	Paket	1	1	1	106	125	150	APBD	Disperindag	
	7. Biaya Umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program (BKK Prov IEP)	Peningkatan Kinerja Program / Kegiatan	Paket	13	-	-	75	-	-	APBD	Disperindag	
	8. Fasilitasi penambahan referensi batik Pamekasan (BKK Prov IEP)	Perluasan Buku Batik Pamekasan	Buku	500	600	700	135	-	-	APBD	Disperindag	
	9. Pembangunan Sarana pendukung pengolahan rumput laut di desa tertinggal (BKK Prov IEP)	Tersedianya Gedung Produksi Pengolahan Rumput Laut	Paket	1	-	-	175	-	-	APBD	Disperindag	
	10. Fasilitasi Peningkatan Peralatan Industri Kecil Gerabah dan Bata Merah (PAK)	Pertumbuhan Wira Usaha Baru	Paket	-	-	-	64	-	-	APBD	Disperindag	
	11. Fasilitasi Peningkatan Peralatan Industri Kecil Paving (PAK)	Pertumbuhan Wira Usaha Baru	KUB	1	2	3	75	150	250	APBD	Disperindag	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri											
	1. Revitalisasi Pasar Tradisional (DAK)	Terpeliharanya Pasar Tradisional	Kios	7	10	12	3325	4000	5000	APBD	Disperindag	
	2. Revitalisasi Pasar Tradisional (DAK) (DPAL)	Terpeliharanya Pasar Tradisional	Kios	3	-	-	829	-	-	APBD	Disperindag	
	3. Revitalisasi Pasar Tradisional (BK. Prop) (DPAL)	Terpeliharanya Pasar Tradisional	Kios	3	-	-	1542	-	-	APBD	Disperindag	
	4. Fasilitasi Temu Usaha dan Perluasan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (BKK Prov IEP)	Pengembangan Pemasaran Meningkatkan	Paket	1	2	3	173	250	300	APBD	Disperindag	
	5. Revitalisasi Pasar Tradisional (BKK Prov IEP)	Terpeliharanya Pasar Tradisional	Kios	3	0	7	800	0	3000	APBD	Disperindag	
8.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan											
	1. Pembinaan, Pengawasan Barang Beredar dan Makanan Minuman Konsumsi Masyarakat	Terciptanya Peredaran Barang Makanan dan Minuman yang aman	Lokasi	100	110	120	98	108	119	APBD	Disperindag	
	2. Sosialisasi dan Operasional pengawasan alat-alat ukur (UTTP)	Terciptanya budaya tertib ukur	unit	14000	15400	155540	46	51	57	APBD	Disperindag	
9.	Program Pembinaan Industri, Perdagangan Tembakau dan Rokok											
	1. Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan Tata Niaga Tembakau	Transparansi Tata Niaga Tembakau	50 Tempat Usaha	55	61	67	92	101	112	APBD	Disperindag	
10.	Program koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah											
	1. Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Daerah (TKPKD)		100%	100%	100%	130	134	140	APBD	Bappeda	
	2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi PPDT		100%	100%	100%	205	175	175	APBD	Bappeda	
	3. Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang Ekonomi	Tercapainya Target Kinerja Pembangunan di Bidang Ekonomi		1 paket	1 paket	1 paket	45	50	50	APBD	Bappeda	
	4. Monitoring Program Strategis Bupati (PAK)	Terlaksananya monitoring program strategis Bupati Pamekasan	-	2 kec	4 kec	4 kec	75	98,8	100	APBD	Bappeda	
	5. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Ipteks Bagi Wilayah (IBW) Pengembangan Wisata (PAK)	Penyusunan Master Plan dan Action Plan Pengembangan Wisata Desa Padelegan dan Tanjung	-	100%	100%		100			APBD	Bappeda	
11.	Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar											
	1. Fasilitasi Pengembangan Agropolitan	Pengembangan Kawasan Agropolitan		4 Kec	4 Kec	4 Kec	65	100	100	APBD	Bappeda	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah											
	1. Pendampingan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) (PAK)	Tersusunnya konsep rencana rinci dan di kawasan Perdesaan berkelanjutan		100%	100%	100%	40	50	60	APBD	Bappeda	
13.	Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Destinasi Pariwisata											
	1. Operasional Car Free Day	Bertambahnya Wirausaha Baru	25 UKM	85 UKM	100 UKM	130 UKM	193	100	150	APBD	Bag. Adm. Perekonomian	
14.	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah											
	1. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (PAK)	Terlaksananya Pembinaan Dan Pemberdayaan KIM	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	10	10	15	APBD	Dishubkominfo	
15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan											
	1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	tersedianya terminal sebagai sarana untuk menggunakan moda transportasi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	97,50	97,50	97,50	APBD	Dishubkominfo	
	2. Pemeliharaan Tiang Median Jalan	tersedianya tiang median jalan yang memadai	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	50	35	50	APBD	Dishubkominfo	
	3. Pemasangan LPJU Kabupaten Pamekasan	tersedianya LPJU di Kabupaten Pamekasan	5606	5937	6002	6067	750	750	750	APBD	Dishubkominfo	
	4. Pemasangan LPJU 2012 Kabupaten Pamekasan (DPAL)	tersedianya LPJU di Kabupaten Pamekasan	5606	5937	0	0	721,963	-	-	APBD	Dishubkominfo	
	5. Pemasangan Jaringan dan KWH Meter (Jadwal Ulang)	Tersedianya KWH Meter pada PJU di Kabupaten Pamekasan	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket	307,472	307,472	307,472	APBD	Dishubkominfo	
	6. Pembangunan Infrastruktur Terminal Barang (BK Propinsi)	Tersedianya terminal untuk melakukan bongkar muat dari dan kedalam kota	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.000	2.000	2.000	APBD	Dishubkominfo	
	7. Pembangunan Tempat Parkir Knockdown Terminal Barang	tersedianya tempat parkir yang memadai bagi pengguna terminal barang		1 Unit	0	0	200	-	-	APBD	Dishubkominfo	
16.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan											
	1. Pembangunan Tambatan Perahu (DAK)	Tersedianya tambatan perahu yang memadai	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	364,88	1.000	1.000	APBD	Dishubkominfo	
	2. Pembangunan Sarana Tempat Khusus Parkir Pasar Kolpajung (PAK)	Tersedianya Tempat Parkir Yang memadai di Pasar Kolpajung	0	1 Unit	0	1 Unit	200	-	200	APBD	Dishubkominfo	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	Program Pembangunan/Peningkatan jalan dan Jembatan											
	1. Peningkatan Jalan dan Jembatan	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	1 Paket	1 Paket		14.530,16	10.730,16		APBD	Dinas PU Binamarga	
	2. Peningkatan Jalan dan Jembatan (BK Propinsi)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	1 Paket	1 Paket		10.000,00	60.000,00		APBD	Dinas PU Binamarga	
	3. Peningkatan Jalan dan Jembatan (DPAL)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	1 Paket	1 Paket		17.327,50	847,00		APBD	Dinas PU Binamarga	
	4. Peningkatan Jalan Desa (DBH Cukai)(Dilingkungan Pertanian Tembakau)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	1 Paket	-		18.213,70	-		APBD	Dinas PU Binamarga	
	5. Peningkatan Trotoar	Permukaan trotoar dengan kondisi meningkat	100	364,72 m2	364,72 m2		3.050,00	3.100,00		APBD	Dinas PU Binamarga	
	6. Peningkatan Jalan dan Jembatan (BK Propinsi) (DPAL)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	1 Paket	1 Paket		100,31	1.377,18		APBD	Dinas PU Binamarga	
	7. Peningkatan Jalan Desa dilingkungan Petani Tembakau (DBH Cukai) (DPAL)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	1 Paket	1 Paket		51,00	289,00		APBD	Dinas PU Binamarga	
	8. Peningkatan Jalan (DAK)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	1 Paket	1 Paket		5.119,90	9.958,14		APBD	Dinas PU Binamarga	
	9. Peningkatan Jalan dan Jembatan Pedesaan (BK Propinsi)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	1 Paket	-		13.000,00	-		APBD	Dinas PU Binamarga	
	10. Peningkatan Trotoar (PAK) (DPAL)	Terpenuhinya kebutuhan pengguna jalan	100	80%	-		1.629,01	-		APBD	Dinas PU Binamarga	
	11. Peningkatan Jalan dan Jembatan Berbasis Padat Karya (PAK) (DPAL)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	1 Paket	-		102,00	-		APBD	Dinas PU Binamarga	
	12. Peningkatan Jalan (DAK-Tambahan)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	50.205 m2	1 Paket		3.627,49	9.283,83		APBD	Dinas PU Binamarga	
	13. Peningkatan Jalan DAK (DPAL)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	-	1 Paket		-	2.204,85		APBD	Dinas PU Binamarga	
	14. Peningkatan Jalan dan Jembatan Pedesaan (BK Propinsi) (DPAL)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	-	1 Paket		-	7.173,04		APBD	Dinas PU Binamarga	
	15. Peningkatan Jalan (DAK) Tambahan (DPAL)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	-	1 Paket		-	2.368,30		APBD	Dinas PU Binamarga	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan											
	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten (PAK)	Konstruksi jembatan dengan konstruksi baik	100	45 m2	-		100,00	-		APBD	Dinas PU Binamarga	
	2. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	1 Paket	1 Paket		3.450,00	2.600,00		APBD		
	3. Pemeliharaan Berkala Trotoar (DPAL)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	60%	-		641,21	-		APBD		
	4. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (PAK)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	43.930 m2	-		4.650,00	-		APBD		
	5. Pemeliharaan Rutin Trotoar (PAK)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	1.299 m2	-		150,00	-		APBD		
	6. Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DP2D2) (PAK)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	1 Paket	-		561,83	-		APBD	Dinas PU Binamarga	
	7. Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten (PAK) (DPAL)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	-	1 Paket		-	3,82		APBD	Dinas PU Binamarga	
	8. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (PAK) (DPAL)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	-	1 Paket		-	111,63		APBD	Dinas PU Binamarga	
	9. Pemeliharaan Jalan Kabupaten DP2D2 (PAK) (DPAL)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	-	1 Paket		-	9,93		APBD	Dinas PU Binamarga	
19.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan											
	1. Peningkatan Jalan Desa (PAK) (DPAL)	Lapis permukaan jalan aspal menjadi baik	100	-	1 Paket		-	1.622,69		APBD	Dinas PU	
20.	Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Pedesaan											
	1. BOP PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi TA. 2013	Tercapainya Usulan/Aspirasi masyarakat (12 Kecamatan)	100%	100%	100%	100%	412	625	600	APBD	BAPEMAS	
21.	Program Pemberdayaan Masyarakat											
	1. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Pencanangan BBGRM	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	72	193	195	APBD	BAPEMAS	
	2. Pembangunan Jaringan Listrik (PLMD) (JADWAL ULANG)	Terbangunnya jaringan listrik pedesaan	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	161	5.525	3.000	APBD	BAPEMAS	
	3. Pengembangan dan Penataan Pasar Desa	Terbangunnya Pasar Desa	4 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	270	350	300	APBD	BAPEMAS	
	4. Pameran BBGRM X Tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Blitar dan Puncak Pencanangan BBGRM X Tingkat Nasional di Kalimantan Selatan (PAK)	1. Terlaksananya Pameran BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Timur	1 Kali	1 Kali	-	-	57	-	-	APBD	BAPEMAS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Terlaksananya Pameran BBGRM Tingkat Nasional	1 Kali	1 Kali	-	-		-	-			
	5. Sosialisasi Posyantek Kecamatan Tingkat Kabupaten	Sosialisasi (Pengenalan) Lembaga Posyantek kepada masyarakat	-	1 Kali	-	-	99	-	-	APBD	BAPEMAS	
	6. Pembangunan Jaringan Listrik (JADWAL ULANG)	Terbangunnya jaringan listrik pedesaan	-	1 Paket	-	-	46	875	-	APBD	BAPEMAS	
	7. Pelaksanaan Gelar TTG Nasional XVII	Terlaksananya Gelar TTG Nasional XVII	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	49	130	135	APBD	BAPEMAS	
	8. Pelatihan Pemasarakatan dan Pemanfaatan TTG	Terlaksananya Pelatihan TTG	-	-	1 Kali	1 Kali	-	70	80	APBD	BAPEMAS	
	9. Peningkatan Usaha Ekonomi Mendukung Usaha Sektor Informal	Peningkatan usaka Kelompok masyarakat (Pokmas)	1 Desa	2 Desa	10 Desa	10 Desa	-	100	150	APBD	BAPEMAS	
	10. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Mata Air (SMA)	Pembuatan Tandon Air, PIPANISASI, dan Pompa Air	1 Paket / 1 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	-	99	100	APBD	BAPEMAS	
	11. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)	Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	2 Klp	-	-	210	APBD	BAPEMAS	
	12. Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL)	Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat/Perempuan	-	-	-	2 Klp	-	-	200	APBD	BAPEMAS	
	13. Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu)	Berkembangnya Usaha Produktif Masyarakat	-	-	-	2 Klp	-	-	200	APBD	BAPEMAS	
22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak											
	1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza	Tercegahnya dan tertanggulangnya kejadian penyakit Avian Influenza pada ternak	40.000 ekor	20.000 ekor	-	-	20	-	-	APBD	DISNAK	
	2. Pencegahan Penyakit ND pada ayam buras	Tercegahnya dan tertanggulangnya kejadian penyakit New Castle Disease pada ternak	20.000 ekor	-	-	-	-	-	-	APBD	DISNAK	
	3. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza dan New Castle Disease	Tercegahnya dan tertanggulangnya kejadian penyakit Avian Influenza dan New Castle	-	-	40.000 ekor	40.000 ekor	-	40	40	APBD	DISNAK	
	4. Operasional Petugas RPH Pelayanan Kesehatan Hewan	Terfasilitasinya tenaga kontrak pelayanan RPH dan kesehatan hewan	7	7	7	7	43	44	44	APBD	DISNAK	
	5. Penanganan Gangguan Reproduksi pada Sapi	Terobatnya gangguan reproduksi pada ternak sapi	400 ekor	1000 ekor	400 ekor	400 ekor	70	50	50	APBD	DISNAK	
	6. Pelayanan Kesehatan Hewan (Pengobatan Hewan Gratis)	Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan secara gratis	-	1000 ekor	750 ekor	1000 ekor	85	66	95	APBD	DISNAK	
	7. Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling beserta kelengkapannya	Tersedianya sarana mobilitas pelayanan pusat kesehatan hewan	-	1 unit	-	1 unit	175	-	250	APBD	DISNAK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8. Revitalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Type C	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana laboraorium	1 paket	-	-	-	-	-	-	APBD	DISNAK	
	9. Peningkatan Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	Meningkatnya ketersediaan sarana pelayanan kesehatan hewan di puskesmas	-	-	4 paket	5 paket		50	55	APBD	DISNAK	
	10. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan	Terlaksananya uji/pemeriksaan laboratorium	-	-	400 sampel	410 sampel		20	22	APBD	DISNAK	
23.	Peningkatan Produksi peternakan											
	1. Pelayanan IB dan Program Satu Tahun Kelahiran pada ternak sapi	Meningkatnya jumlah akseptor IB dan Satu Saka	14.000 akseptor	-	-	-	-	-	-	APBD	DISNAK	
	2. Revitalisasi BP.Somalang	Terlaksananya operasional kegiatan BP Somalang	1 paket	-	-	-	-	-	-	APBD	DISNAK	
	3. Operasional Kegiatan Ternak Pemerintah (sapi, Kambing dan Domba)	Terlaksananya monitoring dan pembinaan peternak penerima bantuan ternak	1 tahun	-	-	-	-	-	-	APBD	DISNAK	
	4. Operasional Sapi potong Kereman dan sapi bakalan	Terlaksananya pembinaan peternak sapi kereman dan sapi bakalan	1 tahun	-	-	-	-	-	-	APBD	DISNAK	
	5. Survey Data Peternakan	Terlaksananya pendataan ternak sapi	1 komoditas	-	-	1 komoditas	-	-	100	APBD	DISNAK	
	6. Optimalisasi Balai Peternakan Grujugan	Tersedianya anggaran operasional BP. Grujugan	1 tahun	-	-	-	-	-	-	APBD	DISNAK	
	7. Peremajaan Kontrak Tenaga Pendukung Inseminasi Buatan	Terfasilitasinya tenaga kontrak pelayanan RPH dan kesehatan hewan	7	7	7	7	43	44	44	APBD	DISNAK	
	8. Pembinaan dan Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan	Terlaksananya pembinaan kepada para pedagang produk ternak dan uji kualitas bahan pangan asal hewan	-	100 sampel	75 sampel	150 sampel	29	40	80	APBD	DISNAK	
	9. Pembinaan Penyebaran Ternak dan Pengembangan kawasan	Terbinanya peternak sapi di kawasan sumber bibit sebagai embrio pembentukan kawasan peternakan	-	1 komoditas (3 desa)	-	-	35	-	-	APBD	DISNAK	
	10. Rehabilitasi dan Renovasi Rumah Potong Hewan Bersama Penunjangnya (DAK) (DPAL)	Terlaksananya rehab dan renovasi RPH	-	2 RPH						APBD	DISNAK	
	11. Optimalisasi Lahan dan peningkatan Mutu Pakan Ternak	Termanfaatkannya lahan di BPP Pakong sebagai sumber HMT unggul	-	1 paket	-	-	15	-	-	APBD	DISNAK	
	12. Pengembangan Areal Lahan Penanaman Pakan Ternak (PAK)	Tertanamnya HMT unggul di lahan BPP Pakong	-	10.000 stek			10			APBD	DISNAK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	13. Operasional Monitoring dan Evaluasi Ternak Bantuan Pemerintah (PAK)	Terlaksananya monitoring, pengawasan dan pembinaan kepada peternak penerima bantuan pemerintah	-	1 paket			32			APBD	DISNAK	
	14. Pengadaan Sumur Bor (PAK)	Tersedianya sarana sanitasi dan higienitas di RPH	-	2 unit			50			APBD	DISNAK	
	15. Pengembangan irigasi Air Tanah Dangkal Mendukung Peternakan (DAK)	Tersedianya sumber air pengembangan peternakan	-	-	1 unit	3 unit	-	65	210	APBD	DISNAK	
	16. Bimbingan Teknis Paramedis Veteriner	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan medis veteriner bagi petugas lapangan	-	-	35 orang		-	30		APBD	DISNAK	
	17. Akselerasi Peningkatan Populasidan Kualitas Sapi Madura dan Sapi Crossing Berbasis Satu Saka	Meningkatnya jumlah akseptor IB dan Satu Saka	-	-	16.000 ekor	16.500 ekor	-	100	130	APBD	DISNAK	
	18. Optimalisasi, operasional dan Perawatan Kebun Bibit BPP Pakong	Terawatnya kebun bibit HMT di BPP Pakong	-	-	1 paket	1 paket	-	15	20	APBD	DISNAK	
	19. Kaji Terap miniatur pengoperasian dan pengembangan sapi potong di kabupaten pamekasan	aplikasi kredit pedet, satu tahun satu kelahiran, biogas dan pionir pengolahan usaha pakan ternak	-	-	1 klp	-	-	100		APBD	Balitbangda	
	20. Kaji terap: kredit dan asuransi pedet bagi keluarga miskin	ada 20-30 petani penerima kredit pedet dan penerapan asuransi ternak sapi yang akan berlanjut secara bergilir	-	-	-	1 klp	-		90	APBD	Balitbangda	
24.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan											
	1. Ekspose/Promosi Hasil Pembangunan Peternakan	Terlaksananya kegiatan promosi hasil pembangunan peternakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	25	30	30	APBD	DISNAK	
	2. Gerakan Minum Susu	Terlaksananya pemberian susu gratis kepada anak usia sekolah	1 komoditas	1 komodita	1 komodita	1 komoditas	15	18,5	18,5	APBD	DISNAK	
	3. Pembinaan Sapi Tacek (PAK)	Terbinanya kelompok peternak paguyuban sapi tacek di wilayah sumber bibit	-	200 ekor	250 ekor	300 ekor	50	25	50	APBD	DISNAK	
	4. Paket Teknologi Modem Taraban	Terlaksana peningkatan pemasaran ternak melalui penerapan teknologi	50 ekor	-	-	-	-	-	-	APBD	DISNAK	
	5. Optimalisasi Informasi pasar dan pembinaan produk hasil ternak	Tersedianya informasi perkembangan harga ternak, bapronak, sapronak melalui pembinaan produk hasil ternak	1 paket	-	-	-	-	-	-	APBD	DISNAK	
	6. Apel Ternak dan Promosi Pemasaran SAPI (PAK)	Terlaksananya pameran dan promosi ternak sapi hasil IB	2 paket	-	-	-	-	-	-	APBD	DISNAK	
	7. Operasional Pembinaan Pengembangan Usaha Ternak (ruminansia, unggas)	Terlaksananya pembinaan usaha peternakan	-	-	13 kecamatan	13 kecamatan	-	25	30	APBD	DISNAK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8. Pembinaan Pengolahan Hasil Pemasaran Produk Peternakan	Terlaksananya pembinaan terhadap pengolah produk peternakan	-	-	1 paket	1 paket	-	25	25	APBD	DISNAK	
	9. Festival ternak dan Promosi Hasil Produk Peternakan	Terlaksananya pameran/promosi ternak sapi hasil IB dan produk ternak	-	-	1	1		75	75	APBD	DISNAK	
	10. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ternak Unggas	Terfasilitasinya pembinaan kawasan ternak unggas			2 komodita	2 komoditas	-	50	50	APBD	DISNAK	
	11. Pengembangan Jalan Produksi di Wilayah Peternakan (DAK)	Terbangunnya sarana jalan di kawasan peternakan	-	-	3 km	3 km	-	300	300	APBD DAK	DISNAK	
25.	Program Pemberdayaan Penyuluhan											
	1. Pembinaan dan penilaian Kelompok Tani Berbasis Ternak	Terlaksananya penilaian dan pembinaan kelompok tani berbasis ternak tingkat kabupaten	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	30	30	30	APBD	DISNAK	
	2. Pembinaan Lomba Kelompok Tani Tingkat Nasional	Terlaksana pembinaan dan penyiapan kelompok tani berbasis ternak mengikuti lomba tingkat nasional	-	1 poktan	-	1 poktan	100	-	100	APBD	DISNAK	
	3. Renovasi/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pakong (DAK)	Terenovasinya sarana penyuluhan BPP kec. Pakong	-	-	1 unit	-	-	300	-	APBD DAK	DISNAK	
26.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan											
	1. Pengadaan Rapid Test Flu Burung, Desinfektan dan Antiseptik (PAK)	Tersedianya alat uji flu burung, desinfektan dan antiseptik	-	1 paket	-	1 paket	15	-	20	APBD	DISNAK	
	2. Pengadaan S spuit Otomatis (PAK)	Tersedianya alat suntik hewan otomatis	-	20 unit	-	20	30	-	30	APBD	DISNAK	
27.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan											
	1. Sosialisasi dan Pengembangan Teknologi Peternakan (PAK)	Terlaksananya sosialisasi penerapan teknologi peternakan	1 paket	-	-	-	-	-	-	APBD	DISNAK	
	2. Penerapan Teknologi Peternakan	Terlaksananya penerapan teknologi peternakan	-	-	3 jenis terapan	3 jenis terapan	-	36	40	APBD	DISNAK	
28.	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan											
	1. Sosialisasi Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Kelautan	Jumlah masyarakat pesisir yang tersosialisasi perundang - undangan	180 Org	300 Org	0 Org	300 Org	50	0	75	APBD	DISKANLA	
	2. Pengadaan Alat Komunikasi Kantor POKMASWAS (DAK)	Jumlah peralatan yang diberikan kepada Pokmaswas	0 Unit	50 Unit	0 Unit	50 Unit	100	0	125	APBD	DISKANLA	
	3. Pengadaan Sarana Kendaraan Roda 4 Untuk Pengawasan / Penyuluhan (DAK)	Bertambahnya sarana prasarana bagi pengawas dan penyuluh perikanan	10 Paket	2 Unit	0 Unit	5 Paket	337,5	0	150	APBD	DISKANLA	
	4. Optimalisasi Prasarana Pokmaswas (DAK) (PAK)	Prosentase prasarana Pokmaswas yang terehabilitasi	0%	25%	0%	50%	50	0	100	APBD	DISKANLA	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan											
	1. Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Wilayah Pesisir (DAK)	Meningkatnya akses jalan di wilayah pemukiman masyarakat pesisir/pembudidaya ikan	0 Meter	160 Meter	400 Meter	500 Meter	200	400	600	APBD	DISKANLA	
	2. Rehabilitasi Kolam Pedederan (DAK)	Prosentase peningkatan produksi benih ikan air tawar	5%	10%	10%	15%	200	200	250	APBD	DISKANLA	
	3. Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	Prosentase peningkatan produksi ikan air tawar	5%	10%	10%	10%	200	200	250	APBD	DISKANLA	
	4. Rehabilitasi Kolam Pembesaran dan Pemijahan BBI (DAK)	Prosentase peningkatan produksi benih ikan air tawar	5%	10%	0%	0%	200	0	0	APBD	DISKANLA	
	5. Pembangunan Rabat Beton Jalan BBI (DAK)	Meningkatnya akses jalan di kawasan Balai Benih Ikan (BBI)	0 Meter	450 Meter	450 Meter	0 Meter	200	200	0	APBD	DISKANLA	
	6. Normalisasi Saluran Tambak (DAK)	Prosentase peningkatan produksi ikan air payau dan garam rakyat	5%	10%	10%	10%	409,08	650	700	APBD	DISKANLA	
	7. Pembangunan Gedung Induk Ikan (DAK)	Prosentase peningkatan produksi benih ikan air tawar	5%	10%	0%	0%	200	0	0	APBD	DISKANLA	
	8. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI (DAK)	Prosentase peningkatan produksi ikan air tawar	5%	10%	0%	0%	25	0	0	APBD	DISKANLA	
	9. Penyediaan Sarana Gudang Pakan (DAK)	Jumlah gudang pakan yang layak dan kondusif bagi pokdakan	0 Unit	1 Unit	0 Unit	2 Unit	65	0	150	APBD	DISKANLA	
	10. Pengadaan Sarana Pasca Panen Bagi Pelaku Usaha Perikanan (PAK)	Jumlah pokdakan yang menerima bantuan sarana pasca panen	0 pokdakan	10 Pokdakan	0 Pokdakan	10 Pokdakan	50	0	75	APBD	DISKANLA	
30.	Program pengembangan perikanan tangkap											
	1. Pembuatan Terumbu Karang Buatan (TKB) (DAK)	Jumlah terumbu karang buatan yang tertanam di kawasan perairan tangkap	1000 Buah	800 Buah	800 Buah	1000 Buah	200	200	250	APBD	DISKANLA	
	2. Pengadaan Alat Tangkap Gill Net (DAK)	Prosentase peningkatan produksi tangkapan ikan	5%	10%	10%	10%	100	170	150	APBD	DISKANLA	
	3. Pembuatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tambat Labuh (DPA-L)	Dokumen perencanaan pembangunan tambat labuh yang tersusun	0 Exemplar	10 Exemplar	0 Exemplar	0 Exemplar	140	0	0	APBD	DISKANLA	
	4. Pengadaan Lampu Celup Bawah Air (LACUDA)(DAK)	Prosentase penurunan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan zat kimia berbahaya	2%	0%	0%	0%	100	0	0	APBD	DISKANLA	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5. Operasional Sertifikasi Hak Atas Nelayan	Jumlah tanah milik nelayan yang tersertifikasi oleh BPN	0 Nelayan	200 Nelayan	0 Nelayan	0 Nelayan	45	45	0	APBD	DISKANLA	
	6. Pengadaan Bubu Penangkap Ikan (DAK)	Prosentase peningkatan produksi tangkapan ikan	5%	10%	10%	10%	150	140	120	APBD	DISKANLA	
	7. Pengadaan Rumpun Laut Dangkal (DAK)	Prosentase peningkatan produksi tangkapan ikan	5%	10%	10%	10%	180	126	150	APBD	DISKANLA	
	8. Pengadaan Alat Safety Rescue bagi Anak Buah Kapal(ABK)(DAK)	Jumlah alat safety rescue yang diberikan kepada nelayan	0 Unit	960 Unit	960 Unit	960 Unit	200	200	200	APBD	DISKANLA	
	9. Pengadaan Cool Box Diatas Kapal (DAK)	Prosentase peningkatan kualitas dan mutu hasil tangkapan ikan	5%	10%	0%	10%	56	0	100	APBD	DISKANLA	
	10. Pengadaan GPS dan Fish Finder (DAK)	Prosentase peningkatan produksi tangkapan ikan	5%	10%	10%	10%	150	0	100	APBD	DISKANLA	
	11. Pengadaan Alat Tangkap Jaring Belanak (DAK)	Prosentase peningkatan produksi tangkapan ikan	5%	10%	0%	10%	46	0	100	APBD	DISKANLA	
	12. Pengadaan Sarana Prasarana TPI Branta Pasaser (DAK) (PAK)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung TPI Branta Pesisir yang tersedia	2 Unit	2 Unit	0 Unit	2 Unit	67	0	450	APBD	DISKANLA	
	13. Pengadaan Sarana Penyuluhan dan Statistik Perikanan (DAK) (PAK)	Jumlah sarana pendukung bagi penyuluh dan petugas statistik perikanan	2 Paket	2 Paket	0 Paket	0 Paket	100	0	0	APBD	DISKANLA	
	14. Operasional Pendamping Pengadaan Kartu Nelayan Bagi Pelaku Usaha Perikanan (PAK)	Jumlah kartu nelayan yang terdistribusi kepada nelayan	0 Kartu	5500 Kartu	7000 Kartu	0 Kartu	20	0	0	APBD	DISKANLA	
31.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan											
	1. Promosi produk perikanan	Jumlah kegiatan untuk mempromosikan produk unggulan perikanan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	60	75	100	APBD	DISKANLA	
	2. Pengadaan Cool Box Untuk Pengolah dan Penjual Ikan (DAK)	Jumlah cool box yang diberikan kepada pengolah dan pemasar ikan	0 Unit	140 Unit	30 Unit	50 Unit	175	45	70	APBD	DISKANLA	
	3. Pembangunan Los Pasar Ikan dan Perlengkapannya (DAK) (DPA-L)	Jumlah los pasar ikan tradisional yang nyaman, kondusif dan layak bagi penjual / bakul ikan	1 Unit	3 Unit	0 Unit	0 Unit	406.958	0	0	APBD	DISKANLA	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4. Pengadaan Mesin Penghancur Es (Ice Crusher) (DAK) (PAK)	Jumlah mesin penghancur es yang diberikan kepada kelompo nelayan	0 Unit	8 Unit	0 Unit	5 Unit	114	0	75	APBD	DISKANLA	
	5. Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 3 untuk Pemasaran Produk Perikanan (DAK) (PAK)	Jumlah sarana kendaraan roda 3 (tiga) untuk pemasaran produk perikanan	0 Unit	1 Unit	3 Unit	0 Unit	30	90	0	APBD	DISKANLA	
32.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan											
	1. Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pengadaan Hand Sprayer (DBH Cukai)	Jumlah hand sprayer (unit)	-	50	260		25	195		APBD	DISHUTBUN	
	2. Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pengadaan Hand Tractor (DBH Cukai)	Jumlah hand tractor (unit)	-	7	100		200	2.700		APBD	DISHUTBUN	
	3. Penanganan Panen dan Pasca Panen melalui Pengadaan Mesin Perajang daun Tembakau (DBH Cukai)	Jumlah mesin perajang (unit)	-	5	100		200	70		APBD	DISHUTBUN	
	4. Standarisasi kualitas bahan baku melalui Pengadaan Qultivator (DBH Cukai)	Jumlah Qultivator (unit)	-		4			120		APBD	DISHUTBUN	
33.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan											
	1. Promosi Hasil Produksi Perkebunan/Kehutanan	Jumlah event promosi	2	2	2		50	50		APBD	DISHUTBUN	
34.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan											
	1. Standarisasi kualitas bahan baku melalui Penyediaan Air Baku untuk Budidaya Tembakau (DBH Cukai)	Jumlah sarana air baku (unit)		22	14		2.500	2.500		APBD	DISHUTBUN	
	2. Standarisasi kualitas bahan baku melalui Pembuatan Sarana Penunjang Penyediaan Air Baku untuk Budidaya Tembakau (DBH Cukai)	Jumlah sarana penunjang air baku (unit)			41			2.495		APBD	DISHUTBUN	
	3. Standarisasi kualitas bahan baku melalui Penangkaran Benih Tembakau (DBH Cukai)	Jumlah Benih Tembakau Prancak '95 (Kg)	500	500	500		357,990	357,999		APBD	DISHUTBUN	
	4. Standarisasi kualitas bahan baku melalui Intensifikasi Tembakau (DBH Cukai)	Jumlah pupuk ZK (Kg)	40.000	60.000	60.000		625	625		APBD	DISHUTBUN	
	5. Pembuatan Embung (DAK)	Jumlah embung (unit)		12	10		1.200	1.000		APBD	DISHUTBUN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6. Standarisasi kualitas bahan baku melalui Penyediaan Air Baku untuk Budidaya Tembakau (DBH Cukai) (Jadwal Ulang)	Jumlah sarana air baku (unit)			5			942,5		APBD	DISHUTBUN	
	7. Standarisasi kualitas bahan baku melalui Demplot Usaha Tani Tembakau (DBH Cukai)	Jumlah varietas tembakau		5	5		100	105		APBD	DISHUTBUN	
	8. Penguatan kelembagaan kelompok tani melalui Penyuluhan Usaha Tani Tembakau Mandiri (DBH Cukai)	Jumlah petugas penyuluh tembakau mandiri		26	26		260	200		APBD	DISHUTBUN	
	9. Standarisasi kualitas bahan baku melalui Pelatihan Penangkar Benih Tembakau Madura (DBH Cukai)	Jumlah penangkar benih tembakau (orang)		150	150		150	300		APBD	DISHUTBUN	
	10. Standarisasi kualitas bahan baku melalui pengadaan terpal plastik penampung air pada lahan tembakau (DBH Cukai)	Jumlah terpal plastik (buah)			400			50		APBD	DISHUTBUN	
	11. Standarisasi kualitas bahan baku melalui usahatani konservasi lahan tembakau (DBH Cukai)	Jumlah bangunan konservasi lahan tembakau (unit)	12		10			1.000		APBD	DISHUTBUN	
	12. Standarisasi kualitas bahan baku melalui pembuatan embung untuk budidaya tembakau (DBH Cukai)	Jumlah embung (unit)			10			1.200		APBD	DISHUTBUN	
	13. Kebun Bibit Tembakau Kecamatan (DBH Cukai)	Jumlah lahan KBTK (unit)	24	10			250			APBD	DISHUTBUN	
	14. Demplot Pengembangan Tebu (PAK)	Jumlah areal demplot		2			50			APBD	DISHUTBUN	
35.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	1. Ops. Pusat Pelayanan Terpadu PP dan PA	Meningkatnya kepedulian Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak		1 Keg	1 Keg	1 Keg	43,8	103,4			BPPKB	
	2. Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak Nasional Tk. Kab. Pamekasan	Meningkatnya jumlah forum anak dan kegiatan pengembangan Pamekasan sebagai kota layak anak		100 or			35				BPPKB	
	3. Peningkatan SDM Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita	Meningkatnya peran aktif /institusi dalam mendukung kegiatan PKK/Dharma Wanita		300 or			300				BPPKB	
	4. Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS)			7800 sw	7800 sw	7800 sw	155,4	155,4	155,4		BPPKB	

Tujuan 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN (dalam jutaan)			SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	Ket
				2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Target 1B : Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda												
Indikator MDGs :		1. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja 2. Ratio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas 3. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja										
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani												
1. Pembinaan Kelompok Tani		Terwujudnya kelompok tani berprestasi	3 Klp	3	3	3	40	43,65	50	APBD	Dinas Pertanian	
2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan												
1. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian (Bawang merah)		Meningkatnya produktivitas bawang merah	7,0 Ton / Ha	7,3	7,5	7,8	75	75	100	APBD	Dinas Pertanian	
2. Pengembangan Tanaman Biofarmaka		Bertambahnya tanaman bio farmaka di lahan pekarangan	3 Ha	4 Ha	1 Ha	2 Ha	40	60	100	APBD	Dinas Pertanian	
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah												
1. Pemanduan dan Bimbingan Usaha Tenaga Mandiri Terdidik (TKMT)		Meningkatnya angkatan kerja terdidik untuk berwira usaha mandiri	25 org	25 org	40 org	40 org	68	255,747	255,747	APBD	Dinsosnakertrans	
2. Bimbingan Teknis Teknologi Tepat Guna		meningkatnya pencari kerja untuk memanfaatkan teknologi tepat guna dalam berwira usaha mandiri	44 org	16 org	20 org	20 org	92,65	124,78	124,78	APBD	Dinsosnakertrans	
3. Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Bimbingan Teknis Bagi Wira Usaha Baru (WUB)		Meningkatnya wira usaha baru untuk meningkatkan usahanya	16 org	8 org	40 org	40 org	50	249,747	249,747	APBD	Dinsosnakertrans	
4. Pelatihan menjahit		Meningkatnya pencari kerja yang memiliki kompetensi keahlian sebagai daya dukung penempatan kerja	16 org	16 org	16 org	32 orang	100	100	200	APBD	Dinsosnakertrans	
5. Pelatihan Otomotif		Meningkatnya pencari kerja yang memiliki kompetensi keahlian sebagai daya dukung penempatan kerja	-	16 org	-	32 orang	85,780	-	170	APBD	Dinsosnakertrans	
6. Pelatihan Instalasi Listrik		Meningkatnya pencari kerja yang memiliki kompetensi keahlian sebagai daya dukung penempatan kerja	16 org	16 org	16 org	16 org	55,100	55,100	55,100	APBD	Dinsosnakertrans	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7. Pelatihan Bordir	Meningkatnya pencari kerja yang memiliki kompetensi keahlian sebagai daya dukung penempatan kerja	16 org	-	16 org	32 orang	-	73,156	150	APBD	Dinsosnakertrans	
	8. Pendampingan kegiatan pembentukan wira usaha baru	Tersedianya konsultasi bagi wira usaha baru untuk mengembangkan usahanya	-	-	10 org	15 orang	-	488,865	500	APBD	Dinsosnakertrans	
	9. Bantuan stimulan modal bagi wira usaha baru	Tersedianya peningkatan modal bagi wira usaha baru untuk mengembangkan usahanya	-	-	10 org	20 orang	-	203	400	APBD	Dinsosnakertrans	
	10. Pemanduan dan Bimbingan Usaha Pasca Pelatihan Menjahit	Tersedianya bantuan modal dan bimbingan usaha bagi pencari kerja yang memiliki kompetensi keahlian untuk ber wira usaha	-	-	25 org	32 orang	-	178,499	340	APBD	Dinsosnakertrans	
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1. Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar	bertambahnya anak terlantar yang memiliki ketrampilan bekerja dan pengembangan bakatnya	17 orang	-	-	17 orang	-	-	120	APBD	Dinsosnakertrans	
	2. Pelatihan dna praktek kerja remaja putus sekolah (RPS)	bertambahnya remaja putus sekolah yang memiliki ketrampilan kerja	1 kimpk	-	-	2 kimpk	-	-	96,5	APBD	Dinsosnakertrans	
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1. Pembangunan Gedung Klinik UMKM (BK) (DPAL)			1 unit	1 unit		691,992,200	500,00		BK PROV	Din Kop & UKM	
6.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah											
	1. Fasilitas Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional (SMESCO-Jakarta)	Berlangsungnya Pameran Produk Unggulan KUKM	8 KUKM	60%	1 paket	1 paket	46,9	50,00	200 (APBD PROV)	APBD	Din Kop & UKM	
	2. Fasilitas Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional / Regional (HARKOP-Jatim)	Berlangsungnya Pameran Produk Unggulan KUKM	4 KUKM	60%	1 paket	100%	90	43,15	-	APBD	Din Kop & UKM	
	3. Fasilitas Promosi Produk KUMKM Tk. Nasional/Regional (hari Besar Lainnya- Jatim)	Pameran Produk Unggulan KUKM	4 KUKM	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	4. Fasilitas Promosi Produk KUKM Tk. Lokal	Pameran Produk Unggulan KUKM	5 KUKM	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	5. Temu Usaha Pengembangan Pola Kemitraan Antara UKM	Terciptanya Mitra Usaha UMKM	60 orang	100 org	-	100 UKM	40	-	75	APBD	Din Kop & UKM	
	6. Pelatihan Kewirausahaan Koperasi (BK Propinsi)	Meningkatnya Pengetahuan Kewirausahaan Koperasi	-	120 org	-	-	50	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	7. Pelatihan Kewirausahaan UKM/PKL (PAK)	Meningkatnya Pengetahuan Kewirausahaan UKM/PKL	-	130 UKM/PKL	-	-	50	-	-	APBD	Din Kop & UKM	

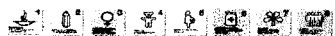
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8. Bintek Pelatihan Pembuatan Tahu	Meningkatnya Pengetahuan UKM Tahun	-	50 org	-	-	46,9	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	9. Bintek Pengolahan Pangan Bagi Sentra UKM (PAK)	Meningkatnya Sarana Sentra UKM Pengolahan Pangan	-	10 sentra (100)	-	-	55	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	10. Temu Usaha Kewirausahaan (PAK)	Meningkatnya Pengetahuan Kewirausahaan UKM/PKL	-	130 UKM	-	-	50	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	11. Pengadaan Peralatan Kebersihan bagi PKL (PAK)	Meningkatnya Usaha PKL	-	200 PKL	-	-	30	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	12. Pelatihan seni kerajinan sulam pita bagi anggota PKK dan pelaku UKM	Menambah Wawasan Pelaku UKM tentang Sulam Pita	-	-	40 UKM	-	-	30	-	APBD	Din Kop & UKM	
	13. Pelatihan pembukuan sederhana bagi pelaku UKM	Meningkatnya Pengetahuan UKM	-	-	65 UKM	-	-	33,15	-	APBD	Din Kop & UKM	
	14. Pelatihan seni kerajinan pembuatan hantaran	Menambah Wawasan Pelaku UKM Tentang Pembuatan Hantaran	-	-	40 UKM	-	-	40	-	APBD	Din Kop & UKM	
	15. Pelatihan pengemasan dan labelisasi produk UKM	Meningkatnya Pengetahuan UKM Tentang Pengemasan Dan Labelisasi Produk UKM	-	-	40 UKM	-	-	30	-	APBD	Din Kop & UKM	
	16. Pengadaan Etalase Jam dan Kaca Mata	Tersedianya Etalase	-	-	20 PKL	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	17. Bintek Usaha Koperasi Perikanan dan Kelautan	Meningkatnya Pengetahuan Anggota Koperasi	-	-	75 Koperasi	-	-	40	-	APBD	Din Kop & UKM	
	18. Pemberdayaan KSP/USP Pola Inkubator	Pelaksanaan Diklat KSP/USP	30 koperasi	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
7.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah											
	1. Penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB)	Berlangsungnya Temu Usaha	500 WUB	3500 UKM	13 kec	3500 WUB	122,40	122,40	150,00	APBD	Din Kop & UKM	
	2. Fasilitas Promosi Produk UMKM Tk. Nasional / Lokal (BK Provinsi)	Berlangsungnya Pameran Produk UMKM	-	3 paket	-	-	200	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	3. Temu Usaha Kemitraan Antara Usaha Kecil Dan Usaha Menengah	Terciptanya Mitra Usaha UMKM	60 orang	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	4. Biaya Operasional Dana Bergulir	Meningkatnya Penagihan Kepada Debitur	60%	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	5. Penataan Tenda PKL	Tersedianya Tenda PKL	56 PKL	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
8.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi											
	1. Sarasehan Pengembangan Koperasi dalam rangka Memperingati Hari Koperasi	Terlaksananya Sarasehan Pengembangan Koperasi	-	100 kop	-	-	40	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	2. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (BK Propinsi)	Berlangsungnya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	-	100 kop	-	-	50	-	-	APBD	Din Kop & UKM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3. Magang Pengelolaan Koperasi (BK Propinsi)	Berlangsungnya Magang Pengelola Koperasi	-	1 paket	-	-	100	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	4. Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi	Berlangsungnya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi	-	30 org	-	-	50	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	5. Pemantauan KSP/USP oleh KPKS	Terlaksananya Penilaian Peningkatan Koperasi		50 kop	-	-	36,9	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	6. Bimbingan Tekhnik Perkoperasian (PAK)	Berlangsungnya Workshop Perkoperasian bagi Pengurus	-	120 org	-	-	70	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	7. Diklat Vokasional bagi Anggota Koperasi (PAK)	Meningkatnya Pengetahuan Anggota Koperasi	-	150 org	-	-	50	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	8. Bintek vokasional koperasi	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Perkoperasian	-	-	75 kop	-	-	45	-	APBD	Din Kop & UKM	
	9. Bintek koperasi	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Perkoperasian	-	-	75 kop	-	-	40	(200)	APBD	Din Kop & UKM	
	10. Sosialisasi UU perkoperasian Nomor 17 tahun 2012	Terlaksananya Sosialisasi	-	-	65 kop	-	-	48,15	-	APBD	Din Kop & UKM	
	11. Sosialisasi dan operasionalisasi peran komisi pengendalian koperasi simpan pinjam (KPKS)	Terlaksananya Sosialisasi	-	-	65 kop	-	-	45	-	APBD	Din Kop & UKM	
	12. Bintek penyusunan laporan keuangan koperasi	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	-	-	75 kop	-	-	45	-	APBD	Din Kop & UKM	
	13. Fasilitasi akses permodalan koperasi	Pengembangan Usaha Koperasi	-	-	80 kop	-	-	43,15	-	APBD	Din Kop & UKM	
	14. Pembuatan Akta Kopwan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (Dana APBD Propinsi Tahun 2009)	Terwujudnya Pembuatan Akta Pendirian Koperasi	39 KOPWAN	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	15. Pembuatan Akta Kopwan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (Dana APBD Propinsi Tahun 2010)	Terwujudnya Pembuatan Akta Pendirian Koperasi	94 KOPWAN	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	16. Bintek Bagi Kelompok Perempuan Dalam Rangka Pembentukan KOPWAN (Dana APBD Propinsi Tahun 2009)	Terlaksananya Bintek Bagi Kelompok Perempuan	39 KOPWAN	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	17. Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Kepala Desa Dan Kelompok Perempuan Dalam Rangka Pembentukan KOPWAN (Dana APBD Propinsi Tahun 2009)	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Dengan Kepala Desa	39 KOPWAN	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	18. Pengembangan Kerjasama Koperasi	Berlangsungnya Hari Ulang tahun Koperasi	1 paket	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	19. Hibah Untuk Pembentukan Koperasi Wanita (BK)	Terbentuknya KOPWAN	94 Kelompok	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	20. Bintek Bagi Kelompok Perempuan Dalam Rangka Pembentukan KOPWAN (Dana APBD Propinsi Tahun 2010)	Terlaksananya Bintek Bagi Kelompok Perempuan	94 KOPWAN	-	-	-	-	-	-	APRD PROV.	Din Kop & UKM	
	21. Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Kepala Desa Dan Kelompok Perempuan Dalam Rangka Pembentukan KOPWAN (Dana APBD Propinsi Tahun 2010)	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Dengan Kepala Desa	94 KOPWAN	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	22. Fasilitasi Kegiatan Dekopinda	Terlaksananya Konsultasi Dan Koordinasi Antar Koperasi	1 Paket	-	-	-	-	-	-	APBD	Din Kop & UKM	
	23. Sosialisasi laporan Keuangan Koperasi SAK-ETAP	Tertibnya Laporan Keuangan KSP/USP	-	-	-	100 KSP/USP	-	-	100	APBD	Din Kop & UKM	
	24. Diklat Vokasional bagi Anggota KOPWAN	Peningkatan Pengetahuan Perkoperasian Bagi KOPWAN	-	-	-	100 Kopwan	-	-	100	APBD	Din Kop & UKM	
	25. Pemberian Stimulan Bagi KOPWAN Dan Koperasi Syariah	Peningkatan Usaha KOPWAN dan Koperasi Syariah	-	-	-	50 koperasi	-	-	100	APBD	Din Kop & UKM	
9.	Program Peningkatan Dan Pembinaan Usaha Koperasi											
	1. Pelatihan Keterampilan Bagi Anggota Koperasi Siswa Tk. SMA	Peningkatan Keterampilan Bagi Anggota Koperasi Siswa TKK. SMA	-	-	-	1 paket	-	-	100	APBD	Din Kop & UKM	
	2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi Daerah Pesisir	Pengembangan Usaha Koperasi Daerah Pesisir	-	-	-	1 paket	-	-	100	APBD	Din Kop & UKM	
	3. Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha	-	-	-	1 paket	-	-	80	APBD	Din Kop & UKM	
10.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda											
	1. Pembinaan dan Penguatan Kelompok Usaha Pemuda Produktif	meningkatkan SDM dalam pengelolaan Kelompok usaha pemuda produktif		80 orang		100 orang	20 Orang		25 orang	APBD	Disporabud	
	2. Pembinaan dan peningkatan peran serta kelembagaan pemuda	optimalisasi kelembagaan pemuda		80 orang		200 orang	50 orang		60 orang		Disporabud	
	3. Perkemahan dan Bakti Pemuda (PAK)	tercapainya pemuda yang berkarakter		100 orang		200 orang	100 orang		110 orang	APBD	Disporabud	
11.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah											
	1. Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil	Kesejahteraan Pelaku Industri meningkat	10%	30%	50%	60%	92	150	175	APBD	Disperindag	
	2. Fasilitasi Perluasan Pemasaran Produk IKM (BKK Prov IEP)	Perluasan Pemasaran Potensi Unggulan	%	50	70	80	251	270	300	APBD	Disperindag	
	3. Fasilitasi pengembangan usaha IKM Pasca Panen (BKK Prov IEP)	Penampungan Hasil Panen	Gedung	1	-	-	200	-	-	APBD	Disperindag	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4. Fasilitasi Temu Usaha dan Perluasan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (BKK Prov IEP)	Pengembangan Pemasaran meningkat	Paket	1	2	3	173	250	350	APBD	Disperindag	
	5. Fasilitasi pengembangan pasar produk industri hasil tembakau (DHBC)	Perluasan Pemasaran Potensi Unggulan	1 Paket Pameran	2	4	6	125	200	275	APBD	Disperindag	
12.	Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat (Program Exs Gerdu Taskin)											
	1. BOP Dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) (PAK)	Suksesnya pelaksanaan Program PPKM	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	47	55	55	APBD	BAPEMAS	
	2. Dana Pendamping Kegiatan PKPKM Provinsi Jawa Timur 2013	Pemberdayaan masyarakat misikin	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	-	25	30	APBD	BAPEMAS	
13.	Peningkatan Produksi peternakan											
	1. Optimalisasi Program Satu Tahun Kelahiran pada Ternak Sapi	Meningkatnya jumlah akseptor IB dan Satu Saka	-	15.500 ekor	-	-	194	-	-	APBD	DISNAK	
	2. Optimalisasi Lahan dan peningkatan Mutu Pakan Ternak	Termanfaatkannya lahan di BPP Pakong sebagai sumber HMT unggul	-	1 paket	-	-	15	-	-	APBD	DISNAK	
	3. Bimbingan Teknis Usaha Peternakan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan teknis peternakan pada peternak	-	50 peternak	-	100 peternak	20	-	40	APBD	DISNAK	
	4. Stimulan pengembangan Ayam Ras Petelur	Terlaksananya pemberian stimulan kepada kelompok peternak	-	1 paket	-	2 paket	50	-	100	APBD	DISNAK	
14.	Program Pemberdayaan Peternak											
	1. Pembinaan Pengembangan Usaha Ternak Unggas Lokal (PAK)	Tersedianya sarana pembinaan dan pengembangan ternak unggas lokal pada peternakan rakyat	-	2 paket	-	2 paket	50	-	50	APBD	DISNAK	
	2. Pengembangan Kawasan Sapi Bibit	Terlaksananya pembinaan peternak sapi di kawasan sumber bibit	-	-	1 komofitas	1 komofitas	-	50	50	APBD	DISNAK	
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan											
	1. Pendamping Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PUGAR)	Jumlah Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang menerima bantuan sarana dan prasarana tambak garam	0 KUGAR	170 KUGAR dan 20 BUNG KUGAR	170 KUGAR	0 KUGAR	100	100	-	APBD	DISKANLA	
16.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan											
	1. Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar	Prosentase peningkatan produksi budidaya perikanan	5%	10%	10%	10%	240	200	225	APBD	DISKANLA	
	2. Pendamping Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)	Jumlah kelompok penerima program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)	0 Kelompok	16 Kelompok	19 Kelompok	0 Kelompok	30	60	-	APBD	DISKANLA	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Pengembangan Budidaya Lele (PAK)	Prosentase peningkatan produksi budidaya perikanan	5%	10%	10%	10%	100	100	150	APBD	DISKANLA	
17. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan												
1	Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan (PAK)	Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan yang menerima bimbingan teknis penguatan kelembagaan	0 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	50	50	75	APBD	DISKANLA	
18. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan												
1	Pengembangan Lebah Madu	Jumlah sentra pengembangan (unit)	1	1	1		20	75		APBD	DISHUTBUN	
19. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan												
1	Penguatan kelembagaan kelompok tani melalui Sekolah Lapang Usahatani Tembakau (DBH Cukai)	Jumlah peserta SL (Poktan)		12	12		600	750		APBD	DISHUTBUN	
2	Pelatihan Pengolahan Buah Kelapa	Jumlah peserta pelatihan (orang)		300	150		70	50		APBD	DISHUTBUN	
3	SL Tanaman Perkebunan (Pengendalian Hama Kwangwung)	Jumlah peserta pelatihan (poktan)		2			50			APBD	DISHUTBUN	
4	Pelatihan Pengolahan Gula Merah dari Nira Siwalan	Jumlah peserta pelatihan (orang)		40			40			APBD	DISHUTBUN	
5	Pengembangan Tanaman Cabe Jamu (PAK)	Luas Lahan Pengembangan (Ha)		2			50			APBD	DISHUTBUN	



Tujuan 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN (dalam jutaan)			SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	Ket
				2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015												
Indikator MDGs :		1. Prevalensi balita kekurangan gizi 2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum										
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)												
1.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Berkurangnya daerah rawan pangan	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	50	60	100	APBD	KKP	
2.	Penanganan Kebutuhan Bahan Pangan Pokok untuk Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga	5 desa	5 desa	-	5 desa	100	-	100	APBD	KKP	
3.	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PL-DPM)	Terbinanya lembaga distribusi pangan yang aktif	1 desa	1 desa	-	1 desa	15	-	60	APBD	KKP	
4.	Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Tersedianya data daerah rawan pangan	13 peta	13 peta	13 peta	13 peta	11	11	31	APBD	KKP	
5.	Pengembangan Cadangan Pangan di Masyarakat	Meningkatnya cadangan pangan masyarakat	3 klp	3 klp	3 klp	3 klp	15	23	50	APBD	KKP	
6.	Isi Lumbung	Tersedianya cadangan pangan di desa	7 klp	7 klp	7 klp	7 klp	120	120	155	APBD	KKP	
7.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Meningkatnya produksi Pertanian, perkebunan dan peternakan	-	5 klp	5 klp	5 klp	75	85	113	APBD	KKP	
8.	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Kebun Sekolah	Tersedianya pekarangan/kebun sekolah	-	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	15	15	30	APBD	KKP	
9.	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (PAK)	Terciptanya Diversifikasi Ketahanan Pangan	-	4 unit	4 unit	10 unit	25	25	180	APBD	KKP	
10.	Pengembangan Kantin Sekolah Sehat Berbasis Pangan Lokal (PAK)	Tersedianya jajanan yang sehat dan aman di sekolah	-	4 kantin	50 kantin	50 kantin	15	88	100	APBD	KKP	
11.	Diversifikasi Olahan Pangan Berbasis Sumberdaya Wilayah (PAK)	Meningkatnya pemahaman masyarakat Tentang B2SA	13 klp	13 klp	13 klp	13 klp	21	100	100	APBD	KKP	
12.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Olahan Pangan (PAK)	Tersedianya jajanan yang sehat dan aman	-	50 paket	50 paket	50 paket	15	-	50	APBD	KKP	
13.	Pembangunan lumbung pangan Masyarakat	Tersedianya tempat penyimpanan bahan pangan masyarakat	4 unit	-	10 unit	10 unit	-	1.200	1.200	APBD	KKP	
14.	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Tersedianya data dan informasi situasi Pangan dan Gizi di Daerah Rawan Pangan	-	-	1 paket	1 paket	-	42	50	APBD	KKP	

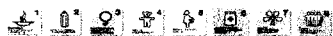
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian dan Perkebunan											
	1. Gelar Teknologi Olahan Pangan Berbasis Sumber Daya Wilayah	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Teknologi olahan Pangan	13 kec	13 kec	13 kec	13 kec	60	60	120	APBD	KKP	
3.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan											
	1. Ops. Pusat Pelayanan Terpadu PP dan PA	Meningkatnya kepedulian Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak		1 Keg	1 Keg	1 Keg	43,8	103,4	110	APBD	BPPKB	
	2. Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak Nasional Tk. Kab. Pamekasan	Meningkatnya jumlah forum anak dan kegiatan pengembangan Pamekasan sebagai kota layak anak		100 or			35			APBD	BPPKB	
	3. Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS)	Menambah makanan bergizi untuk Sekolah		7800 sw	7800 sw	7800 sw	155,4	155,4	155,4	APBD	BPPKB	
	4. Sosialisasi Pengarus Utamaan Gender (PUG)	Meningkatnya peran Perempuan dalam pengarus utamaan gender		100 or	100 or	100 or	25	25	25	APBD	BPPKB	
	Workshop Kelompok UPPKS	Materi KIE yang tersusun sebanyak 2 jenis materi setiap tahun dari 5 tahun yang direncanakan		150 or	150 or	150 or	50	50	50	APBD	BPPKB	
4.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri											
	1 Pelaksanaan Pameran Produk UPPKS	Meningkatnya kesadaran Masyarakat thd Program PP dan KB	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	19,7	20	25	APBD	BPPKB	
5.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR											
	1. Ops. Pendidikan Sebaya/Konselor Sebaya (PS/KS)	Persentase jumlah PIK KRR berstatus tegak dibanding jumlah kecamatan yang ada sebanyak PIK		50 or	130 or	150 or	29,3	130,8	150	APBD	BPPKB	
	2. Pengembangan Kegiatan Youth Centre	Prosentase jumlah pendidik Sebaya dan Konselor sebaya (PSKS) yang melaksanakan pelayanan KRR Bagi kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah sebanyak 85 orang minimal 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan		30 Or	40 Or	50 Or	30	40	50	APBD	BPPKB	
	3. Forum Goup Diskusi Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah peserta Forum Group Diskusi KIR		100 or	100 or	100 or	18,7	19	20	APBD	BPPKB	
6.	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak											
	1. Pengembangan Pamekasan sebagai Kota Layak Anak				1 Pkt		100			APBD	BPPKB	
7.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga											
	1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Prosentase pelatihan tenaga pendamping sebanyak 1 kegiatan minimal dalam 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan			1 keg	1 keg		20	30	APBD	BPPKB	

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PAMEKASAN**

Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN (dalam jutaan)			SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	Ket
				2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Target 2A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki2 maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar												
Indikator MDGs :		1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tahun 2015 sebesar 100 persen 2. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD pada tahun 2015 sebesar 100 persen 3. Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun, laki2 dan perempuan pada tahun 2015 sebesar 100 persen										
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini											
	1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	terselenggara kegiatan Pendidikan PAUD	45 klmpk	50 klmpk	-	50 klmp	250	-	275	APBD	DISDIK	
	2. workshop tenaga pendidik PAUD	peningkatan profesionalisme serta kompetensi guru PAUD	-	-	120 guru	150 guru	-	150	165	APBD	DISDIK	
	3. Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	peningkatan kesejahteraan Kompetensi Pendidik PAUD	-	-	195 guru	215 guru	-	250	275	APBD	DISDIK	
	4. Seleksi & Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi (BK-Prov)	terpilihnya guru PAUD berprestasi	-	-	10 guru	25 guru	-	15	25	APBD I	DISDIK	
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun											
	1. Rehab Gedung SDN Kodik Proppo (DPA-L)	tersedianya sarana pendidikan	1 lembaga	1 lbg	1 lbg	-	225	225	-	APBD	DISDIK	
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK-Tambahan)	tersedianya sarana & Prasarana pendidikan Dasar	-	62 lbg	-	-	7.200	-	-	APBN	DISDIK	
	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK-Tambahan)	tersedianya sarana & Prasarana pendidikan Menengah	-	32 lbg	-	-	4.127	-	-	APBN	DISDIK	
	4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)	tersedianya sarana & Prasarana pendidikan Dasar	-	-	80 lbg	40 Lbg	-	12.900	6.450	APBN	DISDIK	
	5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK)	tersedianya sarana & Prasarana pendidikan SMP	-	40 lbg	50 lbg	-	5.145	7.916	-	APBN	DISDIK	
	6. Olympiade Mata Pelajaran (OSN) SD	Terpilihnya siswa/siswi berprestasi pd bidang SAINS	-	-	460 psrt	460 psrt	-	150	175	APBD	DISDIK	
	7. Olympiade Mata Pelajaran (OSN)	Terpilihnya siswa/siswi berprestasi pd bidang SAINS	1000 psrt	1000 psrt	-	-	392	-	-	APBD	DISDIK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8. Rehabilitasi RKB SDN (DAK) (DPA-L)	Tersedianya RKB yang layak	-	35 lbg	-	-	6.057	-	-	APBN	DISDIK	
	9. Sewa Gedung SMPN 4 Pamekasan	Tersedianya fasilitas pendidikan	1 lembaga	1 lbg	1 lbg	1 lbg	40	40	50	APBD	DISDIK	
	10. Pengadaan Tanah SD, SMP	Tersedianya lahan untuk pendidikan	-	3 lbg	2 lbg	-	500	275	-	APBD	DISDIK	
	11. Pembangunan RSBI Lawangan Daya II (Jadwal Ulang)	Terlaksananya pembangunan RSBI	1 lembaga	1 lbg	-	-	708	-	-	APBD	DISDIK	
	12. Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMP (DPA-L)	Terlaksananya kegiatan DAK SMP	-	10 lbg	-	-	950	-	-	APBN	DISDIK	
	13. Penyelenggaraan Program Paket A, B, dan C	Penurunan Angka putus Sekolah serta terselenggara program paketv A,B,C	15 klmpk	15 klmpk	15 klmp	15 klmp	75	100	115	APBD	DISDIK	
	14. DAK SDN dan SMP Swasta (DAK) (Jadwal Ulang)	Terlaksananya DAK SD & SMP	-	101 lbg	-	-	1.989	-	-	APBD	DISDIK	
	15. Penyelenggaraan Ujian Nasional Kejar Paket A, B, dan C	Penurunan Angka putus Sekolah	15 klmpk	15 klmpk	15 klmp	15 klmpk	40	50	60	APBD	DISDIK	
	16. Pengadaan Raport dan Buku Induk SD	Tersedianya buku raport & induk bagi siswa baru	-	425 lbg	425 lbg	425 lbg	100	100	125	APBD	DISDIK	
	17. Pembangunan Gedung SMP Negeri 4 Pamekasan	Tersedianya fasilitas pendidikan	-	-	1 lbg	-	-	1.200	-	APBD	DISDIK	
	18. Dana alokasi khusus (DAK) SD	terlaksananya DAK SD	200 lbg	151 lbg	-	100 lbg	18.356	-	15.300	APBN	DISDIK	
	19. Rehabilitasi SD Swasta (DAK) (DPA-L)	terlaksananya rehabilitasi SD swasta	-	1 lbg	-	-	413	-	-	APBN	DISDIK	
	20. Pengadaan Perabot RKB SDN (DAK) (Jadwal Ulang)	tersedianya perabot utk RKB SDN	-	14 lbg	-	-	425	-	-	APBN	DISDIK	
	21. Pengadaan Perabot Perpustakaan SDN (DAK) (Jadwal Ulang)	tersedianya perabot utk Perpustakaan SDN	-	71 lbg	-	-	632	-	-	APBN	DISDIK	
	22. Rehabilitasi SMPN (DAK) (DPA-L)	terlaksananya rahabilitasi SMPN	-	5 lbg	-	-	156	-	-	APBN	DISDIK	
	23. Rehabilitasi SMP Swasta (DAK) (DPA-L)	terlaksananya rahabilitasi SMP Swasta	-	20 lbg	-	-	784	-	-	APBN	DISDIK	
	24. Dana Alokasi Khusus SD (DPA-L)	terlaksananya DAK SD	-	9 lbg	-	-	677	-	-	APBN	DISDIK	
3.	Program Pendidikan Menengah											
	1. Olimpiade Mata Pelajaran SMP/SMA	meningkatnya prestasi siswa dibidang sains pada jenjang SMP/SMA	-	-	20 pserta	20 psrta	-	200	220	APBD	DISDIK	
	2. Rehab Ringan dan Sedang PAUD, TK/RA, SD/MI/MD, SMP,MTs, SMA/MA dan Sederajat	terlaksananya rehab ringan & sedang	85 lbg	161 lbg	149 lbg	150	3.280	2.660	2.900	APBD	DISDIK	
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana SMA dan SMK	tersedianya sarana & prasarana SMA & SMK	-	2 lbg	-	4 lbg	225	-	500	APBD	DISDIK	
	4. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah (BOSDA)	terselenggara kegiatan Pendidikan Menengah	-	52 lbg	52 lbg	52 lbg	3.805	3.829	3.900	APBD	DISDIK	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5. Pengadaan Tanah PUS SDN (Jadwal Ulang)	Tersedianya tanah untuk PUS SDN	-	4 lbg	-	8 lbg	1.025	-	2.000	APBD	DISDIK	
	6. Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB)(Bk Prov)	terpilihnya siswa/siswi berprestasi utk melanjutkan sekolah ke jenjang PT	-	-	10 org	10 org	-	20	25	APBD I	DISDIK	
	7. Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru 2013	terlaksananya evaluasi & monitoring PPDB pada jenjang SMP/SMA/SMA	-	1 pkt	1 pkt	1 pkt	25	50	55	APBD	DISDIK	
	8. Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru MA 2013	terlaksananya PPDB MA	-	1 pkt	-	-	200	-	-	APBD	DISDIK	
	9. BKSM Jenjang SLTA (bk Prov)	tersalurkannya BKSM utk menurunkanya angka Putus sekolah	-	-	2400 siswa	2400 siswa	-	1.872	2.000	APBD I	DISDIK	
	10. Pengadaan Tanah SMK & SMA Negeri	tersedianya lahan pendidikan	-	-	6 Lmbg	-	-	2.500	-	APBD	DISDIK	
	11. BOS SLTA (BK Provinsi)	terlaksananya pendidikan SLTA	-	2400 siswa	-	-	1.872	-	-	APBD I	DISDIK	
	12. Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Perikanan Tlanakan (BK Provinsi) (DPA-L)	tersedianya sarana & prasarana SMK	-	1 lbg	-	-	642	-	-	APBD I	DISDIK	
	13. Rehab Ringan dan Sedang PAUD, TK/RA, SD/MI/MD, SMP/MTs, SMA/MA dan Sederajad (DPAL)	terlaksananya rehab ringan & sedang	-	23 lbg	-	-	387	-	-	APBD	DISDIK	
	14. Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB SMKN 1 Pasean (Jadwal Ulang)	tersedia RKB utk SMKN 1 pasean	-	1 lbg	-	-	100	-	-	APBD	DISDIK	
	15. Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru SLTA 2013	terlaksananya PPDB SMA	-	1 pkt	-	-	300	-	-	APBD	DISDIK	
	16. Peningkatan Mutu Pendidikan SMK (BK Prov)	meningkatnya Mutu pendidikan pd jenjang SMK	-	-	1 lbg	2 lbg	-	250	500	APBD I	DISDIK	
	17. Pengadaan Peralatan Lab. Komputer SMKN 3 pameksan	meningkatnya Mutu pendidikan	-	-	1 lbg	-	-	80	-	APBD	DISDIK	
	18. Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB SMKN 1 Propopo (Jadwal Ulang)	terlaksananya pembangunan RKB SMKN 1 Propopo	-	1 lbg	-	-	100	-	-	APBD	DISDIK	
	19. Pembagunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN (BK Provinsi)	terlaksananya pembangunan RKB SMKN	-	4 lbg	-	4 lbg	500	-	500	APBD I	DISDIK	
	20. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA (DAK)	tersedianya sarana & prasarana Pendidikan SMA	-	34 lbg	17 lbg	8 lbg	11.214	5.218	3.000	APBN	DISDIK	
	21. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK (DAK)	tersedianya sarana & prasarana Pendidikan SMK	-	49 lbg	40 lbg	35 lbg	16.346	10.570	7.500	APBN	DISDIK	
4.	Program Pendidikan Non Formal											
	1 penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional	terlaksananya keg. PKBM serta penurunan buta huruf	-	-	25 klmpk	30 klmpk	-	103	115	APBD	DISDIK	
	2 BOP Madin (BK Provinsi)	terlaksananya kegiatan evaluasi BPDGS	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	83	80	88	APBD I	DISDIK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
	1. Inovasi & Pengembangan Guru	meningkatnya kreativitas serta kompetensi Guru	-	-	50 guru	50 guru	-	50	55	APBD	DISDIK	
	2. Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) / DUPAK	terlaksananya penilaian Angka Kredit	500 orgng	500 orang	1000 orgng	1000 orgng	25	30	35	APBD	DISDIK	
	3. Pengembangan Kinerja Pengawas	peningkatan kualitas & kompetensi serta kineja Pengawas		71 pngwas	93 pngws	93 pngws	100	100	115	APBD	DISDIK	
	4. Manajemen Operasional BOS (BK Provinsi)	terlaksananya evaluasi & monitoring BOS	-	1 pkt	-	1 pkt	136	-	140	APBD I	DISDIK	
	5. Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNFI (BK Provinsi)	meningkatnya prestasi pendidikn PNFI	-	30 orgng	-	30 orgng	10	-	20	APBD I	DISDIK	
	6. Workshop Pembelajaran TIK Berbasis LET Khusus Guru SD (PAK)	meningkatnya kemampuan serta profesionalisme guru SD di bidang TIK	-	150 psrt	-	150 psrt	50		55	APBD	DISDIK	
	7. sosialisasi & workshop Kurikulum Tahun 2013 SMP, SMA, & SMK	meningkatnya pengetahuan guru tentang kurikulum 2013	-	-	640 guru	-	-	200	-	APBD	DISDIK	
	8. Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013 (PAK)	meningkatnya pengetahuan guru tentang kurikulum 2013	-	341 psrt	-	-	50	-	-	APBD	DISDIK	
6.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan											
	1. Peningkatan Profesionalisme Guru SD	meningkatnya profesionalisme serta kompetensi Guru SD	-	-	79 orgng	85	-	158	170	APBD	DISDIK	
	2. Pengembangan Kinerja Guru BK	meningkatnya profesionalisme & kinerja serta kompetensi Guru BK	300 orgng	300 orgng	-	300 orgng	100	-	110	APBD	DISDIK	
	3. Bantuan untuk SD Terpencil (BK Provinsi)	tersalurkannya bantuan untuk lembaga terpencil	-	3 lbg	7 lbg	6 lbg	75	175	200	APBD I	DISDIK	
	4. Insentif Guru Tidak Tetap (GTT)	meningkatnya kesejahteraan GTT	-	4780 orgng	-	-	2.900	-	-	APBD	DISDIK	
	5. Fasilitasi Peningkatan Peran Guru Tidak Tetap (GTT)	meningkatnya kesejahteraan GTT	-	-	7384 orgng	7384 orgng	-	4.524	4.750	APBD	DISDIK	
	6. Pengembangan Kinerja Gugus MGMP	meningkatnya kinerja MGMP	200 orgng	200 orgng	-	200 orgng	100	-	110	APBD	DISDIK	
	7. Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi (BK Provinsi/2013)	terpilihnya PTK yang berprestasi	-	100 orgng	100 orgng	100 orgng	15	53	60	APBD	DISDIK	
	8. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD	terpilihnya siswa/siswi berprestasi di bidang olah raga utk jenjang SD	-	-	23 siswa	25 siswa	-	80	88	APBD	DISDIK	
	9. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP & SMA	terpilihnya siswa/siswi berprestasi di bidang olah raga utk jenjang SMP/SMA	-	-	50 siswa	50 siswa	-	136	150	APBD	DISDIK	
	10. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)	terpilihnya siswa/siswi berprestasi di bidang olah raga	40 orgng	80 orgng	-	-	250	-	-	APBD	DISDIK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11. Pendampingan Pembangunan RSBI (Jadwal Ulang)	terlaksananya pembangunan RSBI	1 lbg	1 lbg	1 lbg	-	500	500	-	APBD	DISDIK	
	12. Ganti Rugi Tanah RSBI (DPA-L)	terlaksananya proses ganti rugi tanah RSBI	1 lbg	1 lbg	1 lbg	-	1.168	1.168	-	APBD	DISDIK	
	13. Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan (PAK)	tersedianya data pendidikan yang akurat	-	286 psrt	-	286 psrt	30	-	35	APBD	DISDIK	
	14. Pemilihan Guru OSN (PAK)	terpilihnya guru berprestasi dibidang Sains	-	150 orng	150 orng	150 orng	75	75	85	APBD	DISDIK	
	15. Pemilihan Guru Berprestasi (PAK)	terpilihnya guru yang berprestasi	100 Orng	100 orng	100 orng	-	25	25	-	APBD	DISDIK	
	16. Pencanangan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun (PAK)	terlaksananya program wajar 12 tahun	-	1 pkt	1 pkt	-	200	200	-	APBD	DISDIK	
	17. Pendampingan Better Education Through Reform And Management Universal Teacher Upgrading (Bermutu) (PAK)	meningkatnya mutu pendidikan	-	200 org	200 orng	200 orng	200	200	220	APBD	DISDIK	
	18. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	terpilihnya kepala sekolah yang berprestasi	200 orng	-	100 orng	100 orng	-	50	55	APBD	DISDIK	
	19. Sertifikasi Guru	monev pelaksanaan sertifikasi guru	1750 orng	-	2200 orng	2200 orng	-	60	70	APBD	DISDIK	
	20. Pembinaan Siswa di luar sekolah tingkat SMP/SMA/SMK	berkurangnya siswa/siswi nakal & angka putus sekolah	-	-	1 pkt	1 pkt	-	36	45	APBD	DISDIK	
7.	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa											
	1. US dan UASBN SD/MI	terpilihnya siswa/siswi berprestasi bidang seni	769 lbg	769 lbg	769 lbg	769 lbg	350	350	400	APBD	DISDIK	
	2. Pengendalian Mutu Pendidikan	peningkatan mutu pendidikn terutama pendidik & siswa	-	71 orng	-	-	100	-	-	APBD	DISDIK	
	3. Pusat Pendidikan Sains (PUSDIK SAINS)	terlaksana kegiatan SAINS	400 orng	400 orng	50 orng	50 orng	100	50	55	APBD	DISDIK	
	4. UNAS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	terlaksananya kegiatan UN & meningkatnya Angka kelulusan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	272	350	375	APBD	DISDIK	
	5. BOSDA Pendidikan Dasar 9 Tahun	Terlaksana pendidikan dasar 9 thn	436	433	432	432	3.360	3.360	2.826	APBD	DISDIK	
	6. Pengadaan Buku Raport dan Buku Induk SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta	tersedianya buku raport & induk bagi siswa baru	-	1 pkt	380 lbg	380 lbg	150	150	150	APBD	DISDIK	
	7. Pengadaan Buku untuk IPM Rendah (BK Provinsi) (DPA-L)	meningkatnya kualitas pendidikan terutama siswa N pendidikanya	-	1 pkt	-	-	800	-	-	APBD I	DISDIK	
	8. fasilitasi lomba lumban kompetensi Siswa SMK	terpilihnya siswa/siswi berprestasi utk jenjang SMK	-	-	60 pserta	60 pserta	-	50	50	APBD	DISDIK	
	9. Karya Bhakti Pramuka PLB	meningkatnya prestasi siswa/siswi PLB	10 psrt	-	30 Pserta	30 Pserta	-	30	35	APBD	DISDIK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10. Porseni PLB	meningkatnya prestasi siswa/siswi PLB bidang PORSENI	-	-	30 Peserta	30 Peserta	-	30	35	APBD	DISDIK	
	11. FL2SN	terpilihnya siswa/siswi berprestasi bidang seni	-	-	40 Peserta	40 Peserta	-	25	30	APBD	DISDIK	

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PAMEKASAN**

Tujuan 3 : Mendorong kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN (dalam jutaan)			SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	Ket
				2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Target 3A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015												
Indikator MDGs :		1. Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah atas dan perguruan tinggi 2. Kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian (KPPNP) 3. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR										
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
1	Pembinaan Terpadu (BINDU) Program Pemberdayaan Perempuan dan KB Tk. Kabupaten	Meningkatnya Kinerja Penyuluh KB dalam Penanganan Program PP dan	124 Or	124 Org	KB	124 Org	16,7	16,7	20	APBD	BPPKB	
2. Program Pelayanan Kontrasepsi												
1	Pelayanan KB-Kes TMKK (Baksos)	Persentase Pelayanan alat kontrasepsi terhadap masyarakat	150 Org	190 Org	195 Org	300 Org	58,3	58,3	60	APBD	BPPKB	
2	Pelayanan KB dalam Kesatuan Gerak PKK KB-Kes	Meningkatnya Peserta KB Baru	300 Org	300 Org	400 Org	400 Org	19,5	21,9	25	APBD	BPPKB	
3. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan												
1	Peningkatan SDM Organisasi PKK	Persentase peran perempuan di perdesaan		300 Org			300				BPP KB	
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri												
1	Operasional Pusat Pelayanan Terpadu PP dan PA	Meningkatnya Pelayanan Terpadu PP dan PA	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	43,8	103,4	110.000	APBD	BPPKB	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Deteksi Dini Kanker Mulut Rahim dan Payudara (PAP SMEAR)	Meningkatnya Kesehatan Ibu dalam mengantisipasi terjadinya kelainan Sel secara lebih dini	330 Or	300 Or	310 Or	330 Or	32,9	38,2	50000	APBD	BPPKB	
5.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri											
1	Operasional KIE Program Pemberdayaan Perempuan dan KB (P-APBD)	Meningkatnya kepedulian masyarakat thd Program PP dan KB	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	50	50	50000		BPPKB	
2	Penilaian dan Lomba Kader Terbaik Kabupaten dan Kecamatan	Meningkatnya Dukungan Program PP dan KB	85 Or	85 Or	85 Or	85 Or	44,4	42,7	50		BPPKB	
3	Pemantapan Kemitraan Program KB-KR dengan Organisasi Profesi dan LSM (IDI, IBI, MUSLIMAT NU dan PKB) (P-APBD)	Meningkatnya Dukungan Program PP dan KB dengan Organisasi Terkait	1 Keg								BPPKB	

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PAMEKASAN**

Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN (dalam jutaan)			SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	Ket
				2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TARGET 4A : Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015												
Indikator MDGs :		1. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 2. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup 3. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak										
1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	1. Pelayanan Tumbuh Kembang Anak (Kel Bina Anaprasa dan Kel Anak dengan Keterbatasan Fisik dan Mental (P-APBD)	Meningkatnya Perkembangan dengan keterbatasan mental	1 Keg							APBD	BPPKB	
	2. Pengembangan Pamekasan sebagai Kota layak Anak (PAK)	Upaya untuk mengembangkan Pamekasan menjadi Kota Layak Anak	40 pkt brng	40 pkt brng	40 pkt brng	40 pkt brng	100	100	100	APBD	BPPKB	
	3. Program Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT - AS) (PAK)	Peningkatan Asupan Gizi yang cukup untuk mendukung Prestasi Belajar Anak Sekolah		7800 sw	7800 sw	7800 sw	155,4	155,4	155,4	APBD	BPPKB	
2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan												
	1. Pengadaan obat Generik untuk Puskesmas dan Jaringannya (DAK)	Terlaksananya pengadaan obat generik penunjang, obat program dan buffer stock	20 Pusk	20 Pusk	20 Pusk	20 Pusk	4.083,2	3.628,2	4.500	APBD	Dinas Kesehatan	
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat												
	1. Perbaikan gizi masyarakat	Terlaksananya kegiatan prog. perbaikan gizi	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	147,8	120	170	APBD	Dinas Kesehatan	
	2. Pemberian makanan tambahan dan vitamin penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) dan Kurang Energi Kronis (KEK)	Pemberian makanan Gakin dan Non Gakin	20 Pusk	-	215 balita, 63 bumil	20 Pusk	-	300	500	APBD	Dinas Kesehatan	
	3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui UKBM (PAK)	Terseleenggaranya kegiatan pengembangan upaya kes bersumber daya masyarakat	20 Pusk	20 Pusk, 3 SBH, 30 Poskestren	-	-	20,2	-	-	APBD	Dinas Kesehatan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui UKBM	Terselenggaranya kegiatan pengembangan upaya kes bersumber daya masyarakat	20 Pusk	-	20 Pusk, 20 SBH	20 Pusk	-	25	93,75	APBD	Dinas Kesehatan	
5.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya kegiatan program kesehatan ibu dan anak	20 Pusk	20 Pusk	20 Pusk	20 Pusk	264,3	165	318	APBD	Dinas Kesehatan	
6.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk UKS dan KRR (PAK)	Terlaksananya keg. Program kesehatan anak usia sekolah, bayi dan balita	20 Pusk	20 Pusk (360 Sekolah)	-	-	46,6	-	-	APBD	Dinas Kesehatan	
7.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk UKS dan KRR	Terlaksananya keg. Program kesehatan anak usia sekolah, bayi dan balita	20 Pusk	-	20 Pusk (312 Sekolah)	20 Pusk	-	50	93,75	APBD	Dinas Kesehatan	
8.	Pelayanan Kesehatan (Dokter ke Desa / TERKESAN)	Terlaksananya kegiatan promotif, preventif dan kuratif di Desa	-	189 Desa	189 Desa	189 Desa	349,8	485,7	437,5	APBD	Dinas Kesehatan	
9.	Pengadaan KMS Balita dan Registrasi Posyandu (PAK)	Terlaksananya pengadaan KMS Balita dan Registrasi Posyandu	20 Pusk	24.420 KMS, 960 Bk	-	189 Desa	48,7	-	90	APBD	Dinas Kesehatan	
10.	Pengadaan register KIA untuk Posyandu	Terlaksananya kegiatan program KIB	20 Pusk	-	20 Pusk (189 Desa)	20 Pusk (189 Desa)	-	25	50	APBD	Dinas Kesehatan	
11.	Lomba Posyandu dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PAK)	Terlaksananya lomba Posyandu dan PHBS	0	20 Posyandu	-	-	40,1	-	-	APBD	Dinas Kesehatan	
12.	Lomba Posyandu dan Perilaku Hidup Bersih Sehat	Terlaksananya lomba Posyandu dan PHBS	0	-	20 Posyandu	20 Posyandu	-	35	45	APBD	Dinas Kesehatan	
13.	Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan (PAK)	Terlaksananya program Yankesdas rujukan dan khusus	20 Pusk	20 Pusk	20 Pusk	20 Pusk	73,6	73	165	APBD	Dinas Kesehatan	
4.	Program Pengawasan Obat dan Makanan											
1.	Peningkatan dan Pengendalian Mutu Obat dan Bahan Berbahaya (PAK)	Terlaksananya pemantauan dalam peningkatan terhadap mutu obat dan pangan dari bahan berbahaya	54,29%	30 Apt, 90 Toko, 40 IRTP & 20 Pusk	-	-	27,8	-	-	APBD	Dinas Kesehatan	
2.	Peningkatan dan Pengendalian Mutu Obat dan Bahan Berbahaya	Terlaksananya pemantauan dalam peningkatan terhadap mutu obat dan pangan dari bahan berbahaya	54,29%	-	15 Apt, 90 Toko, 40 IRTP & 20 Pusk	15 Apt, 90 Toko, 40 IRTP & 20 Pusk	-	25	75	APBD	Dinas Kesehatan	
5.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
1.	Pengamatan dan Pencegahan Penyakit (PAK)	Desa UCI merata per desa serta terpantaunya penyakit potensial wabah sedini mungkin	72,07%	UCI > 95%	-	-	71,7	-	-	APBD	Dinas Kesehatan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Pengamatan dan Pencegahan Penyakit	Terlaksananya pelayanan imunisasi dasar lmgkap anak usia SD/MI & terlaksananya kewaspadaan dini KLB	72,07%	-	UCI > 95%	UCI > 95%	-	50	160	APBD	Dinas Kesehatan	
6.	Program usaha kesehatan masyarakat											
	1. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan			95,3%	100%	100%	1.950.000	5.726.980	5.898.375	APBD	RSUD	
7.	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat											
	1. pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (BLUD)			100%	100%	100%	108	184	194	APBD	RSUD	
8.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)											
	1. Pengembangan Diversifikasi Pangan Bagi Keluarga Balita Kurang Gizi	Tertanganinya Balita Gizi kurang	100 balita	120 balita	100 balita	150 balita	70	60	100	APBD	KKP	

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PAMEKASAN**

Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN (dalam jutaan)			SUMBER DANA	PELAKSANA	Ket
				2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TARGET 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015												
Indikator MDGs :		1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih										
1. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan												
1.	Deteksi Dini Kanker Mulut Rahim dan Payudara (PAP SMEAR)	Meningkatnya Kesehatan Ibu dalam mengantisipasi terjadinya kelainan Sel secara lebih dini		200 Org	200 Org	200 Org	32,9	38,2	40	APBD	BPPKB	
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat												
	1. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya kegiatan program kesehatan ibu dan anak	20 Pusk	20 Pusk	20 Pusk	20 Pusk	264,3	165	318	APBD	Dinas Kesehatan	
	2. Lomba Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) & Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (P-APBD)	Terlaksananya lomba Posyandu dan PHBS	0	20 Posyandu	-	-	40,1	-	-	APBD	Dinas Kesehatan	
	3. Perbaikan gizi masyarakat	Terlaksananya kegiatan prog. perbaikan gizi	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	147,8	120	170	APBD	Dinas Kesehatan	
	4. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Terlaksananya peningkatan kemampuan tenaga kesehatan		-	20 Pusk	20 Pusk	-	90	150	APBD	Dinas Kesehatan	
	5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui UKBM (PAK)	Terselenggaranya kegiatan pengembangan upaya kes bersumber daya masyarakat	20 Pusk	20 Pusk, 3 SBH, 30 Poskestren	-	-	20,2	-	-	APBD	Dinas Kesehatan	
	6. Pengadaan KMS dan Buku KIA (P-APBD)	Terlaksananya pengadaan KMS Balita dan Registrasi Posyandu	20 Pusk	24.420 KMS, 960 Bk Registrasi	-	189 Desa	48,7	-	90	APBD	Dinas Kesehatan	
	7. Pelayanan Kesehatan (Dokter ke Desa / TERKESAN)	Terlaksananya kegiatan promotif, preventif dan kuratif di Desa	-	189 Desa	189 Desa	189 Desa	349,8	485,7	437,5	APBD	Dinas Kesehatan	
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)												
1.	Pemasyarakatan Teknologi MP ASI BUMIL dan BUSUI (PAK)	Pemahaman Teknologi MP ASI BUMIL dan BUSUI meningkat	2 desa	2 desa	5 desa	5 desa	25	60	75	APBD	KKP	

4.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat												
	1. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Prosentase Jumlah kelompok kegiatan di masyarakat yang tersuluh dibanding jumlah desa yang ada sebanyak 222 desa / kelurahan setiap tahunnya.	22 desa/kel	22 desa/kel	22 desa/kel	22 desa/kel	17	18	19	APBD	Bapermas & KB		
5.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR												
	1. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Persentase jumlah PIK KRR berstatus tegak dibanding jumlah kecamatan yang ada sebanyak PIK	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	10	11	12	APBD	1.		
	2. Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Prosentase jumlah pendidik Sebaya dan Konselor sebaya (PSKS) yang melaksanakan pelayanan KRR Bagi kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah sebanyak 85 orang minimal 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	85 org	85 org	85 org	85 org	10	10	10	APBD	Bapermas & KB		
6.	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak												
	1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Prosentase jumlah desa/ kelurahan yang memiliki bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, sebanyak 222 desa/kelurahan setiap tahunnya.	222 desa/kel	222 desa/kel	222 desa/kel	222 desa/kel	12	13	14	APBD	Bapermas & KB		
7.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga												
	1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Prosentase pelatihan tenaga pendamping sebanyak 1 kegiatan minimal dalam 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	17	18	19	APBD	Bapermas & KB		

TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN (dalam jutaan)			SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	Ket
				2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TARGET 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015												
Indikator MDGs 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih												
1.	Program Pelayanan Kontrasepsi											
	1 Pelayanan KB Medis Operasi	Persentase Pelayanan alat kontrasepsi terhadap masyarakat		40 Kss	91 Kss	105 Kss	47,7	78,2	104,8	APBD	BPPKB	
2.	Program Keluarga Berencana											
	1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Fasilitasi penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin sebanyak 2 kegiatan dalam 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	22	23	24	APBD	BPPKB	
	2. Pelayanan KIE	Prosentase Jumlah desa/ kelurahan tersuluh dibanding jumlah desa yang ada sebanyak 222 setiap tahunnya	222 desa/kel	222 desa/kel	222 desa/kel	222 desa/kel	17	18	19	APBD	BPPKB	
	3. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Prosentase Sosialisasi perlindungan Hak reproduksi individu sebanyak 1 kegiatan dari 2 kegiatan setiap tahunnya	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	12	13	14	APBD	BPPKB	
	4. Promosi Pelayanan KHIBA	Prosentase Promosi Pelayanan KHIBA 1 kegiatan tingkat kabupaten dan 14 kegiatan tingkat kecamatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	17	18	19	APBD	BPPKB	
	5. Pembinaan Keluarga Berencana	Prosentase peserta KB aktif memakai alat kontrasepsi mantap dibanding dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 148 dalam 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	148 org	148 org	148 org	148 org	17	18	19	APBD	BPPKB	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6. Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling	Prosentase penyediaan sarana mobilitas tim KB keliling sebanyak 1 mobil unit penerangan KB dan 1 Unit mobil pelayanan KB dalam 1 tahun	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1,3	1,4	1,5	APBD	BPPKB	
	7. Peningkatan peran pria dalam keluarga berencana	Prosentase Peningkatan peran pria dalam penggerakan KB pria sebanyak 42 PKB minimal dalam 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	42 org	42 org	42 org	42 org	32	33	34	APBD	BPPKB	
3.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja											
	1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Prosentase jumlah PIK- remaja yang melaksanakan advokasi KIE tentang KRR dibanding jumlah PIK Remaja yang ada sebanyak 17 kelompok, 2 kegiatan dalam 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	17	18	19	APBD	BPPKB	
	2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Prosentase jumlah sosialisasi PKBR sebanyak 2 kegiatan dalam 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	17	18	19	APBD	BPPKB	
4.	Program Pelayanan Kontrasepsi											
	1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Prosentase Sarasehan progam KB sebanyak 1 kegiatan dalam 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	17	18	19	APBD	BPPKB	
	2. Pelayanan KB medis operasi	Prosentase pelayanan KIE KB Medis Operasi sebanyak 222 desa / kelurahan setiap tahunnya.	222 desa/kel	222 desa/kel	222 desa/kel	222 desa/kel	26	27	28	APBD	BPPKB	
5.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri											
	1. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Prosentase Kegiatan Fasilitasi pengembangan kelompok masyarakat peduli KB di 14 Kecamatan setiap tahun dari 5 tahun yang direncanakan.	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	17	18	19	APBD	Bapermas & KB	

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PAMEKASAN**

TUJUAN 6 : Mengendalikan Penyebaran HIV & AIDs, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN (dalam jutaan)			SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	Ket
				2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TARGET 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015												
Indikator MDGs :		1. Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun 2. Penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir 3. Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS 4. Rasio kehadiran anak yatim piatu di sekolah terhadap anak bukan yatim piatu (usia 10-14 tahun)										
1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat											
1	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah ISPA, HIV/AIDS dan Kusta	Terselenggaranya penatalaksanaan pemberantasan penyakit menular dan wabah	20 Pusk	20 Pusk	20 Pusk	20 Pusk	300	165,639	330	APBD	Dinas Kesehatan	
2.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
1	Pengamatan dan Pencegahan Penyakit (PAK)	Desa UCI merata per desa serta terpantaunya penyakit potensial wabah sedini mungkin	72,07%	UCI > 95%	-	-	71,7	-	-	APBD	Dinas Kesehatan	
3.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja											
1	Operasional Pendidikan Sebaya/Konselor Sebaya (PS/KS) dan Petugas PIK remaja dan Mahasiswa	Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	29 Or	130 Or	130 Or		29.300	130800	130.800	130.800	BPPKB	
4.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS											
1.	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Prosentase jumlah sekolah yang melaksanakan Penyuluhan Narkoba dan PMS bagi siswa sebanyak 20 sekolah 800 siswa minimal dalam 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	800 siswa	800 siswa	800 siswa	800 siswa	17	18	19	APBD	Bapermas & KB	

TUJUAN 6 : Mengendalikan Penyebaran HIV & AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN (dalam jutaan)			SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	Ket
				2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (TB) hingga tahun 2015												
	Indikator MDGs :	1. Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun) 2. Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 3. Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 4. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) 5. Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)										
1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat											
1	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah ISPA, HIV/AIDS dan Kusta	Terselenggaranya penatalaksanaan pemberantasan penyakit menular dan wabah	20 Pusk	20 Pusk	20 Pusk	20 Pusk	300	165,639	330	APBD	Dinas Kesehatan	

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PAMEKASAN**

Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	2013			2014			SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	Ket
				2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan												
	Indikator MDGs :	1. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan 2. Jumlah emisi karbon dioksida (CO2) 3. Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) 4. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 5. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan 6. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial										
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
	1. Pendukung Peningkatan Keindahan dan Kebersihan Kota	Peningkatan kinerja pelayanan kebersihan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	37	40	44	APBD	Dinas PU cipta karya dan tata ruang	
	2. Pengolahan Sampah Organik	Pengolahan sampah di TPA dan TPS	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	27	30	33	APBD	Dinas PU cipta karya dan tata ruang	
	3. Pendukung Kebersihan Jalan di Area Pelayanan Kebersihan	Terwujudnya Kota Bersih dan Indah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1340	1400	1540	APBD	Dinas PU cipta karya dan tata ruang	
	4. Penimbunan Sampah dan Pembuatan Saluran Lindi TPA	Memperpanjang Umur TPA	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	72	80	88	APBD	Dinas PU cipta karya dan tata ruang	
	5. Pengadaan Tong Sampah Organik dan An-organik (DAK)			65 unit			9.350,00			APBD	PU Cipta Karya dan Tata Ruang	
	6. Pembuatan dan Pengerasan Jalan di Area TPA (Jadwal Ulang)			180m2			100,00			APBD	PU Cipta Karya dan Tata Ruang	
	7. Lomba Kebersihan dan Keindahan Kota			11 kelurahan 5 desa			8.993,00			APBD	PU Cipta Karya dan Tata Ruang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan			15 jenis			111.250,00			APBD	PU Cipta Karya dan Tata Ruang	
	9. Pemeliharaan Gedung/Kantor UPT TPA Angsanah	Tersedianya barang dan Jasa pendukung pelayanan Administrasi UPT TPA Angsanah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45,00	50,00	55,00	APBD	Dinas PU cipta karya dan tata ruang	
	10. Pengadaan Gerobak Sampah (DAK)			22 unit			8.250,00			APBD	PU Cipta Karya dan Tata Ruang	
	11. Pengadaan Container Sampah (DAK)			4 unit			13.200,00			APBD	PU Cipta Karya dan Tata Ruang	
	12. Pembuatan Bak Sampah (DAK)			18 unit			13.200,00			APBD	PU Cipta Karya dan Tata Ruang	
	13. Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah (DAK)			5 unit			80.100,00			APBD	PU Cipta Karya dan Tata Ruang	
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan											
	1. Pembuatan IPAL Tahu (PAK)	1 Jumlah Ipal yang terbangun	8	2	3	4	50	103,125	125	APBD	Badan Lingkungan Hidup	
	2. Operasional Laboratorium Lingkungan	2 Jumlah pengujian air per bulan	0	10	15	20	47,12	63,35	75	APBD	Badan Lingkungan Hidup	
3.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup											
	1. Pembinaan dan Asistensi Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan	1 Jumlah Sekolah yang peduli lingkungan		24	29	30	63,445	63,445	65	APBD	Badan Lingkungan Hidup	
	2. Sosialisasi Peraturan di bidang lingkungan hidup	2 Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi		180	180	180	23,45	30	35	APBD	Badan Lingkungan Hidup	
4.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi											
	1. Pengadaan Peralatan Uji Kualitas Udara Ambien (DAK)		5 unit				80.100,00			APBD	Badan Lingkungan Hidup	
5.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)											
	1. Penanaman Pohon di Kawasan Sumber Mata Air (DAK)	1 Jumlah pepohonan yang ditanam untuk kelestarian sumber mata air		4.315	4.500	4.500	110	165	165	APBD	Badan Lingkungan Hidup	
	2. Rehabilitasi Media Tumbuh Pohon di Area Trotoar Pinggir Jalan (PAK)	2 Terpeliharanya kelangsungan tumbuh kembang pohon			100 pohon		-	115,00		APBD	PU Cipta Karya dan Tata Ruang	
	3. Pembuatan Taman Kota di Kelurahan Kowel (Pendamping)	3 Terbentuknya Taman di Kelurahan Kowel.			1 unit		-	200,00		APBD	PU Cipta Karya dan Tata Ruang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum											
	1. Pemeliharaan Taman Kota	1 Jumlah Taman yang terpelihara untuk paru-paru kota dan keindahan		7 taman	7 taman		90,00	300,00		APBD	PU Cipta Karya dan Tata Ruang	
	2. Pengadaan Pohon Peneduh	2 Jumlah Pohon yang di tanam		300 pohon			27,00	-		APBD	PU Cipta Karya dan Tata Ruang	
7.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan dan Sosial											
	1. Sosialisasi Izin Lingkungan dan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL (PAK)	1 Jumlah pengusaha yang mendapatkan sosialisasi		100	0	100	57,735	0	65	APBD	Badan Lingkungan Hidup	
8.	Program Perbaikan Lingkungan											
	1. Penunjang PNPMP MP 2013	Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPMP MP yang di Danai oleh Dana APBN	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	125	125	-	APBD	Dinas PU cipta karya dan tata ruang	
	2. Operasional kegiatan PLP BK Tahun 2013	Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan PLP BK yang di Danai oleh Dana APBN	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	150	50	-	APBD	Dinas PU cipta karya dan tata ruang	
9.	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan											
	1. Pengembangan BATAMAS/ BIOGAS	Terbangunnya instalasi biogas di kawasan peternakan	-	1 paket	-	1 paket	32	-	35	APBD	DISNAK	
10.	Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam											
	1. Operasional Penanggulangan Bencana di Pamekasan	Penanganan tandu bencana dapat terlaksana dengan baik dan tepat		600 kk	170 kk	200 kk	168	100	105	APBD	BPBD	
	2. Peningkatan Kesiagaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Tanggap Darurat	Terbentuknya korp tandu (tanggap darurat bencana dan pena sekolah)		100 kk			45			APBD	BPBD	
	3. Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kekeringan	Tersedianya air bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan		568 kk			100			APBD	BPBD	
	4. Pembuatan papan informasi dan peta rawan bencana	Tersedianya informasi kawasan rawan bencana		8 lokasi			25			APBD	BPBD	
	5. Sosialisasi Pencegahan Bencana dan Tanggap Darurat Daerah Rawan Bencana	Meningkatnya pemahaman peserta tentang pengelolaan bencana alam		150 org			45			APBD	BPBD	
	6. Penanganan Bencana Kekeringan	Terpenuhi kebutuhan air minum, masak dan cuci pada saat musim kekeringan		10 unit			75			APBD	BPBD	
	7. Pendampingan PNBPN	Sarana pendukung kegiatan pendampingan		1 pkt			65			APBD	BPBD	
	8. Pembuatan Saluran Pembuang Kelurahan Jungcangcang (Pendampingan PNBPN)	Saluran pembuang air hujan ke sungai		1 pkt			195			APBD	BPBD	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9. Pembuatan Tebing Penahan Longsor Desa Panaan (Pendampingan PNBPN)	Plengsengan penahan longsor		1 pkt			120			APBD	BPBD	
	10. Pembuatan Tebing Penahan Longsor Desa Pademawu Barat (Pendampingan PNBPN)	Plengsengan penahan longsor		1 pkt			85			APBD	BPBD	
	11. Pembuatan Tebing Penahan Longsor Desa Grujukan (Pendampingan PNBPN)	Plengsengan penahan longsor		1 pkt			160			APBD	BPBD	
	12. Pengadaan Tandon Penampungan Air Bersih (Pendampingan PNBPN)	Tempat penampungan air bersih (tandon)		24 unit			180			APBD	BPBD	
	13. Sosialisasi dan Simulasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana (PAK)	Meningkatnya pemahaman peserta tentang pengelolaan bencana alam		100 org			50			APBD	BPBD	
	14. Keposkoan Penanganan tentang bencana banjir & rawan kekeringan	Peserta keposkoan		18 org			30			APBD	BPBD	
	15. Pengadaan Sarana Tanggap Darurat (PAK)	Mitigasi tanggap darurat kekeringan dapat teratasi		1200 KK			100			APBD	BPBD	
	16. Pembuatan Tebing Penahan Longsor Desa Pademawu Barat (Pendampingan PNBPN) (DPAL)	Plengsengan penahan longsor			1 Pkt			85		APBD	BPBD	
	17. Sosialisasi Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pemahaman peserta tentang pengelolaan bencana alam			100 Org	115 org		50	53	APBD	BPBD	
	18. Sewa Gudang Logistik dan Peralatan	Terpenuhinya perawatan dan keamanan barang-2 logistik			100%	100%		40	42	APBD	BPBD	
	19. Pengadaan Logistik dan Obat-2 an	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat /desa rawan bencana			100%	100%		100	105	APBD	BPBD	
	20. Rehabilitasi & Rekonstruksi penanganan pascabencana banjir & longsor	Tercapainya pemulihan kondisi pasca bencana banjir dan longsor			1 Pkt	1 Pkt		450	473	APBD	BPBD	
	21. Pemulihan kondisi lingkungan berbasis padat karya pascabencana	Terwujudnya pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana			10 pokms	1 Pkt		200	210	APBD	BPBD	
	22. Updating website BPBD	Tersedianya portal website BPBD			1 Pkt	1 Pkt		20	21	APBD	BPBD	
	23. Bantuan tandon untuk daerah rawan kekeringan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat			10 unit	10 unit		90	95	APBD	BPBD	
	24. Sosialisasi pembentukan desa tangguh bencana	Peningkatan pemahaman pserta tentang pembentukan desa tangguh bencana			100 org	100 org		50	53	APBD	BPBD	
	25. Penyediaan jerigen untuk prasarana air bersih	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat			100 kk	100 kk		25	26	APBD	BPBD	
	26. Pembuatan rambu-rambu/papan informasi daerah rawan bencana	Tersedianya informasi kawasan rawan bencana			15 Lokasi	15 Lokasi		30	32	APBD	BPBD	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	27. Perencanaan teknis pengurangan resiko bencana (PRB) daerah	Efektifitas penanggulangan bencana banjir			1 paket	1 paket		100	105	APBD	BPBD	
	28. Pembuatan sumur serapan (PAK)	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat			1 paket	1 paket		500	525	APBD	BPBD	
	29. Pembuatan tangkis laut (PAK)	Plengsengan penahan abrasi laut			1 paket	1 paket		1.000	1.050	APBD	BPBD	
11.	Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah											
	1. Sosialisasi Penanganan terhadap Bencana Kebakaran									APBD	SATPOL PP	
12.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan											
	1. Rehabilitasi kawasan mangrove	1 Jumlah bibit mangrove yang ditanam di kawasan konservasi mangrove	0 Bibit	40000 Bibit	40000 Bibit	40000 Bibit	200	200	200	APBD	DISKANLA	
13.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan											
	1. Penghijauan Lingkungan (DAK)	1 Jumlah Bibit Penghijauan (batang)	16.200	36.000	36.000		45	44,958		APBD	DISHUTBUN	
	2. Penyempurnaan Teras Siring (DAK)	2 Jumlah lahan teras (Ha)	50	25	25		55	55		APBD	DISHUTBUN	
	3. Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PAK)	3 Jumlah Kategori Lomba PKA	5	7	7		45	50		APBD	DISHUTBUN	
	4. Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (PAK)	4 Jumlah tanaman penghijauan (batang)		20.000			50			APBD	DISHUTBUN	
14.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup											
	1. Sosialisasi Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran/Kerusakan Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pantai (PAK)	Jumlah Masyarakat Pesisir yang mendapatkan sosialisasi	80	180	180	180	23,45	30	35	APBD	BLH	
15.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup											
	1. Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan	Jumlah Bibit Penghijauan (batang)	60.000	110.000	125.000		130	150		APBD	DISHUTBUN	
	2. Pembangunan Hutan Rakyat (DAK)	Jumlah luas hutan rakyat (Ha)	8.309,90	50	75		110	165		APBD	DISHUTBUN	
	3. Rehabilitasi Hutan Mangrove (DAK)	Jumlah luas hutan mangrove	1.101,86	20	5		122,263	30		APBD	DISHUTBUN	
	4. Pengkayaan Vegetatif (DAK)	Jumlah luas hutan rakyat (unit/Ha)	8.309,90	600	600		766,920	766,920		APBD	DISHUTBUN	
	5. Pembuatan Hutan Kota	Jumlah Bibit tanaman (batang)		750	750		35	50		APBD	DISHUTBUN	

Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN (dalam jutaan)			SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	Ket
				2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015												
Indikator MDGs :		1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan										
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan												
	1. Pembuatan Sumur Resapan (DAK)	Jumlah sumur resapan yang terbangun oleh pemerintah	20	39	50	50	110	187	187	APBD	BLH	
	2. Pembuatan Lubang Biopori (DAK)	Jumlah lubang resapan biopori yang terbangun oleh pemerintah	0	4.013	4.000	4.000	110	110	110	APBD	BLH	
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani												
	1. Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) di Kab. Pamekasan	Terbentuknya HIPPA dan GHIPPA yang berbadan hukum	0 HIPPA 0 GHIPPA	11 HIPPA 1 GHIPPA	12 HIPPA 2 GHIPPA	12 HIPPA 2 GHIPPA	122	101,75	110	APBD	Dinas Pertanian	
3. Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya												
	1. Pengembangan/Rehab Jaringan Irigasi Tersier (DAK)	Distribusi air semakin lancar dan tertata	24 Jaringan Irigasi	39	38	40	3.764	3.800	4.000	APBD	Dinas Pertanian	
4. Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar												
	1. Pendampingan Pegeboran Air Tanah dan Sarana Air Bersih (PAK)	Terbentuknya Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAMI)		100			20			APBD	Bappeda	
	2. Pendamping Program Sanimas (PAK)	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan masalah sanitasi serta pengelolaan sanitasi		100			75			APBD	Bappeda	
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya												
	1. Pendamping WISM	Mewujudkan organisasi HIPPA/GHIPPA yang optimal		100			50			APBD	Bappeda	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi (WISM)	Mewujudkan organisasi HIPPA/GHIPPA yang optimal		100			50			APBD	Bappeda	
6.	Program Perbaikan Sarana Air Bersih/Hujan											
	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)	Pembangunan sarana dan prasarana Air Bersih/Air minum		1 Paket	1 Paket	1 Paket	785,047	872,274	959,5014	APBD	Dinas PU Ciptakarya & Tata Ruang	
	2. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin	Pembangunan sarana dan prasarana Air Bersih/Air minum								APBD	Dinas PU Ciptakarya & Tata Ruang	
7.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya											
	1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana irigasi, output dalam satuan prosentase	100	100	100	100	500	300	300	APBD	Dinas PU Pengairan	
	2. Pemeliharaan Sungai	Terpeliharanya sarana dan prasarana sungai, output dalam satuan prosentase	100	100	100	100	2.000	800	800	APBD	Dinas PU Pengairan	
	3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi lainnya (WISMP II)	Peningkatan Partisipasi HIPPA pada DI yang dikelola Dinas PU Pengairan, output dalam satuan prosentase	100	100	100	100	380	350	350	APBD	Dinas PU Pengairan	
	4. Pendamping WISMP II	Peningkatan Partisipasi HIPPA pada DI yang dikelola Dinas PU Pengairan output dalam satuan prosentase	100	100	100	100	120	150	150	APBD	Dinas PU Pengairan	
	5. Rehabilitasi Konstruksi Jaringan Irigasi Berbasis Padat Karya (Kemitraan)	Terpeliharanya sarana dan prasarana irigasi, output dalam satuan prosentase	100	100	100	100	875	500	500	APBD	Dinas PU Pengairan	
	6. Rehabilitasi Irigasi (DAK)	Terpeliharanya dan terbangunnya sarana dan prasarana irigasi, output dalam satuan prosentase	100	100	100	100	3.103	6.062	7.000	APBD	Dinas PU Pengairan	
	7. Pengelolaan Jaringan Irigasi (DPAL)	Terpeliharanya dan terbangunnya sarana dan prasarana irigasi, output dalam satuan prosentase	100	30	100	-	138	538	-	APBD	Dinas PU Pengairan	
	8. Rehabilitasi Saluran Sekunder dan Bangunan Pelimpah Klampar KM 2.145 (P2D2) (DPAL)	Terpeliharanya dan terbangunnya sarana dan prasarana irigasi, output dalam satuan prosentase	-	30	100	-	138	159	-	APBD	Dinas PU Pengairan	
8.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)	Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih/Air Minum		1 paket	1 paket	1 paket	785,05	872,27	959,50	APBD	Dinas PU Ciptakarya & Tata Ruang	
	2. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin	Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih/Air Minum		8 paket	24 paket	-	1.760	3.212	-	APBD	Dinas PU Ciptakarya & Tata Ruang	
9.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan											
	1. Pembuatan Sumur Resapan (DAK)	Jumlah Sumur Resapan (Unit)		28	30		112,500	120		APBD	DISHUTBUN	

Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN (dalam jutaan)			SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	Ket
				2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin dipemukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020												
Indikator MDGs :		1. Proporsi rumah kumuh perkotaan										
1. Program Perbaikan Lingkungan												
1	Operasional program perumahan swadaya Tahun 2013			1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	625		APBD	Dinas PU cipta karya dan tata ruang	
2. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan												
1	Pendamping Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 (PAK)			1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	50		APBD	Dinas PU cipta karya dan tata ruang	
3. Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (PLP) Berbasis Padat Karya												
1	Stimulan Berbasis Padat karya	Permukaan Jalan yang Mantap		1 Paket	1 Paket	1 Paket		34.338	-	APBD	Dinas PU cipta karya dan tata ruang	
2	Penyehatan Lingkungan Kawasan Pondok Pesantren	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Pondok Pesantren		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.750	500	-	APBD	Dinas PU cipta karya dan tata ruang	
3	Stimulan Berbasis Padat karya 2012 (DPAL)	Permukaan Jalan yang Mantap		1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	1.230	-	APBD	Dinas PU cipta karya dan tata ruang	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan Pencapaian Target Pembangunan Millenium (MDGs) Kabupaten Pamekasan disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mendukung tercapainya target-target MDGs di tingkat Nasional yang telah di gambarkan dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia yang disusun oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini kantor Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2010.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Millenium (MDGs) ini menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Pamekasan dalam rangka pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang disepakati secara global dalam rangka MDGs. Oleh karena itu RAD MDGs ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD maupun dalam Rencana Jangka Pendek (Tahunan) yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kerja SKPD.

Pencapaian tujuan MDGs bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas, yakni : pada Jajaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang salah satu penguatnya adalah memahami visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan penjabaran secara utuh sesuai pentahapan dengan dukungan unsur Legislatif. Dalam konteks ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu para pemangku kepentingan (Perguruan Tinggi, Perbankan, Organisasi Profesi, Dunia Usaha dan Industri, Organisasi Kemasyarakatan) hendaknya berperan aktif sesuai dengan peran dan fungsinya dengan memberikan kontribusi berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki sekaligus mencermati dengan sungguh-sungguh akurasi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten terkait dengan ketercapaian indikator MDGs. Seluruh *stakeholders* perlu membangun sinergitas dan memberikan kontribusi yang berkesinambungan dalam pelaksanaan